

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
Denny Prabu Syahputra, S.Ak., M.Ak
Riskia Putra, S.Pd., M.M



Ekonomi Barokah

Dari Tauhid ke Keadilan Sosial



EKONOMI BAROKAH

Dari Tauhid Ke Keadilan Sosial

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
Denny Prabu Syahputra, S.Ak., M.Ak
Riskia Putra, S.Pd., M.M

EKONOMI BAROKAH

Dari Tauhid Ke Keadilan Sosial



EKONOMI BAROKAH

Dari Tauhid Ke Keadilan Sosial

© 2025

Cetakan, Agustus 2025

15,5 x 23 cm, xvi + 166 halaman

ISBN : 978-634-7256-45-4

Penulis : Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
Denny Prabu Syahputra, S.Ak., M.Ak
Riskia Putra, S.Pd., M.M
Editor : Maulana Aenul Yaqin M.Pd.
Layout Isi : Yusrony Z.
Desain Cover : Yusrony Z.

Diterbitkan oleh:

CV. ISTANA AGENCY

Anggota IKAPI No.138/ DIY/ 2021

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12

Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

☎ 0851-0052-3476 ✉ percetakanistana09@gmail.com

☎ 0857-2902-2165 📘 istanaagency

📷 istanaagency 🌐 www.istanaagency.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi-Nya yang mengajarkan manusia dengan pena dan menanamkan hikmah di balik segala peristiwa. Buku ini hadir sebagai sebuah ikhtiar kecil namun penuh harap: untuk merintis jalan menuju ekonomi yang lebih manusiawi, spiritual, dan adil ekonomi yang tidak hanya dihitung dengan angka dan pertumbuhan, tetapi juga dengan keberkahan, keadilan, dan ridha Ilahi.

Di tengah kegelisahan global ketimpangan yang melebar, krisis spiritual di balik kemajuan teknologi, serta disorientasi arah dalam pembangunan muncul pertanyaan mendasar: untuk siapa dan demi apa ekonomi dijalankan? Buku ini mencoba menjawab pertanyaan itu melalui tawaran paradigma yang berakar pada tauhid, bertumpu pada nilai-nilai Islam, dan bertujuan mewujudkan keadilan sosial yang hakiki.

“Ekonomi Barokah” bukan hanya wacana, melainkan gerakan peradaban. Ia mengajak kita semua dari pedagang kecil hingga pengambil kebijakan, dari orang tua dalam rumah tangga hingga pelaku ekonomi digital untuk membangun kehidupan yang cukup, berkah, dan maslahat. Buku ini menyatukan renungan spiritual, refleksi sosial, dan narasi ekonomi dalam satu bingkai: bahwa barokah adalah fondasi dan masa depan peradaban.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang menginspirasi dan mendoakan proses penulisan buku ini. Semoga ia menjadi bagian dari kontribusi kecil dalam membangun dunia yang lebih adil, teduh, dan berorientasi akhirat.

Semoga buku ini membawa *manfaat dan keberkahan*.

Jember, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi

PENDAHULUAN; MENGAPA BAROKAH DIBUTUHKAN DI ZAMAN INI?..... ix

A. KRISIS SPIRITUALITAS DALAM SISTEM EKONOMI MODERN.....	x
B. KAPITALISME, KESENJANGAN, DAN KEHILANGAN NILAI.....	xii
C. BAROKAH SEBAGAI FONDASI ETIS DAN ALTERNATIF PARADIGMATIS.....	xiii

BAB 1 TAUHID SEBAGAI LANDASAN EKONOMI 1

A. REZEKI SEBAGAI AMANAH, BUKAN HAK MUTLAK	2
B. TUHAN SEBAGAI PEMILIK MUTLAK SUMBER DAYA.....	3
C. TAUHID DAN PEMBEBASAN DARI KERAKUSAN (TATHAHHUR).....	4
D. TAWAKAL, SYUKUR, DAN QANA'AH DALAM TINDAKAN EKONOMI.....	6

BAB 2 BAROKAH – MAKNA, DIMENSI, DAN MANIFESTASI SOSIAL 9

A. MAKNA BAROKAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS.....	10
B. PERBEDAAN ANTARA KEBERLIMPAHAN DAN KEBERKAHAN.....	12
C. TANDA-TANDA EKONOMI YANG BAROKAH	14
D. BAROKAH DALAM KEHIDUPAN NABI DAN SAHABAT	22

BAB 3 EKONOMI RUMAH TANGGA YANG BAROKAH 25

A. PRINSIP BAROKAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA.....	27
B. PERAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI BERKAH	29
C. KELUARGA SAKINAH SEBAGAI BASIS EKONOMI MORAL	31
D. PENDIDIKAN KEUANGAN ANAK YANG BERLANDASKAN TAUHID	33

BAB 4 BAROKAH DALAM DUNIA USAHA DAN KERJA 37

A. BISNIS SEBAGAI JALAN IBADAH DAN PELAYANAN SOSIAL.....	38
--	----

B. PRINSIP HALAL, TAYYIB, DAN MASLAHAT	39
C. KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DAN EKONOMI SOLIDARITAS.....	40
D. MANAJEMEN WAKTU DAN KERJA DALAM BINGKAI SPIRITUALITAS.....	43

BAB 5 ZAKAT, INFAQ, DAN WAKAF SEBAGAI SISTEM

DISTRIBUSI BAROKAH	47
A. ZAKAT SEBAGAI PENGHAPUS KESENJANGAN DAN PEMBERSIH HARTA.....	48
B. INFAQ DAN SEDEKAH: MENYALURKAN BERKAH SECARA SOSIAL	49
C. WAKAF PRODUKTIF DAN EKONOMI KEUMATAN	51
D. PERAN INSTITUSI ZAKAT DAN FILANTROPI ISLAM KONTEMPORER	53

BAB 6 EKONOMI BAROKAH SEBAGAI JALAN Keadilan Sosial. 59

A. ISLAM DAN PEMBELAAN TERHADAP MUSTADH'AFIN	60
B. REDISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM SEMANGAT Keadilan	66
C. MODEL EKONOMI BERBASIS KOMUNITAS DAN KOPERASI.....	72
D. KRITIK TERHADAP NEOLIBERALISME DARI PERSPEKTIF BAROKAH	77

BAB 7 EKONOMI BAROKAH DI ERA KONSUMERISME DAN

DIGITALISASI	85
A. KRISIS MAKNA DAN ILUSI KEBAHAGIAAN DALAM BUDAYA KONSUMSI	86
B. ALGORITMA, IKLAN, DAN EKSPLOITASI HASRAT	93
C. DIGITALISASI USAHA BERBASIS NILAI: HALAL DAN TRANSPARAN	99
D. BAROKAH DALAM MEDIA SOSIAL DAN EKONOMI KREATIF .	104

BAB 8 MEMBANGUN SISTEM EKONOMI BAROKAH: DARI

INDIVIDU KE NEGARA	109
A. PENDIDIKAN EKONOMI BERBASIS NILAI	110
B. KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEBERPIHAKAN PADA EKONOMI RAKYAT	113
C. SPIRITUALITAS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN....	117
D. INTEGRASI NILAI ISLAM DALAM EKONOMI MAKRO DAN FISKAL	122

BAB 9 PENUTUP	135
EKONOMI BAROKAH SEBAGAI GERAKAN PERADABAN	135
A. MEMBANGUN BUDAYA REZEKI YANG BERKAH DAN CUKUP	136
B. EKONOMI BAROKAH: JALAN TENGAH ANTARA SPIRITUALITAS DAN KEADILAN	139
C. MENUJU EKONOMI YANG MEMBAHAGIAKAN MANUSIA DAN DIRIDHAI TUHAN.....	142
D. SERUAN UNTUK TRANSFORMASI INDIVIDU DAN STRUKTURAL	146
E. MENUJU EKONOMI YANG MENGHIDUPKAN.....	151
 EPILOG ; BAMENUJU EKONOMI YANG MEMBAWA BAROKAH..	157
DAFTAR PUSTAKA.....	160
BIODATA RINGKAS.....	163

PENDAHULUAN

MENGAPA BAROKAH DIBUTUHKAN DI ZAMAN INI?

Di tengah derasny arus modernisasi yang mengagungkan angka, efisiensi, dan pertumbuhan tanpa batas, dunia tampak bergerak maju secara materiil, namun justru mengalami kemunduran dalam dimensi ruhani. Manusia modern menjadi lebih sibuk, tetapi kehilangan arah; lebih terhubung secara digital, namun kian merasa terasing secara eksistensial; lebih makmur dalam statistik makro, namun miskin dalam makna, relasi, dan keberkahan. Rasionalitas instrumental yang membentuk sistem ekonomi kontemporer dengan asas akumulasi, kompetisi, dan deregulasi pasar telah memisahkan ekonomi dari akar spiritual dan moralnya. Akibatnya, kesejahteraan direduksi menjadi sekadar kepemilikan, dan nilai hidup dipersempit dalam kurva pertumbuhan.

Padahal, dalam tradisi kebijaksanaan spiritual, kesejahteraan sejati bukan hanya soal *seberapa banyak yang dimiliki*, tetapi *seberapa berkah dan bermakna ia dijalani*. Ia bukan semata urusan angka, melainkan soal keberadaban jiwa, keadilan sosial, dan kedekatan dengan Yang Ilahi. Kehidupan yang berlimpah tetapi tidak membawa kedamaian, hakikatnya adalah kemiskinan terselubung kekosongan yang tak bisa dipenuhi oleh surplus produksi atau konsumsi.

Dalam konteks kegamangan inilah, konsep *ekonomi barokah* hadir sebagai tawaran epistemologis sekaligus praksis. Ia bukan hanya kritik terhadap sistem yang mengobjektifikasi manusia dan menghilangkan ruh etika dari pasar, tetapi juga ajakan untuk menata ulang orientasi ekonomi: dari sekadar *memiliki lebih banyak* menuju *menjadi lebih bermakna*. Ekonomi barokah menghidupkan kembali kesadaran bahwa aktivitas ekonomi adalah bagian dari laku spiritual;

bahwa kerja, transaksi, dan distribusi rezeki tidak terlepas dari dimensi ibadah, tanggung jawab sosial, dan pengabdian kepada Tuhan.

Dengan menyeimbangkan dunia dan akhirat, produktivitas dan kesalehan, ekonomi barokah menempatkan keberkahan bukan sekadar keberlimpahan sebagai ukuran utama kesejahteraan. Di sinilah ia menjadi bukan hanya alternatif teknokratik, melainkan fondasi filosofis bagi peradaban yang ingin hidup secara lebih adil, cukup, dan penuh makna.

A. KRISIS SPIRITUALITAS DALAM SISTEM EKONOMI MODERN

Sistem ekonomi global kontemporer dibentuk dan digerakkan oleh paradigma kapitalisme neoliberal sebuah tatanan yang menjadikan kompetisi bebas, deregulasi pasar, dan akumulasi keuntungan sebagai pilar utama. Dalam kerangka ini, manusia direduksi menjadi *homo economicus*: makhluk rasional yang bertindak semata-mata demi memaksimalkan kepuasan dan keuntungan pribadi. Orientasi ini menjauhkan aktivitas ekonomi dari akar nilai, moralitas, dan dimensi transendental yang selama berabad-abad mewarnai perilaku ekonomi masyarakat tradisional maupun religius (Sen 1999; Sandel 2012).

Akibatnya, aktivitas produksi dan konsumsi tidak lagi dipahami sebagai bagian dari pengabdian kepada kebaikan bersama (*maslahah*), melainkan sebagai instrumen untuk ekspansi modal yang tiada henti. Ekonomi kehilangan jiwanya. Di tengah angka-angka pertumbuhan dan laba perusahaan yang melonjak, justru kita menyaksikan meningkatnya ketimpangan sosial, eksploitasi alam, serta kegersangan makna hidup dalam masyarakat modern. Inilah krisis spiritualitas dalam ekonomi: ketika kerja tidak lagi menjadi ibadah, ketika kepemilikan tak lagi dibarengi dengan tanggung jawab sosial, dan ketika konsumsi kehilangan kesadaran akan keberkahan.

Dalam pandangan Islam, ekonomi bukanlah ruang netral yang bebas dari nilai. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari penghambaan kepada Allah (ubudiyah), medan jihad ruhani yang menuntut

kejujuran, keadilan, dan empati sebagai fondasi perilaku ekonomi. Setiap bentuk transaksi, kepemilikan, produksi, hingga konsumsi bukan hanya dinilai dari aspek hukum atau efisiensi, tetapi dari keberkahan (barokah) yakni sejauh mana ia membawa manfaat yang langgeng, ketenteraman hati, dan ridha Ilahi dalam prosesnya.

Barokah bukan sekadar keberlimpahan kuantitatif, melainkan kelapangan dalam keterbatasan, manfaat yang melampaui angka, dan ketenangan batin yang hadir bersama kejujuran dan kesyukuran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Sesungguhnya harta tidak akan berkurang karena sedekah.”
(HR. Muslim No. 2588)

Hadis ini tidak sekadar menjadi nasihat moral, tetapi juga menantang fondasi epistemik ekonomi modern yang mengukur nilai hanya dari sisi kuantitatif. Ia membawa kita pada logika spiritual yang subversif terhadap materialisme: bahwa keberkahan lebih utama daripada pertambahan, dan bahwa memberi adalah cara tertinggi untuk memiliki. Dalam kerangka ini, harta yang diberkahi bukan yang melimpah tanpa arah, melainkan yang memberi manfaat, menyambung hidup, dan mendekatkan manusia kepada Tuhan.

Inilah prinsip utama dalam ekonomi barokah: bahwa nilai sejati harta tidak ditarik oleh nominal, tetapi oleh sejauh mana ia menjadi rahmat bagi sesama dan jalan menuju ridha Ilahi. Barokah menolak dikotomi antara yang sakral dan yang profan, antara ekonomi dan spiritualitas. Ia mengembalikan ekonomi ke dalam orbit ibadah.

Paradigma seperti ini justru telah lama dipinggirkan oleh kapitalisme global, yang lebih memilih logika efisiensi, pertumbuhan tanpa etika, dan akumulasi tanpa arah. Kita hidup di zaman yang secara material melimpah, tetapi kekeringan makna kian terasa; manusia memiliki segalanya, kecuali ketenangan, relasi yang hangat, dan rasa cukup.

Karena itu, ekonomi barokah bukan nostalgia religius, tetapi jawaban eksistensial bagi zaman yang kehilangan kompas nilai. Ia bukan utopia spiritual, melainkan visi praksis yang menghidupkan ekonomi dengan jiwa, dan menghidupkan jiwa lewat ekonomi.

B. KAPITALISME, KESENJANGAN, DAN KEHILANGAN NILAI

Krisis spiritual dalam sistem ekonomi modern tidak hanya terlihat dari rusaknya relasi manusia dengan Yang Ilahi, tetapi juga dari cara sistem itu memperlakukan sesama manusia. Ketimpangan yang mencolok antara si kaya dan si miskin bukan sekadar angka statistik, melainkan gejala dari keretakan nilai dan etika global. Menurut laporan Oxfam (2023), satu persen populasi terkaya dunia menguasai lebih dari 40 persen kekayaan global, sementara lebih dari 700 juta orang masih terjerat dalam kemiskinan ekstrem. Ini bukan semata ketimpangan ekonomi ini adalah ketimpangan moral, yang dibiarkan subur oleh sistem yang menormalisasi ketidakadilan sebagai bagian dari “mekanisme pasar”.

Kapitalisme tidak gagal dalam menciptakan kekayaan. Ia justru sangat berhasil dalam menciptakan surplus, akumulasi, dan ekspansi modal. Namun, ia gagal mendistribusikan kekayaan secara adil, dan lebih jauh lagi, gagal menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam proses ekonomi itu sendiri. Kekayaan menjadi tujuan, bukan amanah. Pasar menjadi altar, dan manusia menjadi pemuja benda.

Lebih parah, pasar modern tidak hanya memproduksi barang, tetapi juga membentuk kesadaran. Melalui iklan, algoritma digital, dan budaya konsumsi, manusia modern dipaksa untuk hidup dalam ilusi kekurangan abadi selalu ingin lebih, selalu merasa kurang. Kebahagiaan kini diukur dari berapa banyak yang dimiliki, bukan dari sejauh mana sesuatu membawa keberkahan dan kedamaian batin.

Inilah yang telah lama dikritik oleh Erich Fromm dalam karya klasiknya *To Have or To Be?* (2005). Fromm menjelaskan bahwa peradaban modern telah mengalami transisi mendalam: dari masyarakat yang berakar pada *to be* kebermaknaan, kedalaman eksistensi, dan kesadaran spiritual menjadi masyarakat *to have*, yang mengukur martabat dan kebahagiaan dari apa yang bisa dikumpulkan, dimiliki, dan dikonsumsi. Dalam dunia seperti ini, manusia kehilangan dirinya sendiri, karena ia tidak lagi hidup untuk menjadi, tetapi hidup untuk memiliki.

Ekonomi barokah hadir sebagai kritik dan koreksi atas kegilaan kolektif ini. Ia tidak menolak kekayaan, tetapi menempatkannya dalam bingkai tanggung jawab dan spiritualitas. Dalam paradigma barokah, pertanyaan dasar dalam ekonomi bukan lagi, “berapa keuntungan yang saya dapatkan?”, tetapi, “apakah rezeki ini halal, bermanfaat, dan mendekatkan saya kepada Tuhan serta sesama?” Ekonomi barokah menuntut keberlimpahan yang berlandaskan keberkahan harta yang memberi manfaat, bukan memenjarakan hati; penghasilan yang menumbuhkan syukur, bukan keserakahan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia...” (QS. Al-Qashash [28]: 77)

Ayat ini menjadi penegasan bahwa Islam tidak menolak dunia, tetapi mengingatkan agar dunia tidak menjadi hijab bagi akhirat. Ekonomi barokah, dalam semangat ayat ini, adalah tentang keseimbangan antara memiliki dan menjadi, antara harta dan hikmah, antara dunia dan ridha Ilahi.

C. BAROKAH SEBAGAI FONDASI ETIS DAN ALTERNATIF PARADIGMATIS

Di tengah arus deras kapitalisme global yang menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur utama keberhasilan, konsep *barokah* hadir bukan sebagai romantisme spiritual yang usang, melainkan sebagai tawaran etik dan paradigma alternatif yang mendalam dan revolusioner. *Barokah* bukanlah sekadar limpahan materi atau hasil yang banyak, melainkan kualitas keberadaan yang memancarkan manfaat, ketenangan batin, serta keberlangsungan nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pandangan Islam, rezeki bukan hak mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah SWT. Setiap harta yang dimiliki tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam relasi transendental: antara manusia, sesama makhluk, dan Pencipta. Dalam kerangka tauhid,

manusia adalah *khalifah* (wakil Tuhan) di bumi, yang tugasnya adalah mengelola dengan penuh tanggung jawab, bukan mengeksploitasi tanpa batas. Karena itu, keberkahan muncul bukan dari kuantitas, melainkan dari keselarasan antara cara memperoleh, mengelola, dan membelanjakan harta dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Barokah adalah jejak kehadiran Ilahi dalam urusan duniawi. Ia bukan semata-mata tentang jumlah, melainkan tentang kualitas tentang makna yang tersembunyi dalam rezeki yang sederhana namun membawa ketenteraman.

Barokah hadir ketika:

- *Rezeki diperoleh dengan cara yang halal*, melalui usaha yang jujur, penuh amanah, dan bebas dari tipu daya serta kezaliman.
- *Dikelola dalam jalur yang benar*, dengan adab muamalah, manajemen yang bertanggung jawab, serta kesadaran bahwa harta adalah amanah, bukan milik mutlak;
- *Digunakan untuk tujuan yang diridhai Allah*, bukan untuk kesombongan atau hawa nafsu, tetapi sebagai sarana untuk mendekat kepada-Nya dan menyambung kasih kepada sesama;
- *Memberi manfaat sosial dan ekologis yang nyata*, yaitu ketika harta tak hanya memakmurkan individu, tetapi juga menjadi berkah bagi keluarga, masyarakat, dan alam semesta.

Dalam dimensi ini, barokah menjadi etos spiritual ekonomi Islam: ia tidak lahir dari akumulasi, tapi dari niat yang lurus; tidak tumbuh dalam kerakusan, tapi dalam syukur dan qana'ah; tidak menetap dalam sistem yang menindas, tapi dalam struktur yang adil dan berkeadilan.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf [7]: 96: *"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi..."*

Keberkahan bukanlah privilese ekonomi, tetapi buah dari iman kolektif dan ketakwaan sosial sebuah keseimbangan antara spiritualitas, keadilan, dan keberlanjutan.

Seperti yang ditegaskan oleh Taha Abdurrahman dalam *Rūḥ al-Ḥadāthah* (2006), etika Islam tidak berhenti pada pengaturan perilaku eksternal, tetapi merupakan jalan spiritual yang menyentuh cara manusia *menghadirkan dirinya di dunia secara bermakna*. Konsep barokah adalah bagian integral dari *ruh etika Islam*, yang menjembatani antara ibadah transendental dan praksis sosial.

Maka dari itu, ekonomi barokah bukan sekadar alternatif teknokratik, tetapi merupakan kritik radikal terhadap paradigma ekonomi kapitalistik yang menuhankan pertumbuhan tanpa batas dan memisahkan dimensi ekonomi dari nilai-nilai spiritual serta tanggung jawab ekologis. Kapitalisme modern dibangun di atas asumsi bahwa semakin banyak, semakin baik; bahwa pasar bebas akan mengatur segalanya; dan bahwa keberhasilan diukur dari akumulasi, bukan kebermaknaan.

Dalam hal ini, ekonomi barokah berdiri sebagai suara kenabian di tengah riuhnya pasar global. Ia menolak segala bentuk *fāsād* (kerusakan) baik yang bersifat material, sosial, maupun spiritual. *Fāsād* bukan hanya kerusakan ekologis, tetapi juga mencakup kehancuran makna dan kemunduran akhlak akibat sistem yang menjadikan manusia sebagai alat produksi dan konsumsi belaka.

Kerusakan itu hadir dalam bentuk:

- *Eksplorasi lingkungan yang destruktif*, di mana alam dijadikan objek eksploitasi tanpa ruh kasih sayang dan amanah;
- *Ketimpangan distribusi kekayaan*, yang membuat segelintir kaya semakin berkuasa sementara yang miskin terpinggirkan;
- *Transaksi yang zalim*, seperti riba, manipulasi harga, ketimpangan relasi kerja, dan monopoli yang mengabaikan prinsip keadilan;
- *Gaya hidup konsumtif dan hedonistik*, yang menafikan nilai *qana'ah* (kepuasan spiritual), *zuhud* (kesederhanaan batin), dan *syukur* (penghargaan atas yang cukup).

Ekonomi barokah menegaskan bahwa keberlimpahan yang tidak disertai keberkahan justru dapat menjadi fitnah, sebagaimana firman

Allah dalam QS. Al-Munāfiqūn [63]: 9: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.”*

Dengan demikian, ekonomi barokah membebaskan manusia dari perbudakan materi dan mengembalikannya pada maqam penghambaan yang merdeka, di mana setiap aktivitas ekonomi dipahami sebagai bagian dari ibadah, bukan sekadar alat untuk mengejar dunia. Ia menghidupkan kembali kesadaran bahwa rezeki sejati bukan yang banyak, tetapi yang membawa maslahat, mendekatkan pada Tuhan, dan menciptakan keseimbangan antara manusia, masyarakat, dan alam.

Al-Qur’an secara tegas menyatakan: *“Dan Kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran (qadar).”* (QS. Al-Qamar [54]: 49)

Ayat ini memancarkan prinsip dasar dalam ekonomi Islam: keseimbangan (*mīzān*) dan keadilan (‘adl). Segala aspek kehidupan termasuk ekonomi harus tunduk pada ukuran ilahiyah, bukan pada nafsu yang terus-menerus menuntut lebih. Ketika keseimbangan ini dilanggar, bukan hanya struktur sosial yang rusak, tetapi juga keberkahan hidup ikut lenyap.

Buku ini, dalam semangat tauhid dan barokah, tidak sekadar menyajikan informasi tentang ekonomi Islam, tetapi menawarkan proses transformatif menuju kesadaran spiritual dan etis. Ia mengajak pembaca untuk menempatkan kembali ekonomi dalam orbit ilahiyah: bahwa semua rezeki adalah milik Allah, dan manusia hanyalah penjaga dan penyalur berkah. Dalam paradigma ini, tujuan ekonomi bukanlah akumulasi tak terbatas, tetapi penyebaran manfaat yang berkelanjutan, adil, dan diridhai Tuhan.



BAB 1

TAUHID SEBAGAI LANDASAN EKONOMI

Dalam pandangan Islam, ekonomi bukanlah sekadar aktivitas materialistik yang bertujuan memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan medan pengabdian yang terintegrasi dalam misi spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ia bukan ruang yang bebas nilai, tetapi wilayah yang sarat makna tempat di mana tauhid sebagai prinsip utama tidak hanya dimaknai sebagai ajaran metafisik tentang keesaan Tuhan, tetapi juga sebagai fondasi epistemologis dan etis yang mengarahkan orientasi hidup, termasuk dalam cara manusia mencari, mengelola, dan mendistribusikan harta.

Tauhid, dalam kerangka ini, adalah lensa keberadaan yang membebaskan manusia dari ketergantungan pada materi, dari penghambaan terhadap pasar, dan dari ilusi bahwa kepemilikan duniawi bersifat mutlak. Ia membentuk kesadaran bahwa setiap rezeki adalah amanah, bukan hak privat yang bebas dari pertanggungjawaban; bahwa kekayaan hanyalah sarana, bukan tujuan; dan bahwa kesejahteraan tidak terletak pada kelimpahan, tetapi pada keberkahan dan kemaslahatan yang dihasilkannya.

Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam diarahkan untuk menegaskan nilai-nilai keadilan, merawat keseimbangan sosial, dan menciptakan keberlanjutan ekologis



yang selaras dengan kehendak Ilahi. Prinsip tauhid mencegah ekonomi menjadi medan eksploitasi dan kerakusan; sebaliknya, ia menjadikannya ladang ibadah dan jalan pemberdayaan, di mana nilai-nilai seperti kejujuran, *qana'ah*, syukur, dan solidaritas ditanamkan sebagai fondasi peradaban.

Dalam kerangka spiritual yang holistik ini, kekayaan dipandang bukan sebagai ukuran keberhasilan, tetapi sebagai ujian moral dan tanggung jawab sosial. Ekonomi tidak diarahkan untuk mengejar pertumbuhan tak terbatas, melainkan untuk mewujudkan keseimbangan antara lahir dan batin, antara individu dan kolektif, antara dunia dan akhirat. Inilah etika ekonomi profetik sebuah jalan tengah antara produktivitas dan pengabdian, antara rasionalitas dan spiritualitas yang menjadikan tauhid sebagai ruh dari segala transaksi dan pergerakan ekonomi.

A. REZEKI SEBAGAI AMANAH, BUKAN HAK MUTLAK

Dalam tradisi Islam, konsep rezeki tidak sekadar dipahami sebagai hasil usaha manusia atau hak kepemilikan yang bersifat mutlak dan individualistik. Sebaliknya, rezeki dipandang sebagai karunia ilahi sekaligus amanah yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Pandangan ini menempatkan rezeki dalam bingkai epistemologis dan etis yang melampaui dimensi materialistik duniawi semata. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: *“Dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.”* (QS. Adz-Dzariyat [51]: 22)

Ayat ini bukan hanya mengingatkan akan sumber segala rezeki yang bersifat absolut di tangan Sang Pencipta, melainkan juga menegaskan bahwa manusia hanyalah penerima titipan yang wajib mengelola karunia tersebut dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Dalam perspektif ini, kepemilikan atas harta tidak pernah bersifat absolut dan bebas tanpa batas. Manusia diposisikan sebagai wakil (khalifah) di muka bumi yang diberi mandat untuk mengelola rezeki demi kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Imam Al-Ghazali



secara tegas menegaskan bahwa hak milik dalam Islam bersifat relatif, dibatasi oleh norma moral dan sosial, serta terikat pada kewajiban pertanggungjawaban kepada Tuhan dan sesama manusia. Kepemilikan bukanlah hak pribadi yang egoistik, melainkan amanah suci yang harus dijalankan dengan integritas dan etika (Ghazali 2005).

Hal ini diperkuat oleh ayat lain yang menyatakan: “*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi...*” (QS. Al-Baqarah [2]: 284)

Dengan demikian, segala sumber daya dan kekayaan pada hakikatnya milik Allah, dan manusia hanya diberi kewenangan mengelolanya secara bijak. Kesadaran akan posisi sebagai khalifah ini membawa konsekuensi moral yang serius: setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban tentang cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan kekayaan tersebut.

Karenanya, Islam secara prinsipil menolak konsep kepemilikan absolut dan individualistis seperti yang lazim dijumpai dalam kapitalisme modern, yang cenderung menumbuhkan kerakusan dan ketidakadilan sosial. Rezeki sebagai amanah justru membebaskan manusia dari ilusi kepemilikan mutlak yang menjadi akar dari berbagai konflik sosial dan degradasi moral. Ia mengajak manusia untuk hidup dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual atas kekayaan yang diterima.

Dengan landasan etis ini, pengelolaan ekonomi dalam Islam diarahkan pada keadilan distributif, keberlanjutan sosial-ekologis, dan keberkahan yang melampaui dimensi materi, menjadikan prinsip rezeki sebagai amanah sebagai fondasi utama bagi tata kelola ekonomi yang beradab dan bermartabat.

B. TUHAN SEBAGAI PEMILIK MUTLAK SUMBER DAYA

Dalam pandangan Islam, seluruh alam semesta dengan segala kekayaan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya merupakan milik mutlak Allah SWT, Sang Pencipta dan Penguasa alam raya. Kekayaan alam seperti tanah, air, mineral, dan sumber daya lainnya



tidak diciptakan untuk dikuasai secara eksklusif oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai amanah untuk dikelola demi kepentingan bersama umat manusia dan seluruh makhluk hidup. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah: *“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 284)

Konsep kepemilikan mutlak Tuhan ini secara tegas menentang ideologi kapitalisme neoliberal yang memuja kepemilikan pribadi tanpa batas dan mendorong deregulasi pasar yang sering mengabaikan aspek keadilan sosial dan keseimbangan ekologis. Dalam kerangka ekonomi Islam, pengakuan bahwa Tuhan adalah pemilik hakiki atas segala sumber daya menjadi landasan bagi prinsip keadilan distributif dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Seperti ditegaskan oleh pemikir Islam kontemporer Muhammad Asad, pengakuan atas kepemilikan mutlak Tuhan ini merupakan fondasi bagi keadilan sosial dan ekonomi dalam Islam. Dalam tulisannya, Asad menekankan bahwa pengelolaan sumber daya harus selalu selaras dengan maqāṣid al-sharī‘ah, yakni tujuan syariah yang mencakup pemeliharaan kehidupan (hifz al-nafs), keadilan (‘adālah), dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah). Oleh karena itu, setiap kebijakan dan praktik ekonomi wajib memperhatikan nilai-nilai tersebut agar tidak merugikan masyarakat luas maupun merusak keseimbangan alam (Asad 1980).

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya dalam Islam bukan hanya soal efisiensi ekonomi, melainkan juga dimensi moral dan sosial yang menuntut tanggung jawab kolektif demi keberlanjutan dan keadilan. Tuhan sebagai pemilik mutlak sumber daya mengajak manusia untuk mengelola karunia tersebut dengan sikap amanah, sehingga tercipta harmoni antara kebutuhan manusia, lingkungan, dan kehendak Ilahi.

C. TAUHID DAN PEMEBEBASAN DARI KERAKUSAN (TATHAHHUR)



Tauhid dalam Islam bukan sekadar pengakuan teologis bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Ia adalah asas eksistensial yang membentuk cara pandang, sikap batin, dan praktik hidup seorang Muslim. Dalam dimensi terdalamnya, tauhid adalah pembebasan: membebaskan jiwa manusia dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah termasuk ketergantungan pada harta, status, dan rasa aman semu yang dibangun oleh akumulasi materi.

Dalam tradisi tasawuf, proses pembebasan ini disebut *tathabbur* yakni pemurnian hati dari penyakit-penyakit batin seperti cinta dunia, kerakusan, ketamakan, dan ketakutan akan kehilangan. *Tathabbur* adalah jalan spiritual untuk kembali kepada fitrah tauhid yang sejati, di mana seluruh gerak hidup diarahkan hanya kepada Allah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menulis bahwa kesempurnaan tauhid (*kamāl al-tawḥīd*) hanya akan tercapai ketika hati benar-benar bersih dari segala ketergantungan kepada dunia, dan seluruh amal tertuju kepada Allah semata, tanpa motif tersembunyi atau syirik halus (*syirik khafi*) (Ibn Qayyim 2003).

Dalam konteks ekonomi, tauhid membentuk fondasi etik dan spiritual yang melawan ideologi konsumtif dan logika akumulatif dari sistem kapitalisme modern. Tauhid mengikis ilusi bahwa “lebih selalu lebih” dan menggantinya dengan kesadaran akan cukup (*qana’ah*), keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Seseorang yang bertauhid dengan benar tidak akan menimbun harta, tidak menipu dalam transaksi, tidak mengeksploitasi tenaga kerja, dan tidak merampas hak yang lemah. Sebab, setiap bentuk ketidakadilan dan kerakusan hakikatnya adalah bentuk pembangkangan terhadap ketauhidan penyekutuan tersembunyi terhadap kekuasaan mutlak Allah, karena ia meyakini bahwa kekayaan atau kekuasaan bisa menjadi penjamin keselamatan hidup.

Dengan demikian, tauhid bukan hanya jalan spiritual, tetapi juga etika sosial yang radikal. Ia menuntut pembebasan manusia dari perbudakan terhadap dunia dan pembalikan nilai dari akumulasi menjadi distribusi, dari dominasi menjadi pelayanan, dan dari ketamakan menjadi kesalehan sosial. Dalam dunia yang dilanda krisis



ekologi, ketimpangan ekonomi, dan konsumerisme ekstrem, tauhid hadir sebagai cahaya pembebas sebuah revolusi batin yang berakar pada cinta kepada Tuhan dan kasih terhadap sesama.

D. TAWAKAL, SYUKUR, DAN QANA'AH DALAM TINDAKAN EKONOMI

Dalam ekonomi Islam, spiritualitas bukanlah ornamen pasif, melainkan fondasi etis yang aktif membimbing sikap, keputusan, dan orientasi hidup manusia. Ekonomi barokah tidak lahir dari fatalisme atau sikap pasrah terhadap nasib, tetapi dari integrasi nilai-nilai ilahiah seperti *tawakal*, *syukur*, dan *qana'ah* dalam seluruh dimensi tindakan ekonomi. Ketiganya bukan hanya ajaran moral individual, melainkan prinsip transformatif yang melahirkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebahagiaan sejati.

Tawakal adalah ekspresi keimanan yang matang. Ia bukan bentuk kepasrahan pasif, tetapi optimisme spiritual yang tumbuh setelah upaya maksimal dilakukan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "*Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya.*" (QS. At-Talaq [65]: 3)

Ayat ini menunjukkan bahwa *tawakal* adalah keyakinan yang melahirkan ketenangan batin, ketekunan dalam kerja, dan keberanian mengambil risiko dengan niat yang lurus. Dalam tindakan ekonomi, *tawakal* memerdekakan manusia dari rasa takut terhadap ketidakpastian pasar, menjadikan kerja sebagai bentuk ibadah, dan menjauhkan dari praktik curang yang lahir dari ketidakpercayaan terhadap ketetapan Allah.

Syukur adalah kesadaran eksistensial yang mendalam bahwa segala yang dimiliki adalah karunia, bukan hak mutlak atau hasil tunggal dari kerja keras. Syukur menumbuhkan stabilitas hati: tidak tamak saat berlimpah, dan tidak putus asa saat dalam kesempitan. Ia membentuk sikap menerima tanpa menyerah, dan memberi tanpa merasa kehilangan. Sebagaimana dinyatakan Nabi Muhammad SAW:



“Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, syukur menciptakan keseimbangan psikologis dalam menghadapi dinamika ekonomi, serta mendorong altruisme dan solidaritas sosial dalam distribusi kekayaan.

Adapun *qana'ah* adalah etika konsumsi yang berpijak pada kesadaran spiritual akan cukupnya karunia Allah. Dalam dunia yang dibentuk oleh budaya konsumtif dan hasrat tak berujung, *qana'ah* menjadi bentuk perlawanan spiritual terhadap logika “lebih selalu lebih.” Ia mengajarkan gaya hidup sederhana, hemat, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta sesama. Dalam kerangka ini, *qana'ah* bukanlah penghalang kemajuan, melainkan filter moral yang menghindarkan manusia dari kerakusan dan kerusakan ekologis.

Ketiga nilai ini tawakal, syukur, dan *qana'ah* berfungsi sebagai *rem etis* dalam roda ekonomi. Mereka mencegah kesenjangan yang meluas, merawat harmoni sosial dan ekologis, serta membentuk masyarakat yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan dalam kompetisi yang membabi buta. Dalam tradisi sufistik, kebahagiaan ekonomi tidak terletak pada jumlah kepemilikan, tetapi pada hubungan yang benar antara manusia, harta, dan Tuhan. Kebebasan sejati bukan ketika kita memiliki banyak, tetapi ketika kita tidak diperbudak oleh apa yang kita miliki.

Dengan demikian, tauhid menjadi lebih dari sekadar doktrin abstrak; ia menjelma menjadi landasan praksis ekonomi. Dalam sistem ekonomi profetik, tauhid bukan hanya afirmasi keesaan Tuhan, tetapi juga penolakan terhadap penyembahan modern terhadap materi, pasar, dan ego. Ia menuntun manusia untuk mencari, mengelola, dan mendistribusikan harta sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada kemanusiaan. Ekonomi barokah hanya akan tumbuh di atas landasan ini yakni ketika rezeki dipandang sebagai amanah, harta sebagai alat untuk berbagi, dan transaksi sebagai jembatan spiritual menuju Tuhan.





BAB 2

BAROKAH – MAKNA, DIMENSI, DAN MANIFESTASI SOSIAL

Dalam dunia modern yang terobsesi pada pertumbuhan ekonomi, akumulasi kekayaan, dan pencapaian angka-angka statistik, konsep *barokah* tampak sebagai gagasan yang asing sekaligus menantang. Di tengah dominasi paradigma ekonomi kuantitatif, di mana kemajuan diukur lewat produk domestik bruto (PDB), konsumsi, dan volume perdagangan, *barokah* menawarkan ukuran lain: kualitas hidup yang bermakna secara spiritual, sosial, dan ekologis.

Barokah dalam tradisi Islam bukan sekadar banyaknya rezeki, melainkan keberadaan nilai ilahiah dalam sesuatu yang membuatnya membawa kebermanfaatan, ketenteraman, keberlanjutan, dan kedekatan dengan Tuhan. Ia adalah “keberlimpahan makna” yang tidak selalu sejalan dengan keberlimpahan angka. Rezeki yang barokah bisa jadi sedikit secara nominal, tetapi memberi cukup, menenangkan jiwa, dan menjadi sumber keberkahan bagi orang lain. Sebaliknya, harta yang banyak namun tidak barokah sering kali justru membawa kegelisahan, kerakusan, bahkan kehancuran.

Dalam perspektif ini, barokah adalah dimensi spiritual dari ekonomi yang menilai kesejahteraan bukan hanya dari sisi material, tetapi dari sejauh mana ekonomi menghadirkan keadilan, kebersamaan, dan keselarasan hidup. Barokah tidak bisa diukur oleh



instrumen ekonomi konvensional karena ia menyentuh wilayah batin, niat, dan keberkahan relasi antar manusia serta antara manusia dan alam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: *"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi."* (QS. Al-A'raf [7]: 96)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa *barokah* adalah akibat spiritual dari ketakwaan dan keberpihakan kepada nilai-nilai ilahiah dalam tatanan sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, barokah adalah akibat dari sistem hidup yang selaras dengan kehendak Ilahi bukan sekadar hasil kalkulasi ekonomi atau kebijakan pasar.

Dalam masyarakat kapitalistik yang menilai sukses dari seberapa besar yang bisa dimiliki dan dikonsumsi, konsep barokah mengajak kita untuk menilai ulang: *untuk apa kekayaan itu dikumpulkan?, siapa yang diuntungkan oleh pertumbuhan itu?, dan apakah sistem yang ada benar-benar membawa ketentraman dan keadilan bagi semua makhluk?*

Dengan demikian, *ekonomi barokah* bukan hanya alternatif teknis, tetapi tawaran etis dan spiritual. Ia mengajak manusia untuk melihat rezeki sebagai amanah, konsumsi sebagai tanggung jawab, dan transaksi sebagai ibadah. Ia mengoreksi kesenjangan antara pertumbuhan dan keadilan, antara kemajuan dan makna, antara kuantitas dan keberkahan. Dalam dunia yang semakin terjebak pada "lebih banyak" dan "lebih cepat," barokah mengajarkan bahwa *yang cukup dan berkah* seringkali lebih bernilai dari yang berlimpah namun rapuh.

A. MAKNA BAROKAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Dalam khazanah spiritual Islam, *barokah* adalah konsep kunci yang tidak hanya mencerminkan limpahan materi, tetapi terutama menunjuk pada hadirnya nilai ilahiah dalam kehidupan. Kata *barakah* berasal dari akar kata Arab *bā'-rā'-kāf* (ب ر ك), yang mengandung arti *tetap, konsisten, bertambah, dan penuh kebaikan*. Secara etimologis,



makna ini merujuk pada sesuatu yang tidak hanya stabil dan berkelanjutan, tetapi juga membawa kebaikan yang melimpah dan berdampak luas baik secara lahir maupun batin.

Al-Qur'an menyebut berbagai bentuk keberkahan yang melampaui batas-batas material: keberkahan pada individu yang bertakwa, pada tempat suci (seperti Makkah dan Baitul Maqdis), pada waktu (seperti bulan Ramadhan), dan tentu saja pada rezeki yang halal dan baik (*tayyib*). Salah satu ayat yang paling kuat menggambarkan hubungan antara spiritualitas dan keberkahan ekonomi adalah: "*Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi...*" (QS. Al-A'raf [7]: 96)

Ayat ini menyiratkan bahwa *barokah* bukan sekadar hasil dari kerja keras atau strategi ekonomi, melainkan anugerah transendental yang diturunkan kepada masyarakat yang menegakkan iman dan keadilan. Keberkahan, dalam pengertian ini, adalah resonansi spiritual dari struktur sosial yang selaras dengan nilai-nilai tauhid dan maqāsid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat) yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan dimensi substansial dari barokah. Dalam sabdanya: "*Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah karena keberkahan.*" (HR. Ahmad)

Ungkapan ini mengoreksi persepsi kuantitatif tentang kekayaan. Harta yang sedikit, jika diberkahi, bisa mencukupi dan menentramkan; sebaliknya, kekayaan melimpah tanpa barokah bisa menjadi sumber kegelisahan, kesombongan, dan kehancuran moral. Dalam kerangka inilah, *barokah* adalah kualitas spiritual yang memberi makna dan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta.

Menurut Yusuf al-Qaradawi (1997), *barokah* adalah "kehadiran unsur ilahiyah dalam sesuatu yang menjadikannya memberi manfaat lebih besar dari apa yang tampak secara lahir." Ia bukanlah entitas yang bisa diukur dengan instrumen ekonomi konvensional, tetapi



dapat dirasakan dalam kualitas relasi manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Barokah hadir dalam makanan yang sedikit tapi mengenyangkan; dalam usaha kecil tapi mencukupi; dalam waktu yang singkat tapi produktif; dan dalam rezeki yang terbatas tapi membawa ketenteraman dan syukur.

Dalam pandangan sufistik, barokah juga berkaitan erat dengan kehadiran ruh Ilahi dalam tindakan manusia. Barokah tidak turun kepada mereka yang hanya mengejar dunia, tetapi kepada mereka yang memurnikan niat, menegakkan keadilan, dan menjadikan hidup sebagai ibadah. Karena itu, barokah bukan hanya kondisi, tetapi juga proses yakni proses spiritual menjadi hamba yang sadar, bersyukur, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, konsep *barokah* menjadi koreksi filosofis terhadap paradigma ekonomi modern yang menuhankan angka dan menegaskan nilai. Dalam ekonomi Islam yang profetik, barokah adalah cermin dari keterhubungan antara langit dan bumi antara usaha manusia dan ridha Tuhan, antara kerja dan ibadah, antara keadilan dan kemakmuran.

B. PERBEDAAN ANTARA KEBERLIMPAHAN DAN KEBERKAHAN

Dalam logika ekonomi modern, kemajuan sering kali diukur melalui angka-angka kuantitatif: pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), peningkatan konsumsi, volume perdagangan, dan indeks pasar. Dalam kerangka ini, *keberlimpahan* (*kasrah*) yakni bertambahnya harta dan sumber daya secara jumlah dianggap sebagai tanda utama dari kesuksesan ekonomi. Namun Islam menawarkan ukuran yang berbeda: *keberkahan* (*barakah*), yaitu hadirnya nilai kebaikan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan dalam rezeki yang diterima.

Keberlimpahan dan keberkahan mungkin tampak mirip di permukaan, tetapi secara esensial keduanya sangat berbeda. Keberlimpahan hanya berbicara tentang *kuantitas*; keberkahan



berbicara tentang *kualitas spiritual dan sosial*. Barokah adalah ketika sesuatu yang sedikit memberi efek yang besar dan berjangka panjang, sementara keberlimpahan bisa menjadi bumerang jika tidak disertai dengan nilai ilahiyah dan tanggung jawab sosial.

“Ada orang yang makan banyak namun tidak merasa kenyang, dan ada pula yang makan sedikit namun penuh berkah.”
(Makna Hadis, HR. Muslim)

Hadis ini menggambarkan bahwa esensi kenikmatan dan kecukupan tidak terletak pada jumlah, tetapi pada kehadiran nilai spiritual dalam apa yang dimiliki. Dalam konteks ekonomi, keberlimpahan tanpa keberkahan bisa menghasilkan *kelebihan yang menyesakkan*: kekayaan yang memicu kezaliman, keserakahan, kesenjangan sosial, dan kegelisahan eksistensial. Sebaliknya, keberkahan walaupun dalam jumlah terbatas, memberi ketenteraman, kesyukuran, dan manfaat yang meluas baik secara individu maupun kolektif.

Hasan al-Banna (1990) dengan tajam mengingatkan bahwa masyarakat Islam tidak boleh tertipu oleh ukuran-ukuran lahiriah semata. Ia menyerukan agar umat menilai segala hal dari *kualitas ilahiyah* dan *dampak sosialnya*, bukan sekadar dari kuantitas materi yang mudah menyesatkan. “Ukuran kejayaan umat bukan pada banyaknya gedung, harta, atau jumlah konsumsi, tetapi pada integritas iman, keadilan, dan tanggung jawab sosial,” tulisnya dalam salah satu risalahnya.

Dalam konteks spiritualitas ekonomi, keberlimpahan adalah ujian, sementara keberkahan adalah anugerah. Keberlimpahan menuntut pengendalian diri dan distribusi yang adil, agar tidak berubah menjadi fitnah dan kezaliman. Keberkahan, sebaliknya, mengarahkan manusia pada kesadaran akan ketercukupan (*qana’ah*), ketundukan kepada kehendak Ilahi, dan komitmen pada kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, perbedaan antara keberlimpahan dan keberkahan adalah perbedaan antara *tampilan* dan *substansi*,



antara *kuantitas* dan *makna*, antara *nafsu kepemilikan* dan *hikmah pengelolaan*. Barokah adalah penanda dari tatanan hidup yang selaras dengan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab ekologis sebuah visi ekonomi yang tidak hanya mengejar *lebih banyak*, tetapi *lebih bermakna*.

C. TANDA-TANDA EKONOMI YANG BAROKAH

Dalam visi Islam, keberkahan dalam ekonomi tidak diukur melalui besarnya angka pendapatan atau seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi makro, melainkan melalui kualitas moral, kebermanfaatan sosial, dan kedekatan spiritual yang mengalir dari harta tersebut. *Ekonomi barokah* adalah sebuah tatanan yang tidak hanya memberi makan tubuh, tetapi juga menyuburkan jiwa dan memelihara tatanan sosial. Ia tampak dalam berbagai dimensi kehidupan, baik personal maupun kolektif, yang dapat dikenali melalui tanda-tanda berikut:

1. Kecukupan Tanpa Kelebihan

Dalam ekonomi yang diberkahi (*barokah*), pemenuhan kebutuhan tidak diukur dari gemerlap berlimpahnya harta, tetapi dari terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak, bermartabat, dan menenangkan jiwa. Kesejahteraan sejati bukan terletak pada akumulasi materi yang mencolok, melainkan pada kemampuan membedakan antara keperluan dan keserakahan, antara kemakmuran dan kemewahan yang menyesatkan.

Qana'ah, sebagai prinsip utama dalam spiritualitas ekonomi Islam, bukanlah sikap pasif atau fatalistik, tetapi sebuah bentuk *kearifan batin* kesadaran akan cukupnya rezeki yang telah diberikan, disertai kemampuan menahan diri dari kerakusan yang merusak relasi manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.

Dalam Al-Qur'an, nilai ini ditegaskan dalam firman-Nya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan



itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqan [25]: 67)

Ayat ini menunjukkan bahwa keberkahan dalam harta tidak muncul dari jumlahnya, melainkan dari cara ia dibelanjakan: tidak boros, tidak bakhil, dan senantiasa berada di jalan tengah (al-wasathiyyah). Inilah etika ekonomi yang bersumber dari mizan (keseimbangan) nilai yang menjadi inti ajaran Islam dalam mengelola dunia secara bijaksana.

Dalam perspektif filosofis, qana’ah adalah pengembalian makna kebahagiaan dari eksternalitas ke internalitas, dari pencapaian ke penyadaran. Dalam dunia modern yang memuja produktivitas tanpa batas, qana’ah hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap hasrat konsumtif yang tak pernah kenyang. Ia menata ulang orientasi hidup manusia dari kepemilikan menuju kebermaknaan, dari jumlah menuju nilai, dari kuantitas menuju kualitas ruhani.

Menurut Al-Ghazali, “kaya bukanlah banyaknya harta, tetapi kayanya hati.” Maka dalam sistem ekonomi barokah, indikator kesejahteraan bukan hanya pendapatan per kapita atau pertumbuhan PDB, melainkan kedamaian batin, solidaritas sosial, dan keharmonisan ekologis yang lahir dari cara hidup yang cukup dan penuh syukur.

Qana’ah bukan penolakan terhadap kemajuan, melainkan penyaringan terhadap ekses. Ia memuliakan rezeki tanpa menyembahnya, menghargai kerja tanpa diperbudak olehnya. Dengan demikian, qana’ah adalah asas dari ekonomi yang manusiawi ekonomi yang merdeka dari tirani keinginan, dan terbuka terhadap makna tertinggi: ridha Allah dan kebermanfaatan bagi sesama.

2. Kejujuran dalam Transaksi

Kejujuran bukan sekadar etika moral individual, tetapi fondasi spiritual dan sosial dalam aktivitas ekonomi yang diridhai Allah. Dalam Islam, transaksi bukan hanya soal pertukaran barang atau jasa, melainkan juga perjumpaan ruhani antara dua hati yang terikat oleh amanah dan saling percaya. Maka, kejujuran dalam transaksi



adalah bentuk ibadah; ia menghidupkan nilai-nilai ilahiah di tengah dinamika pasar.

Nabi Muhammad ﷺ bersabda: *“Penjual dan pembeli yang jujur dan amanah akan diberkahi jual belinya.”* (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa keberkahan dalam jual beli bukan semata diukur dari besarnya laba, tetapi dari hadirnya nilai kejujuran (*sidq*) dan kepercayaan (*amānah*) yang menyertai prosesnya. Ketika dua pihak bertransaksi dengan niat baik dan transparansi, maka bukan hanya barang berpindah tangan, tetapi juga rahmat Allah mengalir di antara mereka.

Secara filosofis, kejujuran menciptakan ekonomi relasional, bukan transaksional semata. Ia menumbuhkan struktur sosial yang saling mempercayai, mempererat ikatan kemanusiaan di tengah dunia yang sering kali terjebak dalam kalkulasi untung-rugi semata. Dalam kerangka ini, pasar bukan hanya tempat barter barang, tetapi juga ladang untuk menanam nilai-nilai surgawi di bumi.

Dalam konteks modern, praktik kejujuran sangat relevan di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi. Korupsi, manipulasi data, dan spekulasi pasar adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah sosial yang seharusnya dijaga. Maka, memperjuangkan kejujuran dalam transaksi adalah bagian dari jihad ekonomi perjuangan untuk membangun tatanan yang adil, bersih, dan penuh keberkahan.

Dalam perspektif sufistik, kejujuran bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada Tuhan. *Sidq* adalah salah satu *maqām* (tingkatan spiritual) dalam perjalanan menuju Allah. Ketika seseorang berdagang dengan jujur, ia tidak hanya berdagang dengan manusia, tetapi juga sedang “berdagang dengan Allah” mengharap rida-Nya, bukan sekadar keuntungan duniawi.

Dengan demikian, kejujuran dalam transaksi adalah ruh dari ekonomi barokah. Ia memuliakan pelaku usaha bukan karena hartanya, tetapi karena integritasnya. Ia menghidupkan pasar bukan dengan kegaduhan iklan, tetapi dengan ketulusan niat. Dan dari



pasar yang jujur inilah akan lahir masyarakat yang adil, ekonomi yang menyejahterakan, serta peradaban yang penuh rahmat.

3. Bersih dari Riba dan Penipuan

Ekonomi barokah tidak tumbuh dari tanah yang tercemar oleh kezhaliman. Ia menolak praktik ekonomi yang merusak keadilan dan keseimbangan, seperti riba, gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), dan penipuan. Sebab dalam pandangan Islam, keberkahan tidak sekadar hadir dari banyaknya harta, tetapi dari bersihnya sumber dan proses perolehannya.

Allah SWT berfirman: “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini menggambarkan betapa riba bukan hanya merusak struktur ekonomi, tetapi juga mencederai kemanusiaan dan akal sehat. Ia mengubah relasi sosial menjadi relasi dominasi, di mana yang kuat terus menindas yang lemah atas nama kalkulasi keuntungan. Riba menjadikan uang sebagai alat pemerasan, bukan pemberdayaan. Di sisi lain, penipuan dan ketidakjelasan (gharar) adalah bentuk pembajakan terhadap hak dan kepercayaan orang lain.

Dalam kerangka etika ekonomi Islam, praktik seperti riba dan penipuan bukan hanya pelanggaran syariah, tetapi juga penghancur tatanan moral masyarakat. Harta yang diperoleh melalui cara-cara haram laksana air kotor yang tampak menyegarkan, tetapi pada hakikatnya membawa penyakit. Ia mungkin tampak menguntungkan dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang merusak jiwa, hubungan sosial, dan bahkan tatanan negara.

Keberkahan sebagai *cahaya ilahiyah* tidak mungkin tinggal dalam harta yang tercemar oleh kezaliman struktural. Barokah adalah kehadiran rahmat Tuhan dalam rezeki yang bersih, adil, dan membawa maslahat. Sebaliknya, harta haram adalah hijab yang menutup pintu-pintu kasih sayang Ilahi, meski secara nominal ia terlihat besar.



Ekonomi barokah, karenanya, bukan hanya soal halal nominal, tetapi juga halal struktural dan spiritual. Ia mengharuskan pembersihan jalur rezeki dari praktik predatorik, eksploitatif, dan manipulatif. Dalam konteks modern, ini berarti membangun sistem keuangan dan bisnis yang transparan, etis, dan memihak pada keadilan sosial termasuk di dalamnya sistem perbankan syariah, fintech halal, dan ekosistem digital yang jujur serta bebas dari spekulasi dan eksploitasi.

Dengan menjauh dari riba dan segala bentuk penipuan, manusia tidak hanya mensucikan hartanya, tetapi juga membuka jalan bagi turunnya keberkahan yang melimpah: kedamaian batin, hubungan sosial yang sehat, dan keberlangsungan hidup yang lebih adil dan bermartabat.

4. Mengalirnya Manfaat Sosial

Salah satu tanda sejati dari keberkahan adalah ketika rezeki tidak mandek pada satu tangan, melainkan mengalir laksana sungai yang memberi kehidupan bagi sekitarnya. Dalam ekonomi yang diberkahi, kepemilikan tidak dipandang sebagai absolut, melainkan sebagai amanah yang terikat dengan tanggung jawab sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: *"Dan pada harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."* (QS. Adz-Dzariyat [51]: 19)

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam setiap keberlimpahan terdapat hak-hak tersembunyi yang melekat: milik kaum miskin, anak yatim, dan mereka yang terlupakan oleh sistem. Islam menolak model ekonomi yang membuat rezeki hanya berputar di antara segelintir elit (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Sebaliknya, Islam mendorong pemerataan dan keberlimpahan yang produktif.

Dalam kerangka ekonomi barokah, rezeki yang hanya dinikmati secara individual belum tentu berkah, sebab barokah bukan sekadar soal jumlah, melainkan sejauh mana harta itu menjadi *rahmat* bagi orang lain. Inilah mengapa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf bukan hanya anjuran, tetapi struktur moral yang wajib dalam ekonomi



Islam. Semua itu adalah jalan-jalan agar harta tidak menjadi berhala, tetapi jembatan menuju solidaritas dan keadilan sosial.

Ekonomi yang diberkahi adalah ekonomi yang inklusif yang memuliakan yang lemah, menguatkan yang tertindas, dan memberdayakan komunitas rentan. Barokah bukan tentang menimbun, tetapi tentang mengalirkan nilai dan manfaat, agar keberkahan tak menjadi milik satu orang, melainkan dirasakan secara kolektif. Dalam logika ini, seorang petani yang menyisihkan hasil panennya untuk tetangga yang lapar mungkin lebih diberkahi daripada korporasi besar yang meraih laba tanpa berbagi.

Di era kapitalisme individualistik yang seringkali mengasingkan manusia dari manusia lainnya, semangat *mengalirkan manfaat* adalah bentuk perlawanan sunyi namun revolusioner. Ia mengembalikan makna ekonomi sebagai ruang kasih sayang, bukan sekadar persaingan; sebagai ruang penyembuhan, bukan perebutan; sebagai amanah, bukan monopoli.

Dengan demikian, ekonomi barokah bukan hanya membentuk manusia yang bersyukur, tetapi juga masyarakat yang *rahmatan lil 'alamin* tempat di mana kebaikan tak berhenti di tangan, tapi terus bergerak sebagai aliran berkah yang menyuburkan kehidupan bersama.

5. Keharmonisan dalam Relasi

Keberkahan dalam Islam tidak semata-mata diukur dari akumulasi materi, melainkan dari hadirnya ketenangan, keterhubungan, dan rasa cukup yang menentramkan jiwa. Barokah bukan sekadar tambahan nikmat, melainkan *hadirat Ilahi* yang meresapi relasi antar manusia dalam rumah tangga, komunitas, hingga tatanan sosial yang lebih luas.

Dalam rumah tangga yang diberkahi, rezeki yang sedikit pun dapat menumbuhkan cinta yang besar. Bukan besar karena jumlahnya, tetapi dalam cara ia diterima dengan syukur, dibelanjakan dengan hikmah, dan dibagikan dengan kasih sayang. Dalam hadis



disebutkan bahwa rumah yang dipenuhi dzikir dan syukur akan diliputi oleh sakinah dan dijauhi oleh setan, sementara rumah yang penuh keluhan dan hawa nafsu kehilangan ketenangan batinnya.

“Sesungguhnya Allah menjadikan cinta dan kasih sayang sebagai tanda kekuasaan-Nya di antara kalian.” (Lihat QS. Ar-Rum [30]: 21)

Dalam masyarakat yang barokah, relasi antar manusia tidak ditentukan oleh hierarki kekuasaan atau keunggulan materi, tetapi oleh kekuatan akhlak, keadilan, dan solidaritas. Keberkahan hadir dalam bentuk keteraturan sosial yang adil, di mana yang kuat melindungi yang lemah, dan yang lemah tidak merasa ditinggalkan. Masyarakat seperti ini bukan hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga sehat secara spiritual.

Barokah menghapus logika dominasi dan menggantinya dengan logika *rahmah* kasih yang saling menopang. Ia mendorong lahirnya budaya saling percaya (*tsiqah*), gotong royong (*ta’awun*), dan keterhubungan hati yang mendalam. Dalam pandangan para sufi, keberkahan adalah ketika hati-hati saling menemukan resonansi dalam kejujuran, keikhlasan, dan saling doa.

Lebih jauh lagi, relasi yang harmonis menjadi pondasi peradaban. Sebab masyarakat yang penuh konflik dan kecemburuan sosial, betapapun tingginya indeks ekonominya, akan rapuh dari dalam. Sebaliknya, masyarakat yang dibangun di atas ukhuwah, keadilan, dan empati, akan tetap kokoh meski sumber dayanya terbatas.

Dengan demikian, *ekonomi barokah* tidak berhenti pada kesejahteraan individual, tetapi meluas menjadi ekosistem hubungan yang damai, membangun rasa *rumah* bagi setiap jiwa. Dalam relasi yang demikian, keberkahan bukan hanya terasa, tetapi juga tercermin dalam wajah yang teduh, dalam rumah yang tenteram, dan dalam masyarakat yang hidup berdampingan dalam rahmat.

6. Berorientasi pada Tujuan Sosial, Bukan Sekadar Pertumbuhan Angka



Di tengah hegemoni paradigma ekonomi global yang menuhankan angka dari pertumbuhan PDB, volume ekspor, hingga indeks konsumsi ekonomi Islam hadir membawa koreksi mendasar: bahwa pertumbuhan tanpa keadilan adalah ilusi, dan kemakmuran tanpa keberkahan adalah kesia-siaan. Dalam pandangan Islam, ekonomi bukan semata kalkulasi kuantitatif, tetapi jalan etis menuju kesejahteraan lahir dan batin.

Sebagaimana ditegaskan oleh ekonom Muslim terkemuka, M. Umer Chapra, sistem ekonomi Islam bukan bertujuan mengejar akumulasi kekayaan semata, melainkan menciptakan tatanan sosial yang adil dan manusiawi. Ia menulis: *“The Islamic economic system aims not merely at growth, but at a just and humane distribution of income, wealth and opportunities, which alone can ensure social harmony and moral development.”* (Chapra 2000, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*)

Dengan kata lain, tujuan utama dari ekonomi yang barokah adalah tercapainya *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam dimensi sosial-ekonomi: perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), distribusi yang adil, peluang yang setara, dan pemberdayaan kelompok marginal. Pertumbuhan tetap penting, tetapi ia bukan tujuan akhir melainkan sarana menuju kemaslahatan kolektif dan keseimbangan spiritual.

Dalam konteks kontemporer yang ditandai oleh krisis kemanusiaan dari kemiskinan ekstrem, ketimpangan pendapatan, hingga kerusakan lingkungan ekonomi barokah tampil bukan sebagai romantisme utopis, tetapi sebagai visi alternatif yang radikal dan relevan. Ia menantang struktur ekonomi modern yang serba kompetitif, eksploitatif, dan impersonal, dengan menawarkan prinsip-prinsip *rahmah*, *tawazun*, dan *maslahah*.

Barokah, dalam hal ini, bukan sekadar terminologi teologis, tetapi etika ilahiyah yang membimbing orientasi ekonomi menuju dimensi transendental: dari konsumsi menuju kontemplasi, dari kepemilikan menuju kepedulian, dari akumulasi menuju amal. Harta



bukan lagi instrumen dominasi, tetapi sarana ibadah, solidaritas, dan pembebasan.

Dengan paradigma ini, ekonomi menjadi *jalan amal* yang menghantarkan manusia kepada ridha Tuhan, dan dunia menjadi ladang yang subur bagi kemanusiaan yang saling menyejahterakan. Maka di tengah kegelisahan global yang kehilangan arah, *ekonomi barokah* adalah seruan untuk kembali menimbang nilai, menata ulang prioritas, dan membangun dunia dengan nurani, bukan sekadar dengan neraca.

D. BAROKAH DALAM KEHIDUPAN NABI DAN SAHABAT

Konsep *barokah* dalam Islam bukan sekadar doktrin normatif, melainkan realitas historis yang nyata dalam kehidupan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Barokah menjadi prinsip hidup yang membentuk orientasi ekonomi mereka: sederhana namun penuh makna; sedikit secara materi, namun melimpah dalam manfaat. Hidup mereka mencerminkan bahwa keberkahan bukan pada jumlah, tetapi pada *nilai, arah, dan tujuan* dari rezeki itu sendiri.

Nabi Muhammad ﷺ: Hidup dalam Kekurangan, Kaya dalam Manfaat. Rasulullah ﷺ adalah teladan utama ekonomi yang diberkahi. Beliau menjalani hidup dalam kesederhanaan radikal tidak menimbun harta, tidak menumpuk makanan, dan tidak pernah memalingkan hidupnya dari yang lemah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa api tidak dinyalakan di rumah beliau selama sehari-hari karena tidak ada makanan untuk dimasak, namun rumah itu penuh dengan keberkahan, kasih sayang, dan ketenteraman (HR. Bukhari).

Dalam urusan perdagangan, sebelum menjadi nabi pun beliau dijuluki al-Amīn yang terpercaya karena selalu berlaku jujur, adil, dan tidak curang dalam transaksi. Beliau tidak mengejar akumulasi, tetapi menjadikan perdagangan sebagai sarana penghidupan yang halal dan jalan pelayanan. Ketika memperoleh kekayaan dari ghanimah atau



hadiah, beliau segera menyalurkannya kepada kaum miskin, para muallaf, dan yang membutuhkan.

Sikap ini memperlihatkan bahwa barokah bukanlah tentang “memiliki lebih banyak,” tetapi tentang *menjadi saluran manfaat yang tak terputus*. Harta yang diberkahi adalah harta yang terus mengalir, menyuburkan, dan menyembuhkan, bukan yang membeku dalam tumpukan.

Para Sahabat: Kekayaan sebagai Amanah, Bukan Status. Para sahabat Nabi ﷺ adalah cermin dari keberkahan dalam praktik sosial dan ekonomi. Mereka tidak terjebak dalam glorifikasi kekayaan, melainkan menggunakannya sebagai sarana pengabdian dan pembebasan.

- Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang berasal dari kalangan hartawan Quraisy, menggunakan hampir seluruh hartanya untuk membebaskan budak yang tertindas, termasuk Bilal bin Rabah. Baginya, kekayaan bukan prestise, melainkan *alat untuk menyelamatkan martabat manusia*.
- Umar bin Khattab, sebagai khalifah, hidup dalam asketisme yang mengejutkan. Ia menolak gaji besar sebagai kepala negara dan hidup setara dengan rakyat biasa. Ketika hasil panen melimpah, ia justru memperketat distribusi dan mengawasi agar tidak terjadi penimbunan atau ketimpangan. Prinsipnya sederhana: *kekuasaan adalah amanah, dan harta rakyat bukan hak pribadi*.

Utsman bin Affan, seorang saudagar sukses, membuktikan bahwa kekayaan besar bisa menjadi sumber barokah jika digunakan dengan benar. Dalam Perang Tabuk, ia menyumbangkan 950 ekor unta, 50 kuda, dan 1.000 dinar emas. Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidak akan membahayakan Utsman apa yang ia lakukan setelah hari ini*” (HR. Tirmidzi), karena kekayaannya menjadi *sarana perjuangan*, bukan penjara ambisi.

Etika Sahabat: Harta yang Menyucikan, Bukan Mengotori. Para sahabat memperlakukan harta dengan prinsip *tazkiyah* penyucian. Mereka sadar bahwa kekayaan dapat menjadi ujian, dan karenanya



harus terus disucikan melalui zakat, infak, dan kedermawanan. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa: *“Kekayaan bukanlah sesuatu yang harus dipuja, tetapi ditundukkan untuk kebaikan.”*

Di tengah budaya kapitalisme modern yang menjadikan kekayaan sebagai lambang keberhasilan, para sahabat justru menunjukkan bahwa *barokah adalah keberhasilan yang bernilai akhirat*. Mereka tidak membiarkan kekayaan menguasai hati, karena tauhid mengharuskan hanya Allah yang berhak dituhankan bukan dinar dan dirham.

Ekonomi Barokah: Dari Individual ke Struktural. Dalam hidup Nabi dan sahabat, *barokah tidak hanya menjadi prinsip etika personal, tetapi juga praktik sosial dan kebijakan publik*. Mereka membangun sistem yang menolak penumpukan kekayaan pada segelintir orang, dan mempromosikan pemerataan yang adil. Dalam hal ini, ekonomi barokah adalah *ekonomi spiritual yang mengakar dalam kehidupan sosial* yang memperjuangkan kemaslahatan, menghapus kemiskinan, dan menciptakan keadilan yang merata.

Penutup: Warisan Hidup yang Menyuburkan. Kehidupan Nabi dan para sahabat memberi kita pelajaran abadi: bahwa harta yang berkah adalah harta yang menumbuhkan cinta, memperluas solidaritas, dan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Ekonomi barokah bukan nostalgia spiritual, melainkan tawaran etis dan paradigmatis di tengah krisis ekonomi global yang kehilangan jiwa. Dari rumah Nabi yang nyaris kosong, tetapi penuh cinta dan pengorbanan, kita belajar: *barokah adalah kekayaan sejati yang tak bisa dihitung, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang lapang dan tangan yang terbuka.*

Barokah adalah dimensi spiritual dalam ekonomi yang menyatukan keberkahan langit dan maslahat bumi. Ia bukan hanya soal *berapa banyak*, tetapi *untuk apa dan bagaimana*. Ketika ekonomi berjalan di atas prinsip kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial, barokah akan mengalir, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam ketenangan batin dan harmoni sosial. Ekonomi barokah adalah ekonomi yang tidak hanya menyejahterakan, tetapi juga menyucikan.





BAB 3

EKONOMI RUMAH TANGGA YANG BAROKAH

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial, namun justru memegang peran paling strategis dalam membentuk arah peradaban dan bangunan ekonomi bangsa. Dalam pandangan Islam, rumah tangga tidak hanya dilihat sebagai tempat berlindung secara fisik dari panas dan hujan, tetapi juga sebagai *mikrokosmos* dari tatanan ilahiyah sebuah ruang spiritual tempat nilai-nilai tauhid, tanggung jawab, dan keberkahan ditanamkan dan dijalankan secara nyata.

Konsep *ekonomi barokah* tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rumah tangga, karena disinilah nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, kesederhanaan, saling menanggung beban, dan penghormatan terhadap rezeki ditumbuhkan sejak dini. Rumah yang dijiwai tauhid akan menjadikan setiap aktivitas ekonomi, sekecil apa pun, sebagai bagian dari ibadah: membeli dengan niat baik, berbagi makanan dengan tetangga, menghindari utang konsumtif, hingga mendidik anak mencintai kerja halal.

Dalam kerangka ini, suami dan istri bukan hanya rekan biologis atau administratif, melainkan mitra spiritual dalam mengelola amanah rezeki. Mereka bersama-sama menjaga keseimbangan antara *kasab* (ikhtiar), *tawakal* (ketergantungan kepada Allah), dan *qana'ah*



(rasa cukup). Setiap nafkah bukan semata transaksi ekonomi, tetapi juga *sedekah*, sebagaimana sabda Nabi:

“Apa yang engkau nafkahkan kepada keluargamu adalah sedekah.” (*HR. Bukhari dan Muslim*)

Keadilan sosial bermula dari rumah. Ketika dalam rumah tangga terjadi ketimpangan, misalnya dalam pengambilan keputusan ekonomi, pembebanan kerja domestik, atau alokasi kebutuhan anak dan istri, maka benih ketidakadilan struktural mulai tumbuh. Islam memandang bahwa relasi dalam keluarga harus dibangun atas prinsip musyawarah, saling menghormati, dan saling mendukung dalam kebaikan.

Ekonomi rumah tangga yang barokah menuntut distribusi peran yang adil bukan didasarkan pada superioritas gender, tetapi pada prinsip kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan kolaborasi. Dalam Al-Qur'an disebutkan: “*Para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*” (QS. Al-Baqarah: 228)

Keadilan di dalam rumah akan membentuk karakter warga negara yang adil di luar rumah. Maka, membangun rumah tangga yang barokah bukan urusan domestik semata, tetapi proyek sosial peradaban.

Keluarga yang barokah tidak diukur dari besarnya pendapatan atau luasnya rumah, tetapi dari kedamaian batin, kebersamaan yang tulus, dan gaya hidup yang tidak berlebih-lebihan. Islam sangat menekankan prinsip *wasathiyah* (keseimbangan) dan melarang israf (pemborosan), sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an: “*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*” (QS. Al-Furqan: 67)

Dalam konteks modern, keluarga yang barokah tidak akan mudah tergoda oleh konsumerisme, tidak terjebak dalam kompetisi sosial yang semu, dan tidak menjadikan utang sebagai gaya hidup.



Mereka mengedepankan kebutuhan daripada keinginan, dan memprioritaskan kebersamaan daripada kemewahan.

Rumah tangga adalah sekolah pertama bagi anak-anak dalam memahami nilai uang, tanggung jawab finansial, dan makna berbagi. Ketika anak-anak diajak untuk menghargai makanan, menabung dari sisa uang jajan, dan menyisihkan sebagian rezekinya untuk yang membutuhkan, mereka sedang dibentuk menjadi insan ekonomi yang berkarakter dan bertauhid.

Dengan demikian, rumah tangga menjadi ruang awal pembentukan *etika ekonomi profetik*: menghindari harta haram, menghormati kerja keras, dan menanamkan bahwa keberkahan jauh lebih penting daripada keberlimpahan. Pendidikan semacam ini menjadi tembok pertama dalam menghadapi godaan sistem ekonomi global yang penuh ilusi kekayaan dan individualisme.

Dalam dunia yang menjadikan rumah sebagai tempat konsumsi berlebih dan simbol status sosial, konsep rumah tangga barokah hadir sebagai bentuk *resistensi kultural*. Ia tidak hanya menentang gaya hidup boros dan individualis, tetapi juga meneguhkan kembali rumah sebagai *baitullah kecil* rumah yang menjadi ruang dzikir, kerja, cinta, dan solidaritas.

Membangun ekonomi rumah tangga yang barokah berarti menciptakan dasar spiritual yang kokoh bagi bangsa. Sebab dari rumah yang penuh berkah, akan lahir masyarakat yang kuat, adil, dan beradab.

A. PRINSIP BAROKAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA

Dalam pandangan Islam, keuangan keluarga tidak semata-mata diukur dari efisiensi pengeluaran atau peningkatan pendapatan, melainkan dari sejauh mana keberkahan hadir dalam setiap proses pencarian, pengelolaan, dan distribusi harta. Barokah dalam ekonomi rumah tangga bukanlah soal banyak atau sedikitnya kekayaan, tetapi



tentang nilai ilahiyah yang menghidupkan harta, menjadikannya mencukupi, menenangkan, dan bermanfaat bagi sesama.

Beberapa prinsip utama yang menumbuhkan barokah dalam keuangan keluarga antara lain:

Niat ibadah dalam mencari nafkah. Mencari rezeki dalam Islam adalah bagian dari pengabdian kepada Tuhan, bukan semata aktivitas duniawi. Allah SWT berfirman: “*Dialah yang menjadikan bumi mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezeki-Nya.*” (QS. Al-Mulk [67]: 15).

Dengan niat yang lurus, kerja menjadi ladang pahala, dan nafkah yang dibawa pulang menjadi bagian dari keberkahan hidup.

Transparansi dan musyawarah antara suami-istri dalam pengelolaan harta. Keterbukaan dan komunikasi finansial merupakan landasan keadilan dalam rumah tangga. Musyawarah (syūrā) dalam pengelolaan keuangan menciptakan rasa saling percaya, menghindari konflik, dan memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga.

Menjauhi praktik keuangan yang haram dan berlebihan. Islam dengan tegas melarang riba, gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), serta isrāf (konsumsi berlebih). Allah berfirman: “*Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*” (QS. Al-A’raf [7]: 31).

Pengendalian konsumsi bukan berarti hidup dalam kekurangan, tetapi membangun etika konsumsi yang sadar, adil, dan ramah terhadap sesama serta lingkungan.

Menyisihkan harta untuk sedekah, zakat, dan kepentingan sosial. Pembersihan harta melalui zakat dan sedekah tidak hanya berdampak spiritual, tetapi juga sosial. Allah SWT memerintahkan: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...*” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Praktik ini memperluas manfaat harta, menggerakkan solidaritas sosial, dan menumbuhkan spiritualitas kolektif dalam keluarga.



Menurut Abdurrahman al-Maliki (2000), keluarga Muslim seharusnya memandang harta bukan sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pandangan ini, pengelolaan keuangan keluarga diarahkan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan hidup bersama. Ekonomi rumah tangga yang diberkahi bukanlah ekonomi yang berorientasi pada akumulasi, melainkan pada kemanfaatan dan tanggung jawab.

B. PERAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI BERKAH

Dalam Islam, perempuan bukan sekadar pelengkap dalam struktur rumah tangga, melainkan aktor utama dalam mewujudkan ekonomi yang berlandaskan keberkahan. Ia berperan sebagai pengelola nilai, penjaga etika konsumsi, serta motor penggerak ekonomi rumah tangga yang tidak hanya efisien, tetapi juga bermakna secara spiritual dan sosial.

Tradisi Islam mengenal sosok agung seperti Khadijah binti Khuwailid, seorang perempuan Quraisy yang sukses sebagai pebisnis dan dermawan, sekaligus istri pertama Nabi Muhammad ﷺ. Ia mengelola kekayaannya dengan ketajaman visi, tetapi juga dengan ketundukan spiritual. Keberhasilan ekonominya tidak menjadikannya hamba dunia, melainkan pelayan nilai-nilai ketauhidan. Hartanya digunakan untuk membela dakwah, membantu fakir miskin, dan menopang kehidupan Rasulullah ﷺ di masa-masa sulit. Khadijah membuktikan bahwa kemandirian ekonomi perempuan bukanlah ancaman terhadap spiritualitas, melainkan wujud konkret dari integritas iman (Lemu 2007).

Dalam konteks kontemporer, perempuan Muslim menghadapi tantangan ganda: di satu sisi menata peran dalam dunia kerja dan wirausaha; di sisi lain menjaga prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi. Islam memberi ruang luas bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam ekonomi, selama dilakukan dengan adab, akhlak, dan kesadaran akan nilai-nilai keberkahan.



Perempuan Muslim memiliki peran strategis dalam mewujudkan ekonomi yang diberkahi, tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga nilai dan etika yang mendasari aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ekonomi barokah, peran perempuan dibingkai oleh prinsip-prinsip berikut:

Menjauhi Transaksi Haram. Perempuan Muslim diingatkan untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik ekonomi yang dilarang syariah, seperti riba yang merusak keadilan finansial, gharar (ketidakjelasan) yang menimbulkan ketidakpastian, maupun bisnis yang merusak moral dan lingkungan hidup. Kewaspadaan ini menegaskan bahwa keberkahan ekonomi hanya mungkin hadir jika sumber dan proses perolehan harta juga suci dan bertanggung jawab.

Menjaga Adab Muamalah. Etika dalam bertransaksi bukan sekadar formalitas, melainkan manifestasi spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan dan sesama. Perempuan dituntut menjaga adab dalam muamalah mulai dari cara berpakaian yang sopan sesuai syariat, komunikasi yang jujur dan penuh penghormatan, hingga kesungguhan menjaga kepercayaan dalam setiap transaksi. Adab ini menjadi fondasi integritas dan keharmonisan sosial.

Mengutamakan Keberkahan di Atas Keuntungan Semata. Dalam ekonomi barokah, usaha bukan hanya sarana mencari laba, melainkan jalan ibadah yang mengandung niat tulus mendekatkan diri kepada Allah. Perempuan diajak menegakkan prinsip ini dengan menempatkan keberkahan sebagai prioritas utama mengutamakan manfaat sosial dan spiritual daripada hanya mengakumulasi kekayaan duniawi.

Berdaya Tanpa Kehilangan Makna. Perempuan Muslim dimandatkan untuk berkontribusi produktif dalam ekonomi tanpa mengabaikan peran sosial dan nilai-nilai ilahiyah. Keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan komitmen terhadap keluarga, masyarakat, serta tanggung jawab spiritual menjadi modal utama



dalam membangun ekonomi yang berwawasan holistik dan berkelanjutan.

Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut, perempuan Muslim menjadi agen transformasi yang mampu menghidupkan ekonomi barokah dari akar budaya hingga sistem sosial yang lebih luas menyatukan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi dalam harmoni yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Dengan peran strategis ini, perempuan tidak hanya menjadi pengelola rumah tangga, tetapi juga penjaga ekosistem nilai dalam ekonomi keluarga dan masyarakat. Ia menanamkan kesadaran spiritual dalam pengelolaan harta, menumbuhkan generasi yang mencintai keadilan, serta menjadi pelaku perubahan dalam ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadaban.

Sebagaimana diungkapkan oleh Fatima Mernissi, kekuatan perempuan Muslim bukan terletak pada keterkungkungan domestik, tetapi pada kemampuannya menanamkan nilai dalam ruang yang ia kelola (Mernissi 1991). Dalam kerangka ekonomi berkah, peran perempuan bukan pelengkap, melainkan pusat dari transformasi spiritual dan sosial dalam keluarga dan umat.

C. KELUARGA SAKINAH SEBAGAI BASIS EKONOMI MORAL

Dalam arsitektur sosial Islam, keluarga sakinah yakni rumah tangga yang diliputi ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) merupakan fondasi utama dalam membentuk sistem ekonomi yang adil, etis, dan penuh keberkahan. Rumah bukan sekadar tempat berlindung fisik, melainkan ruang awal tempat nilai-nilai moral dan spiritual ditanamkan, diuji, dan dijalankan dalam keseharian. Di sinilah ekonomi pertama kali lahir: bukan dari pasar, melainkan dari meja makan, pembagian peran, dan musyawarah keluarga.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an menyatakan: *"Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka."* (QS. Al-Baqarah [2]: 187)



Makna mendalam dari ayat ini tidak hanya merujuk pada keintiman fisik, tetapi juga keterikatan batin yang saling melindungi, menutupi aib, dan mendukung satu sama lain termasuk dalam aspek pengelolaan rezeki dan pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta karena Allah, keputusan-keputusan ekonomi tidak dilandasi ambisi egoistik atau dominasi satu pihak, tetapi muncul dari musyawarah yang mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan keberlanjutan hidup keluarga.

Rumah tangga yang harmonis memiliki kecenderungan untuk lebih hemat, produktif, dan dermawan. Keputusan-keputusan ekonomi dijalankan secara kolaboratif, bukan kompetitif; dijiwai oleh semangat ibadah, bukan didorong oleh nafsu konsumtif. Dalam struktur ini, setiap anggota keluarga memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga keberkahan rezeki dan keadilan dalam distribusinya.

Fazlur Rahman (1982) menegaskan bahwa dalam Islam, keluarga adalah lembaga pertama tempat nilai-nilai sosial dan tanggung jawab moral ditanamkan sebelum individu terjun ke ruang publik. Nilai keadilan, empati, kejujuran, dan kesederhanaan yang dibiasakan dalam keluarga akan menjadi bekal penting bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas ekonomi di luar rumah. Dalam perspektif ini, keluarga tidak hanya menjadi tempat reproduksi biologis, tetapi juga ruang reproduksi nilai dan etika sosial.

Dengan menjadikan keluarga sakinah sebagai basis ekonomi, Islam menghadirkan satu paradigma baru: bahwa ekonomi tidak harus berangkat dari pertarungan kepentingan, melainkan bisa tumbuh dari cinta, tanggung jawab, dan kepercayaan. Di sinilah letak *ekonomi moral* yang sesungguhnya sebuah sistem yang tidak hanya mengejar angka, tetapi mengakar pada relasi insani dan ilahi yang sehat.



D. PENDIDIKAN KEUANGAN ANAK YANG BERLANDASKAN TAUHID

Dalam Islam, warisan paling berharga yang ditinggalkan orang tua kepada anak bukanlah harta, tetapi nilai. Barokah dalam ekonomi tidak diturunkan melalui akumulasi kekayaan, melainkan melalui pendidikan tauhid yang menanamkan pemahaman bahwa harta adalah titipan Ilahi yang mengandung tanggung jawab sosial dan spiritual. Pendidikan keuangan berbasis tauhid bukan semata pengajaran hitungan dan manajemen belanja, tetapi penanaman kesadaran bahwa setiap rupiah yang diterima, disimpan, dan dibelanjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Ekonomi spiritual bukanlah domain eksklusif orang dewasa atau ranah teknokratis semata. Ia adalah nilai yang dapat dan semestinya ditanamkan sejak dini, ketika benih kepribadian anak sedang tumbuh dan terbuka pada nilai-nilai transendental. Dalam konteks ini, keluarga dan pendidikan menjadi ladang utama untuk menumbuhkan kesadaran bahwa uang dan harta bukan sekadar alat konsumsi, tetapi amanah yang sarat makna etik dan spiritual.

Pertama, anak-anak perlu diperkenalkan pada pemahaman bahwa harta adalah amanah, bukan kepemilikan mutlak. Kesadaran ini membentuk karakter yang berhati-hati dan bertanggung jawab dalam membelanjakan apa yang dimiliki. Ia akan tumbuh dengan nilai kehati-hatian, tidak serakah, dan menyadari adanya dimensi moral dalam setiap penggunaan sumber daya.

Kedua, nilai kejujuran dalam memperoleh dan membelanjakan uang menjadi pilar utama integritas ekonomi. Dalam dunia yang sering kali menggoda dengan jalan pintas dan tipu daya, kejujuran adalah fondasi keberkahan. Anak yang tumbuh dengan kesadaran ini akan memandang rezeki bukan hanya sebagai hasil usaha, tetapi juga sebagai cermin dari akhlak yang dibawanya dalam proses mendapatkan dan menggunakan harta.

Ketiga, anak diajak memahami bahwa dalam Islam, memberi lebih utama daripada menumpuk. Prinsip ini menanamkan semangat



ta'āwun (saling menolong) dan *ithār* (mendahulukan orang lain), menjadikan anak tidak hanya peduli pada diri sendiri, tetapi juga pada nasib sesama. Ini adalah dasar dari ekonomi inklusif yang berorientasi pada manfaat sosial.

Keempat, anak-anak perlu dibimbing untuk menjauhi gaya hidup konsumtif dan boros, serta mencintai hidup sederhana (*zuhud*) dan penuh rasa cukup (*qana'ah*). Dalam budaya yang memuja kepemilikan dan citra, pendidikan spiritual ekonomi justru mengajak anak mencintai kesederhanaan, mengutamakan makna di atas merek, dan memaknai cukup sebagai bentuk kebebasan dari kerakusan.

Dengan menanamkan prinsip-prinsip tersebut, anak-anak dipersiapkan menjadi insan yang tidak hanya cakap dalam mengelola uang, tetapi juga mampu menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dalam urusan ekonomi. Mereka tumbuh sebagai generasi yang menjadikan harta bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mengabdikan, berbagi, dan menciptakan keberkahan bagi semesta.

Prinsip-prinsip ini selaras dengan doa Nabi Ibrahim a.s. yang bukan meminta kemakmuran duniawi bagi keturunannya, tetapi kelanggengan nilai-nilai ibadah dan kedekatan dengan Allah:

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat...” (QS. Ibrahim [14]: 40)

Pendidikan semacam ini bisa dimulai dari hal-hal kecil yang bersifat praksis dan komunikatif. Misalnya, mengajak anak berdiskusi saat belanja di pasar sambil menjelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Atau melibatkan anak dalam aktivitas sedekah, zakat, dan infaq, agar mereka merasakan langsung makna memberi dan nilai spiritual di baliknya. Anak juga dapat diberikan uang saku dengan arahan bagaimana membaginya antara konsumsi, tabungan, dan donasi sosial.

Ridwan Elahi (2020) menyatakan bahwa pendidikan ekonomi Islam yang dimulai sejak usia dini akan melahirkan generasi yang memiliki kesadaran finansial berbasis etika, berjiwa mandiri, dan



tidak terjat materialisme. Hal ini penting di tengah budaya global yang membentuk anak menjadi subjek pasif dari arus konsumerisme dan citra sosial.

Pendidikan keuangan anak yang berlandaskan tauhid sejatinya adalah proyek jangka panjang dalam membangun *ekonomi rahmatan lil 'alamin* dari akar terdalam: kesadaran anak manusia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi tidak ditentukan oleh jumlah uang yang diwariskan, tetapi oleh kualitas nilai yang ditanamkan.

Rumah tangga yang barokah tidak lahir dari kelimpahan materi, melainkan dari kesadaran kolektif untuk menundukkan harta kepada nilai-nilai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Di dalam keluarga yang demikian, kekayaan tidak menjadi pusat orientasi, melainkan alat untuk memperkuat cinta, memperluas manfaat, dan menumbuhkan kesalehan sosial.

Ketika suami, istri, dan anak-anak menjalin relasi ekonomi berdasarkan amanah, kasih sayang, dan keikhlasan untuk berbagi, rumah berubah menjadi ruang spiritual yang memancarkan keberkahan bukan hanya bagi penghuninya, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat. Setiap pengeluaran menjadi bagian dari ibadah; setiap pemasukan dipahami sebagai titipan; dan setiap keputusan keuangan dilandasi oleh pertimbangan maslahat, bukan semata keuntungan.

Dalam sistem seperti ini, ekonomi tidak lagi menjadi beban psikologis atau sumber konflik, melainkan ladang pahala dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Di sinilah barokah menemukan wujudnya yang paling nyata yakni ketika uang, waktu, dan tenaga digunakan bukan untuk memperbesar ego, melainkan untuk merawat cinta, kejujuran, dan solidaritas. Rumah tangga semacam ini bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga sekolah nilai dan madrasah akhlak yang menyiapkan generasi yang lebih adil, sederhana, dan berintegritas.





BAB 4

BAROKAH DALAM DUNIA USAHA DAN KERJA

Di tengah dunia kerja yang kian kompetitif dan lanskap bisnis yang didominasi oleh logika keuntungan semata, gagasan tentang barokah hadir sebagai oase spiritual yang menyeimbangkan antara materialitas dan makna, antara profit dan kebermanfaatan, antara efisiensi dan etika. Dalam paradigma Islam, usaha dan pekerjaan tidak dipandang sekadar sebagai alat akumulasi ekonomi, tetapi sebagai ibadah muamalah jembatan menuju pengabdian kepada Allah dan bentuk konkret pelayanan terhadap sesama manusia.

Pekerjaan yang diberkahi bukan hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menumbuhkan kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kedamaian batin. Ketika barokah menjadi orientasi, keberhasilan tidak lagi dinilai dari besarnya laba, melainkan dari sejauh mana kerja itu mendatangkan maslahat, menjaga martabat, dan menumbuhkan keadilan.

Di sinilah Islam membalik logika pasar yang eksploitatif menjadi etos kerja yang transenden: bekerja bukan sekadar untuk hidup, tetapi untuk memberi hidup yang lebih baik bagi orang lain. Dalam konteks ini, barokah bukan konsep utopis, melainkan prinsip praksis



yang menghidupkan relasi antara spiritualitas dan produktivitas, antara nilai-nilai ilahiah dan realitas dunia kerja.

A. BISNIS SEBAGAI JALAN IBADAH DAN PELAYANAN SOSIAL

Dalam pandangan Islam, bisnis bukan sekadar aktivitas ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan, melainkan ladang ibadah dan ruang aktualisasi nilai-nilai tauhid, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nabi Muhammad ﷺ tidak hanya membawa wahyu di padang pasir, tetapi juga membawa etika spiritual ke dalam pasar. Sebelum menjadi rasul, beliau dikenal sebagai *al-Amīn* orang yang terpercaya dalam dunia perdagangan. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak terpisah dari profesionalitas; bahkan bisnis bisa menjadi *tangga menuju Allah*, jika dijalankan dengan niat dan cara yang benar.

“Sebaik-baik usaha adalah usaha seorang pedagang yang jujur lagi terpercaya.” (HR. Al-Baihaqi)

Keistimewaan bisnis dalam Islam terletak bukan pada potensi labanya, tetapi pada potensi *pengabdian*nya. Bisnis yang barokah adalah bisnis yang mengalirkan manfaat, bukan menumpuk kekayaan; yang melayani, bukan mengeksploitasi. Dalam paradigma ini, pebisnis bukan sekadar pelaku pasar, melainkan *khalifah ekonomi* penjaga keseimbangan antara harta dan hak, antara efisiensi dan etika, antara sumber daya dan tanggung jawab.

Firman Allah: *“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 30)*

Ayat ini tidak hanya berbicara tentang kepemimpinan politik, tetapi juga tentang mandat spiritual manusia di semua sektor kehidupan, termasuk sektor bisnis. Maka, dalam sistem ekonomi barokah, bisnis ditata bukan hanya untuk akumulasi (*accumulation*), tetapi juga untuk distribusi dan keberlanjutan (*sustainability*). Orientasi utamanya bukan *profit maximization*, tetapi *purpose realization* yakni menjadikan bisnis sebagai wahana untuk menciptakan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-‘ammah*).



Dengan demikian, bisnis yang diberkahi bukan yang paling besar omsetnya, tetapi yang paling jujur, adil, dan peduli. Ia hadir sebagai jalan ibadah, bukan hanya transaksi; sebagai pelayanan sosial, bukan sekadar strategi pasar.

B. PRINSIP HALAL, TAYYIB, DAN MASLAHAT

Di tengah dunia usaha yang kerap dikendalikan oleh logika keuntungan jangka pendek dan eksploitasi tanpa batas, Islam menawarkan sebuah etika bisnis yang berakar pada keseimbangan antara legalitas, integritas, dan kebermanfaatan sosial. Prinsip *halal*, *tayyib*, dan *maslahat* bukan sekadar pedoman formal, melainkan fondasi spiritual dan moral yang menjaga agar roda ekonomi tetap berada dalam orbit kebaikan dan keberkahan.

Halal: Legalitas Syariah sebagai Batas Etis

Prinsip halal mencakup seluruh aspek aktivitas ekonomi dari sumber pendapatan, jenis usaha, hingga mekanisme transaksi. Bisnis yang mengandung unsur riba, penipuan (*ghharar*), suap (*risywah*), atau eksploitasi tenaga dan lingkungan dipandang sebagai penghalang datangnya barokah. Dalam QS. *Al-Baqarah*: 275, Allah menegaskan bahwa meskipun riba tampak menguntungkan secara lahiriah, ia sebenarnya mengandung kehancuran sosial dan spiritual.

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Halal menjadi pagar etis yang membedakan bisnis yang sekadar untung dengan bisnis yang pantas didoakan malaikat.

Tayyib: Kualitas Kebaikan yang Menyeluruh

Lebih dari sekadar halal secara hukum, *tayyib* berarti baik secara substansi dan proses. Produk dan jasa yang *tayyib* tidak hanya bersih secara fisik, tapi juga terjaga moralitas produksinya tidak mencemari lingkungan, tidak menzalimi buruh, tidak merusak keseimbangan sosial. Allah berfirman:



“Makanlah dari rezeki yang halal lagi baik (tayyib) yang telah diberikan Allah kepadamu.” (QS. Al-Ma’idah: 88)

Tayyib adalah prinsip ekologis dan spiritual sekaligus: menjaga keberlanjutan ciptaan Tuhan sambil menghindari kerakusan dan kesewenang-wenangan.

Maslahat: Ukuran Kebermanfaatan Sosial

Maslahat adalah orientasi jangka panjang dari bisnis barokah. Suatu usaha dikatakan membawa maslahat jika ia memberi manfaat nyata bagi masyarakat, menguatkan solidaritas sosial, dan tidak merusak fitrah manusia maupun lingkungan. Produk yang merusak tubuh, merusak relasi sosial, atau memperkuat hegemoni budaya konsumtif jelas bertentangan dengan nilai maslahat, meskipun halal secara formal.

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya’ Ulumuddin* menekankan bahwa keberkahan dalam bisnis tidak diukur dari seberapa banyak keuntungan yang diraih, melainkan dari *niat yang ikhlas* dan *manfaat yang mengalir* dari usaha tersebut bagi kehidupan orang lain (Al-Ghazali 2000). Barokah muncul saat bisnis menjadi jalan untuk menyebarkan rahmat, bukan sekadar menumpuk kekayaan.

Dengan tiga prinsip ini *halal* sebagai pagar hukum, *tayyib* sebagai standar kualitas spiritual, dan *maslahat* sebagai tujuan sosial Islam membentuk wajah ekonomi yang tidak hanya efisien, tapi juga manusiawi, berkeadilan, dan penuh rahmat.

C. KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DAN EKONOMI SOLIDARITAS

Dalam pandangan Islam, kewirausahaan bukanlah ajang kompetisi individualistik untuk mengejar keuntungan semata, melainkan medan amal untuk menghadirkan kemaslahatan kolektif. Ia adalah sarana untuk menunaikan tanggung jawab sosial, menegakkan keadilan, dan mengalirkan rezeki secara adil ke seluruh lapisan masyarakat. Spirit ini sangat dekat dengan gagasan



kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*), yaitu model bisnis yang menggabungkan efisiensi pasar dengan empati sosial.

“Tidak sempurna iman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan.” (HR. Thabrani)

Hadis ini tidak hanya menegaskan pentingnya solidaritas sosial dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menantang logika bisnis modern yang kerap mengabaikan keberadaan “tetangga” dalam perhitungan laba. Dalam kerangka ekonomi barokah, bisnis sejatinya adalah ruang perjumpaan antara kompetensi profesional dan kepedulian spiritual.

Ekonomi Solidaritas: Menjembatani Pasar dan Keadilan

Ekonomi solidaritas tumbuh sebagai respons atas kegagalan sistem pasar bebas dalam menciptakan pemerataan. Dalam ekonomi barokah, bentuk-bentuk seperti koperasi syariah, usaha komunitas, dan perdagangan adil (*fair trade*) menjadi alternatif struktural yang mewujudkan prinsip *ta‘awun* (saling menolong) dan *adl* (keadilan distributif). Bukan hanya menciptakan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan nilai sosial yang memperkuat kohesi masyarakat.

Menurut Muhammad Yunus (2007), peraih Nobel Perdamaian, bisnis yang ideal adalah bisnis yang menyelesaikan masalah sosial bukan menciptakan kesenjangan baru. Melalui konsep *social business*, ia membuktikan bahwa orientasi keberkahan dan keadilan bisa dikawinkan dengan inovasi ekonomi yang nyata. Pandangannya sejalan dengan visi Islam bahwa ekonomi harus menjadi instrumen rahmat, bukan alat dominasi.

Muamalah sebagai Pondasi Spiritual Ekonomi Solidaritas

Islam telah sejak awal merumuskan fondasi spiritual dari ekonomi solidaritas melalui konsep *mu‘āmalah* sebuah sistem relasi sosial yang tidak semata-mata transaksional, tetapi dilandasi nilai-nilai moral dan tanggung jawab kolektif. Dalam *mu‘āmalah*, setiap interaksi ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah, bukan sekadar



pertukaran untung-rugi. Ia bertumpu pada tiga prinsip utama yang menjadi pilar ekonomi yang adil dan berkah:

Keadilan (*ʿAdl*): Keadilan bukan hanya asas legalitas, tetapi spiritualitas dalam memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi memperoleh haknya secara proporsional, tanpa eksploitasi atau penindasan. Al-Qur'an menegaskan, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat...*" (QS. An-Nahl: 90). Dalam ekonomi, keadilan berarti transparansi harga, perlakuan setara, dan distribusi sumber daya yang menghindari akumulasi pada segelintir pihak.

Tolong-menolong (*Ta'āwun*): Prinsip ini menumbuhkan semangat gotong royong ekonomi, di mana keuntungan tidak hanya dinikmati individu, tetapi berkontribusi pada kesejahteraan kolektif. Ta'āwun menuntut agar setiap kegiatan ekonomi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap yang lemah dan termarginalkan. Dalam transaksi, ia menuntun pelaku usaha untuk tidak menekan harga semata-mata demi laba, tetapi memperhatikan keberlangsungan mitra usaha dan pekerja.

Keseimbangan (*Tawāzun*): Tawāzun bermakna menjaga proporsi dan harmoni antara kepentingan individu, komunitas, dan lingkungan. Dalam ekonomi, prinsip ini mencegah terjadinya ketimpangan yang menciptakan jurang sosial, serta mengingatkan agar orientasi pertumbuhan tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis. Islam tidak mendorong pembatasan rezeki, tetapi memperingatkan akan bahaya penumpukan yang mematikan aliran manfaat (QS. Al-Hasyr: 7).

Dengan menghidupkan kembali roh *mu'āmalah* yang berbasis *ʿadl*, *ta'āwun*, dan *tawāzun*, Islam menawarkan model ekonomi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga sehat secara spiritual dan sosial. Inilah wajah ekonomi yang barokah: bukan sekadar bertumbuh, tetapi menumbuhkan; bukan hanya akumulatif, tetapi juga transformatif.



Dalam praktiknya, Rasulullah ﷺ sendiri membangun pasar Madinah sebagai ruang ekonomi yang bebas dari monopoli, spekulasi, dan eksploitasi. Beliau tidak hanya memfasilitasi perdagangan, tetapi juga mengaturnya agar tetap dalam bingkai akhlak dan tanggung jawab sosial.

Kewirausahaan sosial dan ekonomi solidaritas, dengan demikian, bukan sekadar strategi alternatif, tetapi perwujudan nyata dari etika Islam tentang harta sebagai amanah dan bisnis sebagai ibadah. Ketika semangat keberkahan melandasi struktur dan visi kewirausahaan, maka lahirilah ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga menumbuhkan.

D. MANAJEMEN WAKTU DAN KERJA DALAM BINGKAI SPIRITUALITAS

Di tengah ritme dunia kerja yang semakin cepat dan dikendalikan oleh target kuantitatif, Islam menawarkan pendekatan alternatif yang tidak hanya fungsional, tetapi juga eksistensial dan spiritual: manajemen waktu yang berorientasi pada keberkahan (*barakat al-waqt*). Dalam pandangan Islam, waktu bukan sekadar durasi kronologis, melainkan amanah ilahiyah yang harus dimaknai dan diisi dengan kebaikan. Keberhasilan dalam mengelola waktu bukan hanya diukur dari output material, tetapi dari sejauh mana waktu tersebut menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah dan memberi manfaat sosial.

Shalat sebagai Ritme Kehidupan dan Kerja. Shalat lima waktu bukan sekadar ritual, tetapi juga penanda ritme spiritual dalam aktivitas harian. Ia membagi waktu menjadi segmen-segmen ibadah yang menyela rutinitas duniawi, menjaga agar manusia tidak larut dalam kerja tanpa arah. Allah berfirman: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli...*” (QS. Al-Jumu’ah: 9). Ini menunjukkan bahwa produktivitas



dalam Islam tidak berarti keterputusan dari Tuhan, tetapi justru berjalan seiring dengan ingatan dan penghambaan.

Istirahat dan Dzikir sebagai Sumber Energi Spiritual. Dalam Islam, istirahat bukanlah kemalasan, melainkan bagian dari kesadaran akan keterbatasan diri dan pentingnya rekoneksi spiritual. Dzikir, tafakur, dan jeda dari aktivitas duniawi menjadi ruang untuk mengisi kembali energi ruhani. Allah tidak memerintahkan manusia bekerja tanpa henti, tetapi memberi isyarat akan keseimbangan antara gerak (*harakah*) dan hening (*sukun*) dalam QS. Al-Furqan: 47 “*Dan Dialah yang menjadikan malam sebagai pakaian bagimu dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangkit bekerja.*”

Etos Kerja dengan Ihsan. Konsep *ihsan* bekerja sebaik mungkin seolah-olah melihat Allah menjadi etika kerja utama dalam Islam. Dalam hadis, Nabi bersabda: “*Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang jika bekerja, ia menyempurnakannya.*” (HR. Thabrani). Etos ini membentuk pekerja yang bukan hanya terampil, tetapi juga jujur, amanah, dan penuh integritas, karena bekerja dipandang sebagai bagian dari ibadah, bukan sekadar aktivitas mencari nafkah.

Spiritualitas Kerja sebagai Pengarahan Dunia, Bukan Pelarian. Hasan Langgulung (1986) menekankan bahwa spiritualitas dalam kerja bukanlah bentuk eskapisme atau pelarian dari realitas dunia, melainkan pengarahan dunia agar kembali menjadi sarana ibadah dan pemaknaan. Dunia tidak ditolak, tetapi diorientasikan; kerja tidak dimatikan, tetapi disucikan. Dalam kerangka ini, profesionalisme dan spiritualitas tidak bertentangan, tetapi justru saling menyempurnakan.

Dengan demikian, manajemen waktu dalam Islam bukan hanya persoalan efisiensi, melainkan juga pembentukan makna dan nilai. Waktu menjadi saksi atas kualitas hidup manusia bukan seberapa banyak ia bekerja, tetapi seberapa dalam ia menghadirkan Allah dalam setiap detik kehidupannya. Inilah yang menjadi dasar dari ekonomi barokah dalam dunia kerja: kerja yang tidak mengasingkan manusia dari dirinya dan Tuhannya, tetapi justru mempertemukan keduanya dalam kesadaran yang utuh.



Bisnis dan kerja dalam paradigma ekonomi barokah tidak dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan jalan menuju pengabdian, pemberdayaan, dan keseimbangan sosial. Ketika usaha didasarkan pada nilai halal, tayyib, dan maslahat; ketika waktu dan niat dikelola dengan kesadaran ilahiyah; dan ketika keuntungan dipahami sebagai sarana untuk berbagi, maka barokah akan menyertai setiap langkah dalam dunia kerja dan wirausaha. Inilah wajah ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga menyucikan.





BAB 5

ZAKAT, INFAQ, DAN WAKAF SEBAGAI SISTEM DISTRIBUSI BAROKAH

Dalam paradigma ekonomi modern, distribusi kekayaan kerap tunduk pada logika akumulasi dan kepemilikan privat. Pasar bebas dan mekanisme kompetisi dijadikan fondasi utama, sementara nilai keadilan distributif tersisih oleh efisiensi dan pertumbuhan yang semu. Akibatnya, ketimpangan menjadi keniscayaan sistemik, bukan sekadar kesalahan teknis. Sebagian kecil menguasai sebagian besar sumber daya, sementara mayoritas terpinggirkan dari akses dan peluang yang adil.

Islam, sebagai sistem nilai yang mengintegrasikan aspek spiritual dan sosial, menawarkan pendekatan distribusi yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga transformasional dan penyucian jiwa. Kekayaan dalam Islam bukan milik absolut individu, melainkan titipan Ilahi (amanah) yang harus dikelola dengan tanggung jawab dan diarahkan pada maslahat kolektif. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah: *“Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang diberikan kepadamu.”* (QS. An-Nur: 33).

Melalui instrumen zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, Islam menghadirkan mekanisme distribusi yang tidak bersifat karitatif



belaka, tetapi berakar pada prinsip keadilan dan pembersihan. Zakat, misalnya, bukan donasi sukarela, melainkan kewajiban struktural yang membersihkan harta dari sifat kikir dan menyuburkan solidaritas sosial (QS. At-Taubah: 103). Infaq dan sedekah memperluas cakupan etika berbagi, mengajak umat untuk menyalurkan kelebihan dalam semangat kasih sayang, bukan pamer kemurahan. Sementara itu, wakaf menghadirkan logika ekonomi yang unik: pemanfaatan tanpa kepemilikan, di mana harta “dibekukan” dari akumulasi dan diarahkan pada kepentingan lintas generasi.

Dalam kerangka ini, ekonomi Islam bukan hanya soal bagaimana harta diperoleh, tetapi juga bagaimana ia dibagi dan dimaknai. Distribusi bukan sekadar proses teknis, melainkan dimensi spiritual yang memurnikan hati, merajut solidaritas, dan membuka pintu keberkahan. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Khaldun, *“Harta yang beredar di tangan banyak orang akan memperkuat perputaran ekonomi, sedangkan jika menumpuk pada segelintir orang, ia akan mematikan kehidupan masyarakat.”* (Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, 1377 H).

A. ZAKAT SEBAGAI PENGHAPUS KESENJANGAN DAN PEMBERSIH HARTA

Zakat dalam Islam bukan sekadar instrumen filantropi atau bentuk belas kasih spontan. Ia adalah kewajiban spiritual dan sosial, bagian dari rukun Islam yang menandai kepatuhan seorang Muslim kepada Allah sekaligus tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Zakat bukan milik pemberi, tetapi hak yang melekat dalam harta yang dititipkan oleh Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”* (QS. At-Taubah: 103). Ayat ini menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi tazkiyah (penyucian), baik terhadap harta maupun jiwa pemiliknya.

Secara spiritual, zakat menyembuhkan hati dari penyakit kikir, cinta dunia, dan ilusi kepemilikan mutlak. Ia menumbuhkan empati



dan memperkuat tali persaudaraan sosial. Harta yang dizakati bukan hanya lebih bersih, tetapi juga lebih berdaya guna karena telah menjalani proses spiritualisasi. Dalam pandangan Islam, keberkahan harta justru bertambah saat ia dibagikan, bukan ditimbun.

Namun, fungsi zakat tidak berhenti pada ranah individual. Zakat juga berperan sebagai mekanisme struktural untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. M. Umer Chapra (2000) menekankan bahwa zakat adalah “a built-in redistributive instrument” dalam sistem ekonomi Islam, yang tidak hanya menyalurkan kekayaan dari kaya ke miskin, tetapi menumbuhkan partisipasi ekonomi kelompok bawah secara produktif, tanpa menciptakan ketergantungan.

Dari perspektif makroekonomi, zakat menambah daya beli lapisan masyarakat miskin, memperluas permintaan agregat, dan memperkuat sirkulasi ekonomi berbasis keadilan. Ketika konsumsi rumah tangga bawah meningkat karena bantuan zakat, aktivitas pasar lokal ikut bergerak. Inilah yang disebut sebagai distribusi barokah harta tidak mandek di tangan elite, tetapi mengalir seperti air yang menyuburkan ladang-ladang kehidupan.

Lebih dari itu, zakat juga berperan sebagai alat rekonstruksi sosial. Ia bukan hanya memberi bantuan, tetapi memperbaiki struktur relasi ekonomi yang timpang. Dalam konteks ini, zakat harus dikelola secara profesional, transparan, dan sistemik, agar tidak kehilangan esensi keadilan yang menjadi rohnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf al-Qaradawi (2000), “Zakat bukan hanya solusi sementara, tetapi sistem permanen untuk membasmi kemiskinan secara bermartabat.” Maka dalam ekonomi yang barokah, zakat adalah aliran spiritual sekaligus saluran keadilan: membersihkan, membebaskan, dan menyuburkan.

B. INFAQ DAN SEDEKAH: MENYALURKAN BERKAH SECARA SOSIAL



Jika zakat adalah kewajiban formal dalam sistem ekonomi Islam, maka infaq dan sedekah merupakan ekspresi cinta dan kesadaran spiritual yang melampaui hitungan syariat minimal. Meskipun tidak diwajibkan, keduanya memiliki kedudukan mulia dalam ajaran Islam karena memanifestasikan kemurnian niat dan kedalaman kasih sayang terhadap sesama. Islam memuji orang-orang yang memberi bukan karena tuntutan, tetapi karena dorongan iman dan belas kasih.

Allah berfirman: *“Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki.”* (QS. Al-Baqarah: 261)

Ayat ini mengajarkan bahwa logika sedekah bukan logika kehilangan, tetapi pertumbuhan baik dalam makna spiritual maupun sosial. Sedekah adalah benih yang ditanam dalam ladang kehidupan, dan dari sana tumbuh keberkahan yang melampaui kalkulasi ekonomi biasa.

Dalam dimensi sosial, infaq dan sedekah menjadi jembatan empati dan alat rekonsiliasi sosial. Di tengah realitas masyarakat yang kerap disekat oleh kelas, akses, dan privilese, sedekah menjadi bahasa cinta yang menyentuh hati, bukan sekadar kantong. Ia memperkuat nilai gotong royong, memperlebar lingkaran solidaritas, dan menyembuhkan luka-luka sosial yang ditinggalkan oleh sistem ekonomi yang eksklusif dan individualistik.

Menurut Murat Cizakca (2011), infaq dan sedekah merupakan bagian integral dari jaringan perlindungan sosial (Islamic social safety net) yang telah dipraktikkan umat Islam sejak era klasik. Sebelum konsep *welfare state* modern muncul di Eropa, dunia Islam telah mengenal sistem distribusi sukarela yang kuat digerakkan bukan oleh negara, tetapi oleh kesadaran moral kolektif umat. Dalam konteks ini, sedekah tidak hanya menjadi alat bantu sesaat, tetapi struktur pengaman sosial yang hidup dari ruh keimanan.



Infaq juga menjadi media pemurnian jiwa. Ia mengikis kerak egoisme dan cinta dunia, menjadikan manusia lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Dalam pandangan sufistik, memberi adalah bentuk *fana'* terhadap ego, karena hakikat harta hanyalah titipan yang harus disalurkan, bukan dimiliki mutlak. Di titik inilah, sedekah menjadi latihan spiritual yang menjembatani dunia dan akhirat, materi dan makna.

Dalam masyarakat yang makin terdorong pada logika pasar dan efisiensi, infaq dan sedekah mengajarkan bahwa tidak semua yang penting bisa dihitung, dan tidak semua yang dihitung itu penting. Ia mengingatkan bahwa keberkahan tidak lahir dari banyaknya aset, tetapi dari makna yang ditanamkan melalui harta itu.

C. WAKAF PRODUKTIF DAN EKONOMI KEUMATAN

Wakaf bukan sekadar bentuk kedermawanan pasif, melainkan strategi distribusi kekayaan jangka panjang yang mengakar dalam spiritualitas Islam dan etika sosial. Ia mewakili kepemilikan yang ditanggalkan demi kemaslahatan umat, menjadikan harta sebagai *tsaqal muqaddas* (beban suci) yang mengalirkan manfaat lintas generasi. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf merupakan instrumen yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif dan transformatif.

Wakaf dapat berbentuk tanah, bangunan, hasil usaha, bahkan dana tunai (*cash waqf*) yang dikelola secara profesional untuk tujuan sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam kerangka ini, wakaf tidak berhenti pada niat memberi, tetapi terus bekerja melalui pengelolaan dan pendayagunaan aset secara berkelanjutan.

Sejarah Islam mencatat bahwa peradaban gemilang yang lahir di Baghdad, Kairo, Andalusia, dan Istanbul sebagian besar ditopang oleh sistem wakaf yang kokoh dan inklusif. Rumah sakit (*bimaristan*), madrasah, perpustakaan umum, pasar bebas pajak (*suq al-waqf*), dan tempat penampungan musafir adalah manifestasi



konkret dari ekonomi wakaf yang tidak menunggu negara, tetapi digerakkan oleh inisiatif masyarakat yang tercerahkan. Dengan kata lain, wakaf menjadi jantung dari ekonomi keumatan yang mandiri dan berorientasi maslahat.

Monzer Kahf (2003), seorang pakar ekonomi Islam kontemporer, menegaskan bahwa wakaf merupakan mekanisme redistribusi kekayaan paling fleksibel dan strategis, karena dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai ibadahnya. Wakaf mampu menggabungkan dimensi spiritual (pengabdian kepada Allah), sosial (pelayanan publik), dan ekonomi (pemanfaatan aset secara produktif).

Di tengah dinamika ekonomi modern yang ditandai oleh urbanisasi, kapitalisasi aset, dan kompleksitas kebutuhan sosial, konsep wakaf mengalami revitalisasi bentuk dan peran. Wakaf tidak lagi dipahami semata sebagai tanah tidur di pinggir kota atau bangunan masjid yang jarang digunakan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen sosial-ekonomi yang dinamis dan produktif mengintegrasikan prinsip-prinsip spiritual Islam dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Wakaf produktif muncul sebagai respons kreatif terhadap tantangan zaman dan sekaligus sebagai bentuk ikhtiar untuk menyatukan keadilan distribusi dengan pertumbuhan ekonomi. Ia menjadi jembatan antara nilai transendental dan praksis sosial, antara keabadian pahala (*jariyah*) dan kebermanfaatn publik (*maslahah ʿammah*). Bentuk-bentuk wakaf ini mencerminkan semangat Islam untuk terus beradaptasi secara substantif tanpa kehilangan ruhny.

Beberapa model yang kini berkembang antara lain: **Wakaf Saham.** Investasi berbasis syariah di pasar modal, di mana dividen dari saham wakaf disalurkan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, atau pembiayaan pesantren. Model ini memadukan *iqtisād* (ekonomi) dengan *ihsān* (kebajikan), serta menjadikan aset finansial sebagai instrumen kemaslahatan. **Wakaf Pertanian.** Optimalisasi tanah melalui model pertanian berkelanjutan



untuk mendukung ketahanan pangan, mendayagunakan petani kecil, dan memperkuat kedaulatan komunitas lokal. Wakaf jenis ini menghidupkan kembali tradisi *ihyā' al-mawāt* (menghidupkan tanah mati) dengan pendekatan ekologis dan partisipatif. Wakaf Properti (Rumah Sewa/Apartemen). Aset properti yang disewakan secara profesional, dengan keuntungannya dialirkan untuk program sosial seperti beasiswa pendidikan, santunan anak yatim, atau subsidi layanan kesehatan. Di sini, wakaf bertransformasi menjadi fondasi sosial urban yang mendukung redistribusi sumber daya secara adil di tengah sistem ekonomi yang kian eksklusif.

Melalui model-model ini, wakaf kembali menegaskan dirinya bukan sebagai artefak masa lalu, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup mampu menjadi bagian dari solusi struktural atas kemiskinan, ketimpangan, dan krisis kemanusiaan. Ia adalah jalan tengah antara spiritualitas dan produktivitas, antara kepemilikan dan pelayanan, antara dunia dan akhirat.

Model ini membuktikan bahwa wakaf bukan institusi stagnan, melainkan sistem dinamis yang dapat memainkan peran penting dalam menciptakan ekonomi umat yang inklusif, adil, dan barokah. Ia memperkuat basis ekonomi rakyat bawah tanpa harus mencabut nilai-nilai spiritualitas yang menjadi fondasi ajaran Islam.

Dalam dunia yang ditandai oleh ketimpangan dan ketergantungan pada modal besar, wakaf hadir sebagai jalan tengah yang adil dan membebaskan. Ia tidak sekadar mengentaskan kemiskinan, tetapi menciptakan kemandirian. Tidak sekadar memberi ikan, tetapi menghadirkan kolam tempat umat bisa memancing bersama dengan martabat.

D. PERAN INSTITUSI ZAKAT DAN FILANTROPI ISLAM KONTEMPORER

Di tengah meningkatnya kompleksitas sosial dan tantangan ketimpangan ekonomi global, institusi zakat dan filantropi Islam muncul sebagai simpul penting dalam sistem distribusi yang tidak



hanya adil, tetapi juga sarat nilai spiritual. Islam sejak awal telah menekankan bahwa pengelolaan kekayaan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau belas kasihan individu, tetapi harus ditata melalui lembaga yang amanah, profesional, dan partisipatif.

Di tengah kompleksitas ketimpangan ekonomi dan melemahnya solidaritas sosial akibat sistem kapitalisme global yang impersonal, lembaga-lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), serta berbagai inisiatif wakaf dan infaq modern, hadir bukan sekadar sebagai penyalur bantuan karitatif. Mereka tampil sebagai arsitek peradaban mengemban mandat kenabian untuk menegakkan keadilan distributif, memberdayakan yang terpinggirkan, dan membangun sistem ekonomi yang bernafaskan rahmat dan keberkahan.

Dalam kerangka ekonomi barokah, lembaga-lembaga ini memainkan peran strategis dan transformasional, di antaranya:

Mengumpulkan dana secara akuntabel dan profesional, dengan sistem tata kelola yang transparan dan terstandarisasi. Hal ini tidak hanya menumbuhkan trust (kepercayaan publik), tetapi juga mengukuhkan bahwa pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan adalah bagian dari manajemen keuangan publik yang etis dan spiritual.

Menyalurkan dana berdasarkan prinsip maslahat dan dampak berkelanjutan. Setiap penyaluran bukan sekadar transaksi kebaikan sesaat, melainkan bagian dari visi jangka panjang untuk mewujudkan al-‘adl (keadilan) dan al-ihsān (kebajikan), sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah.

Memberdayakan mustahik menjadi muzakki, yaitu mentransformasi penerima menjadi pemberi, yang semula lemah menjadi mandiri. Ini dilakukan melalui program penguatan ekonomi produktif, pelatihan keterampilan, inkubasi usaha, hingga akses pada permodalan berbasis syariah. Dalam proses ini, terwujudlah salah satu makna terdalam zakat: bukan hanya memindahkan harta, tetapi mengangkat derajat.



Dengan pendekatan ini, zakat, infaq, dan wakaf tidak lagi beroperasi dalam ruang yang terpisah dari ekonomi nasional, melainkan menjadi sumber daya strategis untuk membangun tatanan ekonomi alternatif yang lebih inklusif, adil, dan bermakna. Sebagaimana diungkapkan oleh Monzer Kahf (2004), integrasi lembaga keuangan sosial Islam dalam sistem pembangunan modern adalah langkah penting dalam mewujudkan *spiritual economic justice* keadilan ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai transendental dan keberpihakan pada mustadh'afin.

Dengan demikian, lembaga amil zakat dan filantropi Islam bukan hanya mengelola dana umat, tetapi sedang merancang ulang wajah peradaban: dari ekonomi yang eksploitatif menuju ekonomi yang penuh berkah, rahmat, dan pemberdayaan.

Menurut Ali et al. (2022), keberkahan dalam filantropi Islam tidak hanya diukur dari besarnya jumlah dana yang dihimpun, tetapi dari kualitas tata kelolanya yakni transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pemberdayaan (*empowerment*), bukan sekadar karitas (*charity*). Lembaga zakat yang menjalankan prinsip good governance bukan hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga memuliakan maqashid syariah dalam ranah ekonomi.

Lebih jauh, pendekatan integratif melalui model ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) menjadi arah baru yang menjanjikan. Dengan menggabungkan kekuatan berbagai instrumen distribusi, sistem ini menciptakan ekosistem berkah yang saling menopang: zakat sebagai redistribusi wajib, infaq dan sedekah sebagai gerakan sosial sukarela, dan wakaf sebagai investasi sosial jangka panjang.

Namun, keberhasilan transformasi lembaga filantropi Islam sebagai instrumen peradaban tidak semata bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi pada pondasi nilai dan praksis sosial yang menyertainya. Terdapat setidaknya tiga pilar utama yang menentukan keberlangsungan dan efektivitas model ini:

- 1) *Niat yang lurus (lillāh)* dalam seluruh aspek pengelolaan. Setiap aktivitas sosial-ekonomi harus ditopang oleh orientasi ibadah



bukan sekadar profesionalisme administratif atau pencitraan institusional. Dalam Islam, amal tanpa keikhlasan adalah kulit tanpa isi; maka keberkahan terletak bukan hanya pada besar kecilnya dana yang dikelola, tetapi pada kesucian niat dan ketulusan pengabdian. Pengelola zakat dan wakaf sejatinya adalah pelayan umat dan wakil Tuhan dalam mewujudkan keadilan sosial.

- 2) *Manajemen yang profesional, inovatif, dan responsif.* Tantangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di era modern menuntut pendekatan baru yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif dan visioner. Maka, pengelolaan dana sosial Islam harus mengintegrasikan teknologi digital, basis data kebutuhan riil, riset dampak sosial, dan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Seperti diungkap oleh Ahmed (2008), inovasi dalam filantropi Islam sangat penting untuk menjawab tantangan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai asasinya.
- 3) *Keterlibatan aktif umat sebagai pelaku dan pemilik gerakan.* Filantropi Islam tidak boleh terjebak dalam birokratisasi kaku yang mengasingkan umat dari peran partisipatifnya. Sebaliknya, ia harus tumbuh sebagai gerakan kolektif yang menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging), solidaritas sosial, dan semangat gotong royong spiritual. Zakat, infaq, dan wakaf adalah instrumen ibadah berjamaah media untuk menanamkan bahwa tanggung jawab atas kesejahteraan sosial bukan milik negara semata, tetapi panggilan iman bagi seluruh umat.

Ketika ketiga dimensi ini bertemu niat spiritual, manajemen cerdas, dan partisipasi kolektif maka lembaga filantropi Islam tidak hanya akan menjadi institusi distribusi dana, tetapi akan menjelma sebagai katalisator perubahan sosial dan penegak *maqāṣid al-syarī'ah*: keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Di sinilah, ekonomi barokah menemukan infrastruktur kelembagaannya yang kokoh dan transformatif.



Dalam konteks ini, institusi zakat dan filantropi bukan hanya “jembatan” antara muzakki dan mustahik, tetapi penanda arah ekonomi beradab yang mengembalikan harta kepada fungsinya yang hakiki: alat pengabdian kepada Allah dan pelayanan terhadap sesama.

Zakat, infaq, dan wakaf bukan sekadar instrumen ekonomi mereka adalah jalan spiritual yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, dan manusia dengan sesamanya. Dalam pandangan Islam, distribusi kekayaan bukanlah bentuk kehilangan, melainkan pelepasan dari keakuan, penyucian dari ketamakan, dan perluasan rahmat bagi semesta.

Ketika ketiga instrumen ini dijalankan dengan niat yang ikhlas (ikhlas), tata kelola yang amanah, dan visi keadilan sosial, maka ekonomi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga menyebarkan keberkahan yang meresap hingga ke jantung masyarakat. Harta menjadi sarana untuk menghidupkan sesama, bukan menguasai mereka.

Dalam ekonomi barokah, distribusi bukan beban struktural, tetapi estetika spiritual keindahan hidup yang terletak pada kemampuan memberi. Di sana, kekayaan tidak dibanggakan karena jumlahnya, melainkan karena kebermanfaatannya. Keberkahan hadir bukan hanya dari apa yang dimiliki, tapi dari apa yang dibagi.

Inilah wajah Islam yang menghadirkan keseimbangan antara langit dan bumi, antara spiritualitas dan struktur, antara diri dan komunitas. Sebuah ekonomi yang bukan sekadar sistem, tetapi perwujudan cinta; bukan sekadar transaksi, tetapi pengabdian. Sebab, dalam Islam, berbagi adalah bentuk tertinggi dari kepemilikan, dan keberkahan adalah buah dari cinta yang berakar dalam nilai tauhid, adil, dan rahmah.





BAB 6

EKONOMI BAROKAH SEBAGAI JALAN KEADILAN SOSIAL

Di tengah realitas dunia kontemporer yang semakin dihantui oleh kesenjangan ekstrem, ketimpangan struktural, dan sistem ekonomi yang tercerabut dari nurani kemanusiaan, Islam tampil bukan sekadar sebagai sistem normatif-teologis, tetapi sebagai tawaran peradaban alternatif. Ia menghadirkan paradigma ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan material, tetapi mengintegrasikan keadilan dan keberkahan sebagai fondasi utama. Dalam pandangan Islam, ekonomi bukan sekadar persoalan akumulasi angka atau optimalisasi pasar, melainkan medan pengabdian spiritual sebuah ruang di mana nilai-nilai ilahiyah menuntun arah distribusi, produksi, dan konsumsi.

Konsep ekonomi barokah melampaui logika kapitalistik yang menjadikan distribusi sebagai sisa dari surplus atau efek samping efisiensi. Ia menjadikan distribusi sebagai amanah spiritual, bentuk tanggung jawab sosial, dan ekspresi dari tauhid sosial. Dalam kerangka ini, keberpihakan kepada yang lemah tidak dilihat sebagai agenda politik populis atau kebijakan temporer, melainkan sebagai refleksi iman yang hidup dan akhlak yang transformatif.

Harta, dalam visi ini, tidak dimaknai sebagai alat penumpukan kekuasaan atau sarana dominasi simbolik, tetapi sebagai titipan Tuhan yang harus mengalir dan menegaskan keadilan. Ia adalah medium



untuk menciptakan keseimbangan sosial, mempererat solidaritas, dan menghapus jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Ekonomi profetik, dengan demikian, bukan hanya menawarkan rumusan teknis, tetapi juga horizon etis dan spiritual: bahwa kesejahteraan sejati lahir bukan dari kompetisi rakus, melainkan dari kolaborasi yang penuh kasih dan kepedulian terhadap sesama sebagai sesama makhluk Tuhan.

A. ISLAM DAN PEMBELAAN TERHADAP MUSTADH'AFIN

Salah satu fondasi paling luhur dalam ajaran Islam adalah komitmen teologis dan etis terhadap pembelaan mustadh'afin kaum yang lemah, tertindas, dan terpinggirkan, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Ajaran ini bukan sekadar cerminan empati sosial, tetapi merupakan inti dari visi keadilan profetik yang menjiwai risalah Islam sejak awal. Al-Qur'an tidak hanya menyebut kaum mustadh'af secara eksplisit, tetapi juga mengangkat mereka sebagai poros dalam proyek transformatif peradaban Islam. Mereka bukan diposisikan sebagai objek belas kasihan atau penerima pasif kebijakan, melainkan sebagai subjek historis yang diberi kehormatan untuk memimpin dan mewarisi bumi.

Firman Allah dalam Surah Al-Qashash ayat 5 menyatakan dengan penuh visi emansipatoris: *"Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi dan menjadikan mereka pemimpin serta menjadikan mereka pewaris (bumi)."* Ayat ini mengandung bukan hanya janji eskatologis, tetapi juga mandat sosial untuk membongkar struktur ketimpangan dan membangun tatanan yang adil. Di balik teks tersebut, tersirat keberpihakan ilahiyah terhadap yang termarginalkan, sekaligus penolakan terhadap hegemoni kekuasaan yang menindas.

Dalam kerangka ini, pembelaan terhadap mustadh'afin tidak bisa direduksi menjadi sekadar program karitas, tetapi harus dipahami sebagai praksis profetik yakni gerakan spiritual dan struktural yang menyatu, yang menyerukan keadilan sebagai perwujudan dari



tauhid. Sebab dalam Islam, kesatuan Tuhan meniscayakan kesatuan kemanusiaan; dan dari kesatuan itulah lahir solidaritas yang tidak boleh mengabaikan suara mereka yang terbungkam oleh sistem. Dengan demikian, perjuangan membela mustadh'afin adalah bentuk aktualisasi iman yang berakar pada cinta, keadilan, dan keberanian moral. Ini adalah jihad sosial yang menuntut bukan hanya empati personal, tetapi juga transformasi struktural agar bumi benar-benar menjadi warisan bersama, bukan milik segelintir yang berkuasa.

Nabi Muhammad ﷺ adalah cerminan paripurna dari ayat tentang mustadh'afin. Beliau bukan sekadar penyampai wahyu, tetapi sekaligus pelaku utama transformasi sosial yang membela martabat manusia yang terpinggirkan oleh tatanan yang timpang dan tidak adil. Dalam sosok beliau, risalah ilahiyah menjelma menjadi praksis historis yang membebaskan: anak yatim tidak lagi dipinggirkan, fakir miskin diangkat derajatnya, budak diberikan jalan menuju kebebasan, dan perempuan yang sebelumnya terkungkung dalam subordinasi mulai diakui hak dan kehormatannya.

Risalah Nabi bukan hanya ajakan kepada tauhid secara teologis, tetapi juga penolakan terhadap segala bentuk penindasan struktural yang menjadikan kekuasaan, status, dan kekayaan sebagai tolok ukur nilai manusia. Revolusi yang beliau bawa adalah revolusi spiritual sekaligus sosial sebuah pembalikan radikal terhadap logika jahiliyah yang menyembah kelas, suku, dan ketimpangan. Dalam kerangka ini, kenabian tidak hanya menuntun manusia menuju Tuhan, tetapi juga membebaskan mereka dari belenggu sesama manusia.

Apa yang dilakukan Nabi ﷺ menunjukkan bahwa dalam Islam, spiritualitas sejati tidak bersifat eskapis atau individualistis, tetapi berakar dalam perjuangan untuk mewujudkan keadilan. Ia memadukan kelembutan akhlak dengan ketegasan moral, membimbing umat bukan hanya untuk mengenal Allah, tetapi juga untuk memperjuangkan hak-hak yang diinjak oleh kekuasaan despotik. Maka dari itu, risalah kenabian adalah jalan perlawanan terhadap dehumanisasi, jalan pengembalian harkat manusia dalam terang kasih sayang Ilahi. Dengan demikian, Nabi Muhammad



ﷺ bukan hanya teladan dalam ibadah personal, tetapi juga dalam keberpihakan sosial. Beliau menunjukkan bahwa iman tanpa pembelaan terhadap yang tertindas adalah iman yang kehilangan nyawanya; dan cinta kepada Tuhan yang tidak diiringi cinta kepada manusia yang tertindas adalah cinta yang belum utuh.

Dalam kerangka inilah, ekonomi barokah tidak tumbuh dari logika akumulasi tanpa batas yang mengabaikan moralitas, tetapi lahir dari akar spiritual yang dalam dari semangat *rahmah*, keadilan distributif, dan solidaritas yang menghidupkan. Ia adalah bentuk ekonomi yang berakar pada cinta dan kasih sayang, bukan pada keserakahan; pada keberkahan yang menyeluruh, bukan pada keuntungan yang terpusat. Di sini, pertumbuhan tidak diukur semata oleh angka-angka statistik, tetapi oleh sejauh mana ekonomi mampu memulihkan martabat manusia dan merawat kehidupan secara adil.

Ekonomi barokah dengan tegas menolak asumsi bahwa pasar adalah entitas netral yang dapat dibiarkan bekerja tanpa bimbingan etika, atau bahwa kesenjangan sosial adalah konsekuensi wajar dari dinamika pertumbuhan. Sebaliknya, ia memandang bahwa setiap mekanisme ekonomi harus tunduk pada nilai ilahiyah dan tanggung jawab sosial. Pasar tidak netral; ia mencerminkan nilai-nilai yang diizinkan untuk mengalir melaluinya. Maka, membiarkan pasar bekerja tanpa etika sama saja dengan menyerahkan nasib umat manusia pada logika yang buta terhadap penderitaan.

Dalam visi ini, manusia bukanlah sekadar “konsumen” atau “produsen”, melainkan makhluk bermartabat yang memiliki hak untuk hidup layak dalam tatanan ekonomi yang adil. Terlebih, ekonomi barokah menjadikan mereka yang terluka, terpinggirkan, dan terabaikan oleh sistem konvensional sebagai pusat orientasi. Kebijakan ekonomi, dalam pandangan ini, harus dimulai dari pinggiran dari suara mereka yang paling sunyi karena justru di situlah letak ujian kemanusiaan dan ketakwaan kolektif kita. Dengan demikian, ekonomi barokah bukanlah sekadar sistem distribusi yang lebih adil, melainkan visi hidup yang menyatukan spiritualitas dan struktur, tauhid dan tatanan, cinta dan kebijakan. Ia mengundang



kita untuk membayangkan ekonomi bukan sebagai mesin, tetapi sebagai organisme sosial yang berdenyut bersama nurani, keberkahan, dan komitmen terhadap keadilan Tuhan di muka bumi.

Menurut Asad Zaman (2014), ekonomi Islam sejak awal dirancang bukan sebagai sistem netral yang tunduk pada logika pasar bebas, melainkan sebagai proyek moral dan struktural yang secara eksplisit berpihak pada *mustadh'afin* kaum yang tertindas, terpinggirkan, dan kehilangan akses terhadap sumber-sumber kehidupan. Dalam pandangan ini, ekonomi Islam bukan hanya seperangkat instrumen teknokratis, tetapi sebuah visi etis yang menantang akar-akar ketimpangan dan menyerukan pembebasan sosial.

Berbeda secara diametral dengan paradigma kapitalisme neoliberal yang mengultuskan pasar sebagai otoritas absolut dan menempatkan kemiskinan sebagai akibat dari kegagalan moral individu Islam melihat kemiskinan sebagai gejala dari struktur yang timpang dan tidak manusiawi. Bagi Islam, kemiskinan bukan semata-mata hasil ketidakanggupan personal atau kurangnya daya saing, tetapi merupakan buah dari relasi ekonomi yang eksploitatif, konsentrasi kekayaan yang tidak terkendali, dan absennya distribusi yang adil. Oleh karena itu, penyelesaian atas kemiskinan tidak cukup dengan program pemberdayaan mikro atau dorongan kewirausahaan individu, tetapi menuntut *ijtihad struktural* penataan kembali sistem ekonomi secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab kolektif.

Zaman menekankan bahwa inti dari ekonomi Islam adalah keharusan untuk mengintervensi struktur ketimpangan dengan mekanisme-mekanisme yang menjamin keberpihakan, seperti zakat, larangan riba, wakaf produktif, dan distribusi aset secara adil. Ini adalah bentuk *tauhid sosial* yang memanifestasikan dirinya dalam praksis: bahwa Tuhan yang Esa menuntut keesaan perlakuan terhadap manusia, dan menolak segala bentuk ketimpangan yang memecah martabat sesama makhluk-Nya. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya alternatif teoretis, tetapi juga tantangan ideologis terhadap sistem global yang meminggirkan nurani. Ia adalah panggilan



untuk membangun peradaban yang tidak mengukur manusia dari daya belinya, tetapi dari kehormatannya sebagai makhluk Tuhan yang layak hidup dalam kemuliaan dan keadilan.

Membela *mustadh'afin* dalam Islam bukanlah tindakan karitatif yang bersifat sesaat atau insidental, melainkan merupakan konsekuensi ontologis dari keimanan yang hidup. Ia adalah ekspresi nyata dari tauhid yang menolak pemisahan antara ibadah ritual dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif ini, pembelaan terhadap yang tertindas adalah *ibadah sosial* sebuah jembatan sakral yang menghubungkan bumi dan langit, antara harta dan nurani, antara kekuasaan dan kasih sayang.

Islam tidak mengajarkan spiritualitas yang melarikan diri dari dunia, tetapi menghadirkan *dīn* sebagai kekuatan pembebasan yang membumi. Keindahan Islam yang paling hakiki justru terpancar ketika agama ini tidak hanya mengajarkan tata cara shalat dan puasa, tetapi juga hadir di medan realitas untuk membongkar struktur ketidakadilan, mengangkat mereka yang tertindas, dan memperjuangkan hak-hak yang terabaikan. Di sinilah tampak wajah Islam yang profetik agama yang turun bukan untuk melanggengkan ketundukan sosial, melainkan untuk memulihkan martabat dan memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan, baik ekonomi, politik, maupun budaya.

Pembelaan terhadap *mustadh'afin* adalah perintah moral yang mengikat, bukan sekadar pilihan etis. Ia menuntut keterlibatan aktif dalam menciptakan sistem yang adil bukan hanya memberi sedekah, tetapi mengubah relasi kekuasaan; bukan hanya meringankan beban, tetapi mencabut akar ketimpangan. Dengan demikian, keimanan tidak berhenti di mihrab, tetapi menjelma dalam keberpihakan yang nyata: membela yang lemah bukan karena mereka lemah, tetapi karena di situlah letak ujian cinta, empati, dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi.

Melalui pandangan ini, Islam mengajarkan bahwa kesalehan yang sejati adalah kesalehan yang melahirkan keadilan; dan keadilan yang



sejati adalah keadilan yang lahir dari kesadaran spiritual bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang berhak hidup dalam martabat, sejahtera dalam keberkahan, dan setara di hadapan Ilahi.

Ekonomi barokah adalah ikhtiar kolektif untuk mewujudkan cita-cita keadilan yang bersumber dari dimensi ilahiyah sebuah sistem yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka-angka, tetapi juga berupaya memulihkan harapan, menyalakan martabat, dan menyembuhkan luka-luka sosial yang ditinggalkan oleh logika ekonomi yang eksploitatif. Ia bukan sekadar kebijakan fiskal yang ramah sosial, melainkan perwujudan dari pandangan hidup yang mengintegrasikan antara dunia dan akhirat, antara efisiensi dan welas asih, antara struktur dan spiritualitas.

Ekonomi barokah adalah ekonomi yang mengingat: ia tidak melupakan suara mereka yang dilupakan, tidak membiarkan yang terpinggirkan semakin tergerus oleh arus modernitas yang buta. Ia adalah ekonomi yang memihak secara sadar dan tegas berpijak di sisi mereka yang tertindas, bukan karena sentimentalitas, tetapi karena mandat keimanan yang menuntut keberpihakan sebagai bentuk nyata dari takwa sosial. Dan ia adalah ekonomi yang menyembuhkan mengobati luka akibat ketimpangan, menyatukan kembali keterbelahan sosial, dan menghadirkan keberkahan sebagai buah dari keadilan yang ditegakkan.

Dalam horizon Islam, kesejahteraan tidak diukur dari akumulasi kekayaan segelintir orang, tetapi dari kemampuan kolektif sebuah masyarakat untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun manusia yang tertinggal dalam penderitaan. Sebab dalam Islam, tidak sah sebuah kemakmuran yang dibangun di atas derita orang lain. Kekayaan yang tidak dibagi adalah ancaman, bukan anugerah; dan pertumbuhan yang tidak berpihak hanyalah ilusi kemajuan yang memperdalam jurang ketimpangan.

Dengan demikian, ekonomi barokah mengundang kita untuk menata ulang orientasi pembangunan dari yang semula berpusat pada angka menjadi berakar pada makna, dari yang mengejar



akumulasi menjadi merawat distribusi, dari yang mempercepat konsumsi menjadi memuliakan kehidupan. Ia adalah jalan tengah yang luhur: menjadikan ekonomi sebagai alat pengabdian, bukan dominasi; sebagai ruang keberkahan, bukan sekadar efisiensi. Sebuah jalan sunyi yang menuntut keberanian moral dan kesetiaan spiritual kepada nilai-nilai yang tak lekang oleh zaman: keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan.

B. REDISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM SEMANGAT KEADILAN

Konsep distribusi kekayaan dalam kerangka ekonomi barokah bukanlah sekadar instrumen teknokratis atau kebijakan fiskal yang bersifat administratif. Ia melampaui perhitungan rasional dan kebijakan ekonomi konvensional, karena berakar pada inti ajaran spiritual Islam. Distribusi dalam ekonomi barokah adalah ekspresi dari iman yang hidup iman yang tidak berhenti pada keyakinan, tetapi menjelma menjadi seruan moral dan mandat teologis yang menembus batas angka dan neraca, menyentuh hati nurani, dan membentuk tatanan yang lebih adil.

Dalam pandangan Islam, kekayaan bukanlah milik absolut individu, melainkan *amanah* Ilahi yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Kepemilikan bersifat nisbi, sementara hak orang lain yang membutuhkan tertanam secara inheren dalam setiap harta yang kita miliki. Hal ini tercermin dalam firman Allah: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”* (QS. Adz-Dzariyat: 19). Maka, distribusi bukanlah tindakan opsional atau sekadar kebaikan moral, tetapi bagian dari arsitektur keimanan itu sendiri.

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan hanya bentuk *amal saleh* individual, melainkan institusi sosial-spiritual yang dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam struktur masyarakat. Mereka adalah mekanisme yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, antara kekayaan dan kerentanan, antara surplus dan kebutuhan. Dalam perspektif ini, distribusi menjadi instrumen pembebasan:



membebaskan harta dari keserakahan, membebaskan individu dari egoisme, dan membebaskan masyarakat dari ketimpangan yang melukai keadilan.

Distribusi kekayaan dalam Islam bertujuan bukan hanya untuk mengurangi kemiskinan, tetapi untuk mencegah akumulasi berlebihan yang dapat menciptakan oligarki dan ketimpangan struktural. Dengan demikian, ekonomi barokah tidak bersandar pada logika *trickle-down* yang spekulatif, melainkan pada logika *shared prosperity* yang terinstitusi dalam hukum syariat dan nilai-nilai welas asih. Ia adalah bentuk *fiqh al-ijtima'i* fikih sosial yang menyatukan etika spiritual dan keadilan distributif dalam satu tarikan napas.

Di sinilah terletak kekuatan ekonomi Islam: bukan hanya menawarkan teori atau kebijakan, tetapi menghadirkan visi hidup yang menyatu antara dunia dan akhirat, antara angka dan nurani, antara kekayaan dan keberkahan. Distribusi bukan akhir dari kebijakan; ia adalah awal dari peradaban.

Bahkan dalam sistem faraid hukum waris Islam tercermin secara nyata visi keadilan sosial yang melampaui generasi. Islam tidak hanya mengatur pewarisan secara legal-formal, tetapi secara substansial merancang skema redistribusi antar generasi yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elite. Melalui ketentuan yang detail dan proporsional, faraid berfungsi sebagai mekanisme ilahiyah untuk memastikan bahwa harta tidak menjadi milik eksklusif yang diwariskan secara tertutup dalam lingkaran kekuasaan atau kekayaan.

Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam firman Allah: *“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”* (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini mengandung seruan etis sekaligus peringatan struktural bahwa ketimpangan yang tidak dikendalikan akan merusak keseimbangan sosial, melahirkan dominasi kelas, dan merusak tatanan masyarakat yang adil.

Dengan demikian, faraid bukan sekadar sistem hukum keluarga, melainkan bagian integral dari visi distribusi Islam yang lebih luas.



Ia adalah bentuk keadilan regeneratif, yang tidak hanya menjaga hak setiap individu atas harta warisan, tetapi juga memastikan bahwa siklus ekonomi tidak terjebak dalam pola akumulasi vertikal yang memperkuat oligarki. Dalam konteks ini, Islam menunjukkan keunggulannya sebagai sistem nilai yang tidak hanya memikirkan kepemilikan hari ini, tetapi juga dampaknya bagi generasi esok.

Melalui faraid, Islam menegaskan bahwa warisan bukanlah alat reproduksi kekuasaan, tetapi amanah sosial yang harus dibagikan secara adil. Ia adalah bagian dari arsitektur spiritual dan sosial yang menjadikan keadilan tidak hanya sebagai cita-cita normatif, tetapi sebagai praktik konkret yang dibangun dari keluarga hingga negara, dari individu hingga peradaban.

Dengan logika semacam ini, kita dapat memahami bahwa sistem ekonomi Islam termasuk mekanisme warisnya berfungsi bukan hanya untuk mengatur, tetapi untuk merawat: merawat keseimbangan, keberkahan, dan keutuhan sosial dalam jangka panjang.

Ayat ini bukan sekadar kritik normatif terhadap ketimpangan ekonomi, tetapi sekaligus tawaran sistemik atas sebuah model ekonomi yang lebih humanistik, partisipatif, dan berkeadilan. Ia mengandung visi transformatif yang menolak struktur dominasi dan stagnasi kekayaan, serta menyerukan sebuah tatanan di mana distribusi menjadi nadi dari keberlangsungan sosial. Dalam kerangka ekonomi barokah, nilai keberhasilan tidak lagi ditakar dari seberapa banyak yang dimiliki secara akumulatif, tetapi dari seberapa luas manfaat yang dihasilkan dan disebarluaskan ke seluruh elemen masyarakat.

Keberkahan dalam ekonomi Islam bukan terletak pada penumpukan kapital, tetapi pada keberdayaan yang ditumbuhkan melalui aliran harta yang adil dan penuh kasih. Harta, sebagaimana air, memperoleh maknanya justru ketika ia mengalir menghidupkan, menyuburkan, dan memulihkan lanskap sosial yang kering oleh ketimpangan. Ketika harta hanya berputar di lingkaran elite, ia kehilangan ruhnyanya; tetapi ketika ia mengalir kepada yang



membutuhkan, ia menjelma menjadi berkah yang menciptakan ruang kesetaraan dan pertumbuhan bersama.

Dalam ekonomi barokah, logika keuangan bergeser dari kepemilikan menuju kebermanfaatan, dari akumulasi menuju distribusi, dari individualisme menuju keterhubungan sosial. Ini bukan sekadar idealisme utopis, melainkan fondasi spiritual yang ditanamkan dalam berbagai instrumen Islam zakat, wakaf, sedekah, infak, hingga sistem waris. Semua dirancang bukan untuk memperkuat kepemilikan, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan menghidupkan kembali makna kolektif dari harta sebagai amanah.

Dengan demikian, ekonomi barokah bukan sekadar ekonomi alternatif; ia adalah ekonomi yang mengandung jiwa. Ia merestorasi relasi antar manusia melalui harta, menjadikan ekonomi sebagai wahana ibadah dan solidaritas, dan mengingatkan bahwa keberkahan sejati lahir dari memberi, bukan menimbun; dari berbagi, bukan menaklukkan. Inilah jalan spiritual yang menjadikan distribusi sebagai ibadah, dan keberkahan sebagai tujuan yang melampaui keuntungan materiil.

Keadilan dalam Islam tidak dibangun semata-mata melalui instrumen pajak progresif atau sistem negara kesejahteraan modern yang sering kali tersandera oleh birokrasi yang elitis dan tidak responsif. Sebaliknya, Islam meletakkan fondasi keadilan pada etika distribusi yang ditanamkan langsung ke dalam jalinan sosial umat bukan dari atas ke bawah, tetapi dari dalam ke luar. Ia digerakkan bukan oleh paksaan hukum positif, melainkan oleh kekuatan iman yang hidup dalam hati individu, serta partisipasi aktif masyarakat sipil yang tercerahkan oleh nilai-nilai ilahiyah.

Inilah yang disebut sebagai *keadilan spiritual* sebuah bentuk keadilan yang tidak bergantung pada instrumen koersif negara, tetapi tumbuh dari kesadaran batiniah yang mendalam akan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari penghambaan kepada Tuhan. Dalam kerangka ini, distribusi kekayaan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan perwujudan takwa yang terinternalisasi. Memberi bukan



karena harus, tetapi karena sadar bahwa harta adalah titipan, dan bahwa keberkahan hanya hadir saat harta itu dialirkan kepada yang berhak menerimanya.

Keadilan spiritual tidak menciptakan ketergantungan, tetapi memberdayakan. Ia tidak menumbuhkan relasi hierarkis antara pemberi dan penerima, tetapi memperkuat solidaritas horizontal di antara sesama manusia sebagai *khalifah* di bumi. Nilai-nilai seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan dimaknai semata sebagai transaksi amal, tetapi sebagai manifestasi komitmen teologis terhadap tatanan yang adil dan berkeadaban.

Dengan model ini, Islam menghadirkan satu bentuk keadilan yang tidak hanya efisien secara sosial, tetapi juga menyentuh akar spiritual manusia. Ia tidak bergantung pada intervensi negara yang kerap terjebak dalam logika administratif, melainkan pada keinsafan kolektif bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat dicapai jika hak-hak sosial dilindungi oleh kesadaran iman. Inilah wajah ekonomi profetik yang menyatukan struktur dan spiritualitas, dan yang menjadikan distribusi sebagai ibadah, bukan sekadar kebijakan.

Menurut M. Umer Chapra (2008), keunggulan sistem ekonomi Islam tidak terletak pada dominasi negara atau sentralisasi kebijakan semata, tetapi pada kemampuannya membangun *sinergi* antara kelembagaan dan kesalehan sosial. Dalam pandangannya, Islam menawarkan sebuah model di mana keadilan sosial-ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi merupakan hasil kolaboratif antara institusi dan individu, antara struktur formal dan etika komunitas. Keseimbangan inilah yang menjadikan sistem Islam unik: negara berperan, tetapi bukan sebagai aktor tunggal; masyarakat sipil turut menjadi motor penggerak kesejahteraan dan distribusi.

Chapra menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak semata-mata ditegakkan melalui regulasi negara yang dominan, melainkan melalui partisipasi masyarakat yang tercerahkan oleh nilai-nilai keimanan. Di sinilah pentingnya sistem *zakat* dan *wakaf* sebagai pilar distribusi yang tidak hanya legalistik, tetapi juga spiritual dan



sosiologis. Ketika zakat berfungsi secara optimal dan wakaf dikelola secara produktif, lahirlah ekosistem sosial yang tidak menunggu intervensi negara untuk menyelesaikan kemiskinan dan ketimpangan.

Dalam kerangka ini, tanggung jawab sosial tidak dimonopoli oleh negara, tetapi dibagikan secara kolektif kepada seluruh komponen umat. Individu tidak lagi dipandang sebagai entitas yang terisolasi, melainkan sebagai bagian dari jaringan solidaritas yang saling menopang. Institusi keagamaan, lembaga sosial, bahkan pelaku usaha, semuanya memiliki peran dalam menegakkan keadilan distributif dan keberkahan ekonomi.

Model ini mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai *distribusi berkeadaban* yakni distribusi yang didorong bukan hanya oleh kebijakan publik, tetapi juga oleh kesadaran spiritual dan komitmen etis masyarakat. Dengan demikian, Islam menghadirkan visi alternatif bagi dunia modern: sistem yang tidak terjebak pada dikotomi antara kapitalisme yang individualistik dan negara kesejahteraan yang birokratis, tetapi sebuah sintesis yang menjadikan iman, kelembagaan, dan solidaritas sosial sebagai fondasi keadilan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, distribusi dalam Islam bukan semata urusan teknis atau instrumen kebijakan, melainkan merupakan *penghayatan tauhid yang konkret* sebuah kesadaran eksistensial bahwa pemilik sejati segala kekayaan adalah Allah, dan manusia hanyalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelola serta menunaikan hak-hak sesama. Tauhid dalam konteks ini tidak berhenti pada pengakuan lisan, tetapi menuntut perwujudan nyata dalam tindakan sosial dan relasi ekonomi yang adil.

Ketika harta mengalir bukan karena tekanan hukum atau paksaan negara, tetapi karena dorongan iman dan keinsafan spiritual, maka ekonomi berhenti menjadi sekadar sistem fungsional; ia menjelma menjadi *sarana tazkiyah* penyucian jiwa dari sifat egoistik, rakus, dan eksploitatif. Inilah dimensi terdalam dari ekonomi barokah: ia tidak



hanya mengatur aliran kekayaan, tetapi juga membentuk karakter manusia dan memperhalus nuraninya.

Distribusi yang lahir dari iman menandai pergeseran paradigma: dari ekonomi sebagai arena perebutan sumber daya, menjadi ekonomi sebagai jalan *taqarrub* pendekatan diri kepada Tuhan melalui keadilan dan kasih sayang sosial. Dalam aliran harta yang penuh kesadaran itu, tersembunyi kekuatan pembebasan: pembebasan individu dari belenggu cinta dunia yang berlebihan, dan pembebasan masyarakat dari struktur ketimpangan yang mencederai martabat.

C. MODEL EKONOMI BERBASIS KOMUNITAS DAN KOPERASI

Dalam ekosistem ekonomi barokah, pembangunan tidak bergerak secara vertikal dan elitis dari atas ke bawah semata melainkan tumbuh secara *organik* dari akar rumput, dari komunitas yang terikat oleh nilai-nilai spiritual, empati sosial, dan tujuan kolektif yang luhur. Ini adalah paradigma pembangunan yang tidak menjadikan negara atau korporasi sebagai pusat, melainkan menjadikan *komunitas* sebagai titik gravitasi ekonomi komunitas yang hidup, terhubung, dan saling menopang dalam semangat keberkahan dan keadilan.

Model ini menantang logika pembangunan modern yang cenderung bersifat sentralistik dan bertumpu pada kekuatan kapital besar yang anonim dan terlepas dari konteks sosial. Sebaliknya, ekonomi barokah menegaskan pentingnya *relasi manusiawi* dalam struktur ekonomi: bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi harus bertolak dari relasi yang bermakna, bukan dari algoritma pasar yang tak bermoral. Di sinilah letak pentingnya membangun ekonomi dari komunitas dari masjid, pesantren, kelompok tani, koperasi, hingga jaringan mikro-keuangan yang terdesentralisasi.

Dalam kerangka ini, koperasi syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), komunitas pertanian kolektif, serta jaringan usaha yang berakar di masjid atau pesantren, bukan sekadar unit ekonomi dalam pengertian konvensional. Mereka adalah pusat-pusat keberkahan



(*mabârik*), tempat di mana ekonomi menyatu dengan etika, transaksi berpadu dengan kepercayaan, dan akuntabilitas dibimbing oleh nilai-nilai spiritual. Mereka berfungsi tidak hanya sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai simpul-simpul solidaritas sosial dan agen transformasi moral.

Pendekatan ini menumbuhkan *kemandirian kolektif*, memperkuat modal sosial, dan menghidupkan semangat gotong royong dalam kerangka syariah. Ia menyuburkan kesadaran bahwa pembangunan bukan tentang pertumbuhan semata, tetapi tentang pemulihan relasi antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan Tuhan. Inilah wujud nyata dari ekonomi yang *rahmatan lil 'alamin* sebuah ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga manusiawi, spiritual, dan membebaskan.

Dengan menjadikan komunitas sebagai episentrum, ekonomi barokah tidak hanya membangun kekuatan ekonomi yang tangguh, tetapi juga membentuk tatanan sosial yang lebih adil dan berdaya. Sebab di sinilah keberkahan bersemayam: di tengah kebersamaan, dalam etos berbagi, dan dalam kerja kolektif yang dilandasi oleh keimanan dan cinta kepada sesama.

Model ekonomi barokah tidak dibangun di atas obsesi terhadap efisiensi mekanistik atau maksimalisasi profit semata. Ia melampaui logika akuntansi konvensional, dan justru menempatkan relasi sebagai inti dari seluruh aktivitas ekonomi relasi yang manusiawi antara produsen, konsumen, dan alam sebagai ciptaan Tuhan yang tak boleh dieksploitasi secara serakah. Dalam ekosistem ini, kegiatan ekonomi bukan semata proses produksi dan pertukaran, melainkan wujud dari *mu'amalah* yang dibimbing oleh nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan.

Koperasi syariah adalah salah satu manifestasi nyata dari model ini. Berbeda dengan struktur korporasi kapitalistik yang cenderung menumpuk keuntungan pada segelintir pemilik modal, koperasi syariah mengedepankan prinsip partisipasi dan keadilan distributif. Keuntungan yang dihasilkan tidak dikonsentrasikan secara vertikal,



melainkan disebarluaskan kepada seluruh anggota dan masyarakat sekitar sebagai bentuk komitmen terhadap kemaslahatan bersama. Di sinilah terletak semangat *ta'āwun* (saling menolong) dan *'adālah* (keadilan) yang menjadi jiwa dari ekonomi Islam.

Model ini secara tegas menolak logika *trickle-down economics* gagasan bahwa kesejahteraan akan mengalir dari puncak piramida ekonomi ke lapisan bawah melalui mekanisme pasar. Sejarah dan kenyataan telah menunjukkan bahwa logika tersebut lebih banyak menciptakan ilusi daripada keadilan. Sebaliknya, ekonomi barokah menawarkan logika *bottom-up* yang berakar pada partisipasi aktif, distribusi langsung, dan pemihakan kepada yang lemah. Pertumbuhan dalam perspektif ini bukan hasil dari limpahan surplus, tetapi buah dari keterlibatan kolektif dan pemerataan kesempatan.

Berbeda dari model korporasi raksasa yang berorientasi pada akumulasi dan efisiensi tanpa batas sering kali dengan mengorbankan relasi sosial, etika lokal, dan keberlanjutan ekologis ekonomi komunitas berbasis koperasi syariah justru menjaga dan merawat akar kultural serta spiritual masyarakat. Ia tidak mencabut individu dari konteks sosialnya, melainkan menghidupkan kembali simpul-simpul solidaritas, kekerabatan, dan tanggung jawab kolektif yang berakar kuat dalam tradisi umat.

Dalam ekosistem ini, hubungan antar manusia tidak direduksi menjadi relasi antara produsen dan konsumen semata, melainkan dipahami sebagai *ukhuwah* ikatan persaudaraan yang dibingkai oleh nilai-nilai ilahiyah. Transaksi bukan sekadar pertukaran nilai tukar, melainkan bagian dari ibadah sosial; dan produksi tidak sekadar penciptaan komoditas, melainkan bentuk pengabdian kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama. Setiap aktivitas ekonomi menjadi bagian dari *mu'amalah* yang bermakna, di mana niat, kejujuran, dan keberkahan menjadi tolok ukur yang lebih dalam daripada sekadar margin keuntungan.

Lebih dari itu, koperasi syariah dan model ekonomi komunitas juga menghadirkan dimensi ekologis yang sangat penting: relasi



manusia dengan alam tidak diposisikan dalam kerangka dominasi atau eksploitasi, tetapi dalam semangat *amanah* dan *khilafah*. Bumi bukanlah objek yang diperas demi pertumbuhan ekonomi, melainkan ciptaan Tuhan yang harus dijaga, dihormati, dan diwariskan dalam keadaan baik kepada generasi berikutnya. Dalam skema ini, keberlanjutan bukan hanya tuntutan ekologis, tetapi juga perintah spiritual.

Ekonomi komunitas dalam kerangka barokah, dengan demikian, adalah ekonomi yang berjiwa. Ia bukan hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga membentuk kepribadian, memulihkan tatanan, dan menyuburkan cinta kasih antar manusia dan ciptaan. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi dan didorong oleh kapitalisme tanpa batas, model ini menghadirkan oase peradaban: ekonomi yang bersujud, bekerja, dan berbagi dalam satu tarikan napas yang memuliakan hidup.

Sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid Qutb dalam *Ma'ālim fi al-Ṭarīq*, keadilan sosial bukanlah hasil otomatis dari mekanisme ekonomi, melainkan buah dari keterpautan sistem ekonomi dengan nilai-nilai tauhid dan akhlak. Qutb menolak dengan tegas model pembangunan yang memisahkan antara kekuasaan ekonomi dan dimensi ruhani. Baginya, ketika ekonomi dilepaskan dari fondasi tauhid, ia tidak lagi menjadi alat pelayanan kepada umat manusia, melainkan berubah menjadi instrumen dominasi, ketimpangan, dan penyembahan terhadap kekuatan materi. Dalam kondisi inilah, pasar menjadi arena pertarungan yang kejam, dan manusia direduksi menjadi angka dalam statistik keuntungan.

Tauhid, dalam pandangan Qutb, bukan hanya konsep teologis, tetapi juga prinsip pembebasan sosial karena hanya dengan mengesakan Allah, manusia bebas dari penyembahan terhadap sistem, struktur, dan elite ekonomi yang menindas. Maka, dalam kerangka ini, ekonomi tidak boleh berdiri sebagai ruang yang otonom dari nilai ilahiyah; ia harus dijiwai oleh akhlak, ditopang oleh keadilan, dan diarahkan oleh visi kemanusiaan.



Model ekonomi komunitas hadir sebagai antitesis terhadap dehumanisasi yang lahir dari pasar bebas dan kapitalisme individualistik. Ia tidak tunduk pada logika profit semata, tetapi berpijak pada relasi sosial yang setara dan etika spiritual yang membebaskan. Dalam ekonomi komunitas yang berlandaskan nilai Islam, distribusi bukanlah residu dari pertumbuhan, tetapi tujuan integral dari aktivitas ekonomi. Di sinilah konsep *barokah* mengambil bentuk praksis: ketika ekonomi diletakkan kembali dalam orbit tauhid, dan ketika kekayaan tidak dibiarkan menumpuk, tetapi mengalir sebagai amanah yang menyejahterakan.

Dengan membangun ekonomi dari bawah melalui koperasi, jaringan usaha mikro, BMT, dan lembaga keuangan berbasis komunitas umat Islam menghidupkan kembali visi Qutb tentang masyarakat tauhidi: masyarakat yang tidak tunduk kepada kekuatan pasar atau elite kekuasaan, tetapi kepada prinsip keadilan ilahiyah yang hidup dalam struktur sosial dan batin individu. Maka, ekonomi komunitas bukan semata alternatif teknis, tetapi jalan ideologis dan spiritual untuk mengembalikan ekonomi kepada fungsinya yang sejati: sebagai *ibadah*, sebagai *amanah*, dan sebagai sarana pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan.

Lebih jauh, ekonomi komunitas dalam kerangka Islam dapat dipahami sebagai perpanjangan praksis dari *ukhuwah Islamiyah* persaudaraan yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga sosial dan ekonomis. Ia menumbuhkan rasa memiliki bersama, bukan sekadar atas hasil, tetapi atas proses, visi, dan tujuan hidup yang saling terikat. Dalam ekosistem semacam ini, ekonomi tidak lagi menjadi ruang persaingan yang memisahkan, melainkan ruang penyatuan yang meneguhkan ikatan sosial dan memperkuat tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan bersama.

Ekonomi komunitas menanamkan kesadaran bahwa keberhasilan sejati bukan terletak pada siapa yang menang dalam kompetisi pasar, tetapi pada sejauh mana semua orang dapat tumbuh dan bermartabat bersama. Ia menggeser logika "*survival of the fittest*" menjadi "*flourishing with the weakest*" yakni kemajuan yang diukur



dari bagaimana yang paling lemah pun ikut bergerak maju, bukan tersingkir.

Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi menjadi ruang bagi pertumbuhan *mahabbah* (cinta), *ta'awun* (tolong-menolong), dan *mas'uliyah* (tanggung jawab bersama). Produksi dan distribusi tidak sekadar mengejar nilai tukar, tetapi menjadi sarana membangun nilai hidup: keterhubungan, keberdayaan, dan keberkahan. Ekonomi komunitas menjadikan hubungan antar manusia lebih penting daripada barang, dan menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai kompas dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dengan ruh seperti itu, ekonomi tidak lagi menjadi mesin tanpa wajah, melainkan wajah dari peradaban itu sendiri. Ia menjadi *rahmatan lil 'alamin* rahmat bagi seluruh alam karena ia tidak hanya produktif dan efisien, tetapi juga inklusif, beretika, dan berpihak kepada keberlanjutan hidup manusia dan lingkungan. Ia memuliakan manusia bukan karena kemampuannya menguasai, tetapi karena kesanggupannya untuk merawat, berbagi, dan mencintai.

Ekonomi komunitas, dalam pengertian ini, bukan sekadar sistem alternatif, tetapi jalan spiritual yang menumbuhkan harapan dan membangun peradaban yang lebih manusiawi dan ilahiyah. Sebuah ekonomi yang tak sekadar mencetak angka, tapi menumbuhkan makna.

D. KRITIK TERHADAP NEOLIBERALISME DARI PERSPEKTIF BAROKAH

Neoliberalisme adalah nalar dominan yang telah membentuk lanskap ekonomi global kontemporer, menjelma menjadi paradigma hegemonik yang merasuki kebijakan publik, wacana pembangunan, hingga cara manusia memaknai kemajuan. Ia menjanjikan kemakmuran dan efisiensi melalui privatisasi aset publik, deregulasi pasar, serta supremasi mekanisme persaingan bebas. Dalam retorikanya, kebebasan ekonomi dianggap identik dengan kebebasan



manusia, dan pasar diyakini sebagai arena netral yang mampu mengatur dirinya sendiri secara optimal.

Namun di balik janji kemajuan tersebut, neoliberalisme meninggalkan jejak luka yang dalam dan sistemik. Ia telah melahirkan kemiskinan struktural yang bukan disebabkan oleh kemalasan individu, tetapi oleh tatanan yang secara sistematis menyingkirkan yang lemah dari akses atas sumber daya. Ketimpangan ekstrem menjadi konsekuensi logis dari akumulasi yang tak terkendali; dehumanisasi relasi sosial muncul ketika manusia dilihat bukan sebagai subjek bermartabat, tetapi sebagai instrumen produksi dan konsumsi. Dalam sistem ini, nilai-nilai kemanusiaan direduksi menjadi komoditas yang diperjualbelikan, dan bumi tak lebih dari ladang eksploitasi yang diserahkan pada logika kapital.

Lebih dari sekadar sistem ekonomi, neoliberalisme adalah ideologi yang membentuk watak zaman menggeser orientasi hidup dari kebersamaan menuju kompetisi, dari kepedulian menuju efisiensi, dari keberkahan menuju keuntungan. Ia tidak hanya mempengaruhi kebijakan, tetapi juga cara manusia memahami relasi sosial, spiritualitas, bahkan makna diri. Dalam dunia yang dikuasai oleh nalar pasar, solidaritas dianggap utopis, dan keadilan sosial ditunda atas nama pertumbuhan.

Kritik terhadap neoliberalisme bukan hanya kritik atas kebijakan, tetapi juga atas krisis nilai. Ini adalah krisis yang merobek jalinan kehidupan: mengasingkan manusia dari sesamanya, dari alam, dan dari Tuhannya. Maka, yang dibutuhkan bukan sekadar reformasi teknokratis, melainkan transformasi paradigma pengembalian ekonomi kepada nilai-nilai ilahiyah dan kemanusiaan. Dalam konteks inilah ekonomi barokah menawarkan jalan alternatif: bukan dengan menegasikan kebebasan, tetapi dengan memaknai kebebasan dalam kerangka tanggung jawab; bukan dengan menolak pasar, tetapi dengan menundukkannya pada etika; bukan dengan menumbuhkan tanpa batas, tetapi dengan membangun yang berkelanjutan dan berkeadilan.



Ekonomi yang manusiawi tidak lahir dari logika akumulasi tanpa kendali, tetapi dari kesadaran akan keterhubungan kita satu sama lain dan dengan bumi tempat kita berpijak.

Di sinilah ekonomi barokah hadir bukan sekadar sebagai sistem alternatif, tetapi sebagai kritik mendalam ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap arsitektur neoliberalisme:

Secara ontologis, ekonomi barokah berakar pada pandangan bahwa harta bukanlah milik absolut manusia, melainkan amanah Ilahi yang menuntut tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Islam menolak asumsi kapitalistik yang mendewakan kepemilikan individual sebagai hak eksklusif dan tak terbatas. Dalam paradigma tauhid, semua kekayaan adalah milik Allah semata, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: *"Berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu."* (QS. An-Nur [24]: 33).

Manusia, dalam hal ini, bukanlah pemilik dalam pengertian metafisik, melainkan **khalifah** pengelola dan penjaga. Harta tidak hadir untuk dieksploitasi demi kepentingan egoistik, tetapi untuk dimanfaatkan dengan penuh hikmah dan keadilan, demi kemaslahatan bersama. Sebagaimana ditegaskan oleh al-Ghazali, *"Hakikat kekayaan bukanlah kepemilikan, tetapi tanggung jawab untuk digunakan pada tempat yang diridhai Allah."*

Dari sudut pandang ini, kepemilikan bukanlah tujuan, tetapi instrumen spiritual. Kekayaan sejati tidak terletak pada akumulasi, tetapi pada kebermanfaatan. Maka muncul prinsip barokah sebagai cahaya ilahiyah yang melingkupi harta: sedikit tapi mencukupi, terbatas namun menumbuhkan, tak mewah namun menyejukkan. Keberkahan bukan terletak pada jumlah, tetapi pada *niat*, *cara memperolehnya*, dan *bagaimana ia dialirkan* kepada sesama.

Lebih jauh, konsep ini sejalan dengan ontologi maqāsid al-sharī'ah, di mana harta (*māl*) dilindungi bukan semata demi kepentingan individual, tetapi untuk mendukung lima tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu sendiri dalam konteks sosial dan kolektif. Oleh karena itu, sistem ekonomi



yang barokah tidak akan membiarkan harta menumpuk di segelintir tangan, sebab dalam perspektif Ilahiyah, *harta yang tidak mengalir adalah fitnah, bukan nikmat.*

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka azab yang pedih.” (QS. At-Taubah [9]: 34)

Maka jelas, ekonomi barokah bukan hanya sistem transaksi, tetapi tatanan nilai. Ia membangun peradaban yang tidak bertumpu pada pemilikan, tetapi pada kebermaknaan; tidak pada ego, tetapi pada tanggung jawab; tidak pada angka, tetapi pada keberkahan. Dalam dunia yang kian kehilangan arah karena gempuran materialisme, ekonomi barokah hadir sebagai etika alternatif mengembalikan manusia pada fitrahnya: sebagai makhluk yang dititipi, bukan menguasai; sebagai pelayan kehidupan, bukan perusaknya.

Secara epistemologis, neoliberalisme menjadikan pasar sebagai pusat pengetahuan ia bukan sekadar mekanisme distribusi, tetapi telah diangkat menjadi epistemologi tunggal yang menentukan nilai, kebenaran, dan arah kebijakan. Dalam kerangka ini, keputusan ekonomi dianggap objektif jika sejalan dengan logika pasar: efisiensi, profitabilitas, dan pertumbuhan. Kebenaran diukur oleh respons pasar, bukan oleh keadilan sosial atau nilai spiritual. Sebagaimana dikritik oleh Wendy Brown (2015), neoliberalisme telah mereduksi segala aspek kehidupan pendidikan, kesehatan, bahkan solidaritas ke dalam logika kapital dan komodifikasi.

Sebaliknya, dalam epistemologi ekonomi barokah, pusat pengetahuan bukanlah pasar, melainkan tauhid. Tauhid bukan sekadar doktrin metafisik, tetapi fondasi epistemologis yang menuntun bagaimana manusia memahami dunia, merumuskan nilai, dan mengambil keputusan. Dalam paradigma ini, ekonomi tidak bersifat otonom dari agama, melainkan menjadi bagian dari laku penghambaan kepada Allah (*ubūdiyyah*). Ilmu ekonomi tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai etik, karena dalam Islam, *ilmu adalah*



amanah yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan, bukan sekadar menjelaskan gejala pasar.

Paradigma ini menolak ilusi netralitas dalam keputusan ekonomi. Setiap keputusan ekonomi dari pilihan konsumsi hingga rancangan kebijakan fiskal selalu melibatkan nilai, dan karenanya harus diarahkan pada *maqāṣid al-sharī'ah*: menjaga kehidupan, akal, keturunan, harta, dan agama. Dalam ekonomi barokah, pertanyaan pokok bukan hanya “Apakah ini menguntungkan?”, tetapi “Apakah ini membawa manfaat kolektif dan diridhai Allah?”

Sebagaimana ditegaskan oleh M. Umer Chapra, “Islamic economics must be value-based, not value-neutral. It cannot ignore the ethical and social implications of economic decisions” (Chapra 1992).

Dengan menjadikan tauhid sebagai landasan epistemologis, ekonomi barokah tidak hanya menghadirkan sistem alternatif secara teknis, tetapi membangun cara berpikir yang berbeda secara radikal. Ia mengajukan bahwa sumber pengetahuan tertinggi bukanlah mekanisme pasar yang fluktuatif, melainkan wahyu, akal yang tercerahkan oleh nilai, dan pengalaman sosial yang direfleksikan secara spiritual.

Lebih dari itu, epistemologi tauhid menuntut kesadaran interdependensi antara manusia, alam, dan Tuhan. Pengetahuan tidak untuk mengontrol dan mengeksploitasi, tetapi untuk mengenali batas, mengembangkan tanggung jawab, dan mengabdikan. Di sinilah letak perbedaan paling mendasar dengan neoliberalisme: jika neoliberal berpijak pada homo economicus yang rasional dan egoistik, maka ekonomi barokah berpijak pada insān kāmil manusia yang menyatu antara akal, hati, dan iman.

Secara aksiologis, neoliberalisme menjadikan profit sebagai nilai tertinggi dalam seluruh aktivitas ekonomi. Ukuran keberhasilan bukanlah keberlanjutan hidup bersama, melainkan pertumbuhan finansial yang dapat diukur secara statistik bahkan jika capaian itu dibayar dengan kerusakan ekologis, eksploitasi tenaga kerja,



atau marginalisasi komunitas rentan. Prinsip aksinya sederhana namun kejam: *maximize returns, minimize costs* termasuk dengan memangkas etika dan merelatifkan kebaikan. Dalam kerangka ini, nilai (value) direduksi menjadi harga (price); yang tidak menghasilkan keuntungan dianggap tidak bernilai.

Ekonomi barokah membalikkan paradigma ini secara radikal. Ia tidak memulai dari pertanyaan “berapa untungnya?”, tetapi “seberapa besar manfaat dan keberkahannya?” Dalam Islam, tujuan ekonomi bukan sekadar akumulasi, tetapi distribusi yang adil dan penggunaan yang bertanggung jawab. Tujuan utama bukanlah *maximum profit*, melainkan keberkahan (barokah) yakni kebaikan yang meluas, adil, dan lestari. Barokah adalah nilai spiritual yang tidak selalu hadir dalam angka, tetapi terasa dalam keberlangsungan hidup, ketenangan batin, dan kesalingan sosial yang terjaga.

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa “kemaslahatan ekonomi harus berakar pada maqāsid al-sharī‘ah: menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta” (al-Ghazali, al-Mustashfa). Artinya, nilai tertinggi dari aktivitas ekonomi adalah mendekatkan manusia pada Tuhan, memperkuat komunitas, dan menjaga keberlangsungan ciptaan.

Dalam kerangka ini, barokah tidak ditentukan oleh volume, tetapi oleh substansi dan dampaknya. Rezeki yang sedikit tetapi halal dan dibagikan kepada yang membutuhkan lebih utama daripada kekayaan besar yang lahir dari penindasan. Keberkahan lahir dari integritas spiritual, kejujuran transaksional, solidaritas sosial, dan kepedulian ekologis.

Sebaliknya dari logika kapitalisme yang memisahkan etika dari ekonomi, ekonomi barokah menggabungkan keuntungan dengan kebaikan, produktivitas dengan kasih sayang, dan pertumbuhan dengan keadilan. Setiap transaksi adalah ruang ibadah, bukan semata-mata instrumen pasar. Setiap laba diuji bukan hanya oleh pasar, tetapi oleh nilai ilahiyah dan kemanfaatan sosial.



Ekonomi yang tidak menghadirkan rahmah (kasih), 'adl (keadilan), dan hikmah (kebijaksanaan) adalah ekonomi yang kehilangan makna. Maka, barokah menjadi horizon etik yang membimbing ekonomi agar tetap berpijak pada fitrah manusia dan semesta.

Seperti dinyatakan oleh Zubair Hasan (2011), *Islamic economics rejects utility maximization as the ultimate aim and instead centers around value-based utility and collective wellbeing*. Artinya, Islam menolak logika homo economicus manusia serakah yang bertindak demi kepentingan diri semata dan menggantikannya dengan insan muttaqin: manusia yang beriman, adil, dan memandang kekayaan sebagai sarana untuk berbagi, bukan menumpuk.

Lebih jauh, ekonomi barokah menolak netralitas palsu pasar, karena pasar selalu berpihak: pada yang kuat, pada yang punya modal, pada yang bisa menguasai narasi. Ekonomi barokah justru berpihak secara tegas pada yang lemah, yang tertindas, dan yang terpinggirkan (mustadh'afin). Pasar bukan tuan, tapi pelayan keadilan.

Dalam era ketika neoliberalisme telah membentuk manusia sebagai makhluk yang terus bekerja namun kehilangan makna; terus mengonsumsi namun merasa kosong; ekonomi barokah menyerukan pemulihan spiritualitas dalam ekonomi. Ia menanamkan kembali nilai welas asih dalam transaksi, kejujuran dalam produksi, dan keberpihakan dalam distribusi.

Ekonomi barokah bukan nostalgia masa lalu, tetapi visi profetik masa depan di mana ekonomi bukan instrumen eksklusif, melainkan jembatan cinta kasih antara manusia dan sesamanya, antara manusia dan bumi, antara manusia dan Tuhan.

Ekonomi barokah bukanlah jalan sunyi yang berhenti pada kontemplasi individual atau ritual spiritual yang terputus dari realitas sosial. Ia adalah sistem hidup yang menyatu dengan denyut kehidupan umat, sebuah jalan pembebasan yang berakar pada keimanan dan berbuah dalam perjuangan nyata melawan ketidakadilan. Dalam paradigma ini, keberkahan bukan dinilai dari jumlah kekayaan



yang dikumpulkan, tetapi dari seberapa jauh kekayaan itu mampu menghidupkan yang lemah, menguatkan yang tertindas, dan menyatukan kembali manusia dengan nilai-nilai luhur ketauhidan.

Ekonomi barokah adalah bentuk perlawanan halus namun mendalam terhadap sistem yang menormalisasi kesenjangan, membudayakan keserakahan, dan memperlakukan bumi sekadar sebagai objek eksploitasi. Ia menolak asumsi bahwa ketimpangan adalah keniscayaan, atau bahwa kekayaan adalah tanda keberkahan tanpa memperhitungkan bagaimana ia diperoleh dan digunakan. Ia mengingatkan bahwa dalam logika langit, yang kaya belum tentu diberkahi, dan yang miskin belum tentu hina.

Sebaliknya, ekonomi barokah memanggil lahirnya sebuah sistem alternatif sebuah tatanan yang memuliakan manusia sebagai makhluk bermartabat, bukan sekadar alat produksi atau target pasar. Ia memuliakan alam sebagai ciptaan Ilahi, bukan sekadar sumber daya. Dan di atas segalanya, ia memuliakan Allah sebagai Pemilik Segala, sehingga segala aktivitas ekonomi menjadi bagian dari ibadah, bukan pemisahan antara dunia dan akhirat.

Dalam ekonomi barokah, pembangunan bukan diukur dari pertumbuhan statistik belaka, melainkan dari pertumbuhan nurani kolektif, dari meningkatnya rasa tanggung jawab sosial, dan dari mengalirnya rahmat dalam kehidupan bersama. Inilah jalan tengah antara langit dan bumi, antara spiritualitas dan struktur, antara cinta dan keadilan.



BAB 7

EKONOMI BAROKAH DI ERA KONSUMERISME DAN DIGITALISASI

Kita hidup di tengah arus zaman yang dijejali oleh barang, gambar, dan janji kebahagiaan instan. Era digital, dengan segala efisiensi dan inovasinya, telah membuka gerbang peluang tanpa batas. Namun bersamaan dengan itu, ia juga melahirkan *budaya konsumerisme digital* di mana nilai diri diukur dari jumlah suka, eksistensi ditentukan oleh algoritma, dan makna hidup terkikis oleh kecepatan scroll. Dalam lanskap ini, ekonomi tak lagi semata soal pemenuhan kebutuhan, melainkan menjadi arena hasrat yang terus diperangkap, dijanjikan, dan diperdagangkan. Hasrat tidak lagi jujur, ia direkayasa. Kebutuhan tidak lagi mendasar, tetapi ditanamkan secara sistematis oleh logika pasar yang menyaru sebagai kebebasan.

Ekonomi barokah hadir sebagai koreksi etis sekaligus spiritual atas kegamangan modern ini. Ia bukan nostalgia terhadap masa lalu, atau utopia yang memusuhi kemajuan. Justru sebaliknya: ia adalah *tawaran jalan tengah* yang menerima teknologi, tetapi menolak dehumanisasi; yang memanfaatkan digital, namun dengan kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial.



Ekonomi barokah tidak menolak konsumsi, tetapi mengubahnya dari gaya hidup impulsif menjadi laku hidup penuh syukur. Ia tidak anti-pasar, tetapi menolak pasar yang menjajah jiwa. Ia mengajak kita untuk berbelanja dengan hati nurani, bekerja dengan niat ibadah, dan memproduksi dengan kesadaran ekologis. Dalam kerangka ini, ekonomi bukan sekadar transaksi, tetapi *transformasi* dari ego ke empati, dari ilusi ke makna, dari eksistensi palsu menuju keutuhan diri.

Dalam dunia yang dibanjiri kecepatan dan kebisingan, ekonomi barokah menyerukan jeda. Jeda untuk mengingat bahwa kita bukan sekadar pengguna, tetapi khalifah; bahwa kita bukan sekadar angka statistik, tetapi jiwa-jiwa yang mencari keberkahan. Ia mengajarkan bahwa rezeki bukan sekadar yang masuk ke rekening, tetapi yang menumbuhkan kedamaian dan kebermanfaatan.

A. KRISIS MAKNA DAN ILUSI KEBAHAGIAAN DALAM BUDAYA KONSUMSI

Dalam lanskap ekonomi kontemporer yang dibentuk oleh logika kapitalisme lanjut dan budaya visual digital, konsumsi telah melampaui fungsi dasarnya sebagai pemenuhan kebutuhan fisik. Ia tidak lagi sekadar soal bertahan hidup atau kenyamanan material, melainkan telah menjelma menjadi sarana ekspresi identitas, pencarian status sosial, bahkan konstruksi makna eksistensial. Konsumsi hari ini adalah *teater simbolik*, di mana manusia modern tidak membeli karena perlu, tetapi karena ingin menjadi seseorang yang lebih diinginkan, lebih diterima, lebih terlihat.

Dalam masyarakat spekulatif ini, yang dikonsumsi bukanlah benda dalam makna materialnya, melainkan *narasi* tentang siapa diri mereka, siapa yang mereka dambakan menjadi, dan bagaimana mereka ingin dipersepsi oleh dunia. Barang bukan lagi alat, melainkan *simbol*. Merek menjadi bahasa, gaya hidup menjadi pernyataan identitas, dan pilihan konsumsi menjadi isyarat tentang kelas, selera, bahkan nilai moral.



Dengan demikian, konsumsi hari ini bekerja sebagai *mekanisme eksistensial* yang mengisi kekosongan makna di tengah pudarnya komunitas, spiritualitas, dan nilai-nilai luhur. Ia menawarkan ilusi tentang kebahagiaan dan keutuhan diri, sekaligus menjerumuskan manusia dalam siklus tanpa akhir dari keinginan yang dikonstruksi dan direproduksi terus-menerus oleh sistem pasar dan media. Di sinilah pasar mengambil alih peran agama, pendidikan, dan tradisi: ia mendikte makna hidup, membentuk hasrat, dan mengarahkan orientasi jiwa.

Fenomena ini mencerminkan krisis spiritual yang dalam: ketika manusia menjauh dari pusat keberadaan yang hakiki dari Tuhan, dari komunitas, dan dari jati diri yang otentik lalu mencari pengganti dalam hal-hal yang fana dan permukaan. Konsumsi menjadi ibadah baru, mall menjadi katedral modern, dan citra menjadi lebih penting dari hakikat.

Ekonomi barokah, dalam konteks ini, menawarkan jalan pembebasan. Ia mengingatkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki, tetapi oleh siapa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Bahwa konsumsi harus diarahkan oleh kesadaran spiritual dan etika sosial, bukan oleh hasrat yang dikendalikan algoritma pasar. Bahwa kebahagiaan bukan terletak pada memiliki lebih banyak, tetapi pada memberi, berbagi, dan merasa cukup.

Dengan mengembalikan ekonomi kepada nilai-nilai tauhid, keberkahan, dan kesederhanaan, ekonomi barokah bukan hanya menata ulang distribusi kekayaan, tetapi juga menyembuhkan jiwa dari eksekse konsumsi yang menyesatkan. Sebuah ajakan untuk keluar dari jerat *consumerism as identity*, menuju hidup yang lebih jujur, merdeka, dan bermakna.

Jean Baudrillard (1998) menegaskan bahwa dalam masyarakat konsumen modern, manusia tidak lagi mengonsumsi objek dalam makna material atau fungsionalnya, melainkan *tanda-tanda* simbol dan citra yang dikonstruksi oleh logika media dan kapitalisme representasional. Dunia konsumsi tidak lagi berurusan dengan



kebutuhan riil, tetapi dengan *simulakra*: representasi semu yang meniru realitas, tetapi tidak memiliki rujukan esensial. Dalam masyarakat seperti ini, konsumsi menjadi proses *pemaknaan sosial*, bukan pemenuhan kebutuhan biologis.

Sepasang sepatu, dalam kerangka ini, tidak lagi sekadar alas kaki, tetapi simbol gaya hidup, status budaya, bahkan afiliasi ideologis. Sebuah ponsel bukan hanya alat komunikasi, melainkan penanda kelas, gengsi, dan eksistensi sosial. Manusia modern mengonsumsi bukan benda, tetapi *identitas* yang melekat pada benda tersebut. Konsumsi menjadi bahasa status, dan benda-benda menjadi kosakata dalam gramatika sosial kapitalisme global.

Yang terjadi, sebagaimana dikritik Baudrillard, adalah *fetisisme tanda* manusia tidak lagi menginginkan barang karena manfaatnya, tetapi karena citra yang dikandungnya. Maka, konsumsi menjadi ritual, dan manusia berubah dari *homo sapiens* menjadi *homo symbolicus* makhluk yang diperintah oleh simbol. Dalam sistem ini, manusia tidak hanya menjadi produsen dan konsumen, tetapi juga *budak tanda* yang terus-menerus dikejar oleh logika pencitraan dan pembentukan diri yang tak pernah tuntas.

Dari perspektif Islam, fenomena ini mencerminkan keterputusan manusia dari nilai *tauhid* yakni kesadaran bahwa nilai dan martabat manusia tidak ditentukan oleh citra dunia, tetapi oleh hubungan eksistensialnya dengan Tuhan. Konsumerisme simbolik mengaburkan batas antara kebutuhan dan keinginan, antara nilai sejati dan nilai yang direkayasa. Ia menggoda manusia untuk mengejar *kesan* daripada *hakikat*, *tampilan* daripada *makna*.

Ekonomi barokah hadir sebagai respons kritis atas krisis ini sebagai upaya mengembalikan manusia pada kesadaran spiritual bahwa konsumsi harus dibimbing oleh *hikmah*, bukan oleh hasrat yang direkayasa pasar. Dalam kerangka ini, konsumsi bukan sarana eksistensial palsu, melainkan bagian dari *ibadah* dan *tanggung jawab moral*. Ia harus berakar pada kesederhanaan, kebermanfaatan, dan



keadilan sosial, bukan pada fantasi sosial yang terus diulang oleh algoritma media.

Dengan membebaskan manusia dari tirani tanda, ekonomi barokah mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak dibeli, melainkan dijalani; bahwa harga bukan ukuran nilai; dan bahwa kemuliaan tidak terletak pada label, tetapi pada keberkahan. Sebuah kritik terhadap dunia yang menyanjung ilusi, dan sekaligus tawaran menuju hidup yang lebih jernih, utuh, dan bermakna.

Namun di balik gemerlap citra kemajuan dan narasi keberhasilan ekonomi, statistik global menyuarakan kegelisahan yang dalam. *World Happiness Report* (2024) menunjukkan paradoks yang mencolok: negara-negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi justru mengalami peningkatan signifikan dalam angka depresi, kecemasan, dan krisis makna hidup. Indikator material terus melonjak, namun indikator batin justru merosot. Di tengah keberlimpahan fisik, manusia modern justru terjebak dalam kekosongan spiritual.

Data ini menjadi cermin retak dari janji neoliberalisme dan kapitalisme konsumtif yang mengidentikkan kesejahteraan dengan daya beli, dan mengukur kebahagiaan melalui indeks konsumsi. Namun kenyataannya, ketersediaan materi tidak otomatis melahirkan ketenangan batin. Kekayaan tidak menjamin kedamaian, dan pilihan yang melimpah tidak selalu berarti kebebasan sejati. Masyarakat dijejali oleh opsi, namun kehilangan arah; dikelilingi oleh barang, tetapi merasa hampa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis zaman ini bukan semata krisis distribusi atau produktivitas, melainkan krisis makna *crisis of meaning*. Ketika hidup didefinisikan oleh apa yang dimiliki, bukan oleh siapa diri kita dan untuk apa kita hidup, maka kebahagiaan menjadi semu dan rapuh. Dalam lanskap seperti ini, kebisingan iklan menggantikan perenungan, dan keheningan batin tergantikan oleh hiruk-pikuk pencitraan.

Ekonomi barokah merespons krisis ini dengan mengusulkan pemulihan paradigma: bahwa kesejahteraan sejati tidak hanya berakar



pada pemenuhan jasmani, tetapi juga pada keterhubungan spiritual dengan Tuhan, sesama, dan alam. Ia mengembalikan kebahagiaan pada dimensi transenden, bukan sekadar pada kepemilikan. Ia mengajarkan bahwa *kecukupan* lebih mulia daripada *kelimpahan*, dan bahwa keberkahan lebih utama daripada akumulasi.

Dalam kerangka ini, ekonomi tidak lagi menjadi sarana untuk membuktikan diri, tetapi medan untuk memperhalus diri. Bukan tempat menunjukkan keunggulan, tetapi ruang untuk menumbuhkan kebersamaan dan kedamaian. Di tengah dunia yang makin canggih namun gelisah, ekonomi barokah menawarkan bukan hanya solusi sistemik, tetapi juga pelipur jiwa jalan kembali menuju hidup yang lebih tenang, bermakna, dan berserah.

Dalam tradisi Islam, fenomena kehampaan di balik keberlimpahan materi ini telah lama diantisipasi dan dikritik secara tegas. Al-Qur'an memperingatkan bahwa harta yang dikumpulkan tanpa kesadaran akan hakikat keberkahan sebagai amanah Ilahi dan sarana kebaikan sosial akhirnya akan berujung pada kehampaan dan kehancuran jiwa. Allah SWT berfirman: *"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya."* (QS. Al-Humazah: 1-3)

Ayat ini bukan sekadar kritik moral terhadap keserakahan individu, melainkan peringatan ontologis tentang ketergantungan manusia pada benda fana yang dipuja seolah abadi. Harta yang dikoleksi tanpa makna dan tanggung jawab, yang hanya diukur dalam angka dan kuantitas, tidak mampu menjadi sumber kebahagiaan sejati. Sebaliknya, ia menjadi penyebab kehancuran dan kesesatan, karena menyesatkan manusia dari hakikat hidup yang sesungguhnya yakni pengabdian kepada Tuhan dan pemeliharaan terhadap sesama.

Dalam konteks modern, ayat ini relevan sebagai teguran tajam terhadap budaya konsumerisme yang merayakan akumulasi tanpa batas dan mengaburkan makna keberkahan. Ia mengingatkan bahwa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana yang harus dikelola



dengan penuh kesadaran spiritual dan etika sosial. Tanpa kesadaran ini, kekayaan hanyalah ilusi kekuatan yang rapuh dan sumber kerusakan.

Dengan demikian, ekonomi barokah memandang keberkahan sebagai inti dari setiap aktivitas ekonomi sebuah nilai transenden yang mengikat antara dunia dan akhirat, materi dan ruhani, individu dan masyarakat. Harta harus menjadi kendaraan untuk mewujudkan keadilan, kasih sayang, dan kebaikan bersama, bukan alat untuk mengekang manusia dalam lingkaran kehampaan yang sia-sia.

Melalui pemahaman dan praktik seperti ini, ekonomi bukan lagi sekadar soal angka dan barang, tetapi perjalanan spiritual yang menuntun manusia menuju kehidupan yang bermakna, damai, dan penuh rahmat.

Konsep *barokah* menawarkan koreksi spiritual yang mendalam terhadap krisis kehampaan dan ketimpangan yang melanda dunia modern. Ia menegaskan bahwa nilai sejati dari *rezeki* baik berupa materi, kesempatan, maupun karunia hidup tidak terletak pada kuantitas atau kemewahannya, melainkan pada kualitas dampaknya terhadap jiwa dan hubungan sosial. Apakah rezeki itu menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran akan ketergantungan kepada Sang Pemberi, atau malah memicu kerakusan dan keserakahan yang merusak?

Barokah bukan sekadar kemasan luar yang mempercantik kekayaan, tetapi makna yang mengalir dari kesadaran batin yang mendalam. Ia adalah keberlimpahan yang dirasakan *overflowing abundance* meskipun tidak selalu tampak dalam bentuk harta atau angka statistik. Barokah menjadikan setiap nikmat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat ikatan kasih sayang dengan sesama, bukan sebagai alat untuk menimbun dan mengasingkan diri dari realitas sosial.

Dalam paradigma ekonomi barokah, keberlimpahan diukur bukan oleh seberapa banyak yang dimiliki, tetapi oleh seberapa luas manfaat yang disebarkan. Harta yang diberkahi adalah harta yang mengalir menghidupi, menyuburkan, dan memulihkan. Ia



membebaskan manusia dari jeratan ketamakan dan keterasingan, membawa mereka ke dalam ruang spiritual di mana ekonomi menjadi sarana pengabdian, bukan arena perebutan kekuasaan.

Dengan demikian, barokah mengubah cara pandang manusia terhadap materi dan kekayaan: dari sekadar objek konsumsi menjadi tanda rahmat ilahi dan tanggung jawab sosial. Ia mengajak manusia untuk hidup dengan kesadaran penuh, bahwa setiap rezeki adalah amanah yang harus dijaga, dibagikan, dan disyukuri sebagai manifestasi hidup yang berkelanjutan dan penuh makna.

Di tengah dunia yang semakin mengaburkan batas antara harga dan nilai, yang mengidolakan kecepatan sebagai tolok ukur prestasi, ekonomi barokah memanggil kita untuk kembali pada keutuhan jiwa dan kedalaman makna hidup. Ia mengajak kita berani melampaui ilusi keserakahan dan konsumsi tanpa batas dengan hidup sederhana namun bermakna hidup yang dipenuhi kesadaran tinggi akan asal-muasal segala rezeki dan tanggung jawab sosial yang melekat padanya.

Ekonomi barokah menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak berakar pada jumlah kepemilikan atau gemerlap materi, melainkan pada keterhubungan yang mendalam keterhubungan dengan Tuhan sebagai sumber segala keberkahan, dengan sesama sebagai mitra dalam perjalanan hidup, dan dengan bumi sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang. Dalam kerangka ini, hidup sederhana bukan sekadar pilihan ekonomis, tetapi sikap spiritual yang menuntun pada keseimbangan dan harmoni antara kebutuhan, rasa syukur, dan keadilan.

Dengan demikian, ekonomi barokah bukan hanya sistem ekonomi alternatif, tetapi seruan moral dan spiritual yang mengingatkan kita akan esensi kemanusiaan dan tujuan hidup yang hakiki. Ia menantang kita untuk merefleksikan ulang makna sukses dan kesejahteraan, menolak kultur konsumsi berlebihan, dan menempatkan nilai-nilai ilahiyah serta keberlanjutan sebagai pijakan utama dalam setiap langkah kehidupan. Sebuah panggilan untuk hidup yang lebih utuh,



beradab, dan bermakna di tengah dunia yang serba cepat dan penuh gemerlap.

B. ALGORITMA, IKLAN, DAN EKSPLOITASI HASRAT

Era digital tidak hanya merevolusi cara kita terhubung dan berinteraksi dengan dunia melalui kecepatan dan kelancaran akses informasi, tetapi juga melahirkan pergeseran kekuasaan yang halus dan tak kasatmata. Kita hidup di bawah rezim kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*), di mana data personal mulai dari setiap klik, durasi tatapan layar, hingga pola tidur dan kebiasaan sehari-hari dikumpulkan, dianalisis, dan dikomodifikasi menjadi instrumen prediksi serta pengendalian perilaku konsumsi.

Seperti yang diungkapkan Shoshana Zuboff (2019) dalam *The Age of Surveillance Capitalism*, “Di balik layar ponsel yang terang, ada pasar yang gelap: pasar perhatian dan emosi manusia.” Pasar ini tidak hanya memanen data, melainkan mengkapitalisasi aspek paling intim dari eksistensi manusia perhatian dan emosi mengubahnya menjadi komoditas yang diperjualbelikan demi keuntungan korporasi raksasa.

Fenomena ini bukan sekadar tantangan teknologi, melainkan juga krisis etika dan eksistensial yang mendalam. Dalam sistem ini, kebebasan individu yang seharusnya menjadi hak asasi terancam berubah menjadi ilusi, ketika perilaku dan pilihan kita dikendalikan oleh algoritma yang merancang kebutuhan dan keinginan kita sebelum kita sadari sendiri. Era digital, dengan segala potensinya, menghadirkan tantangan baru bagi kemanusiaan: bagaimana mempertahankan otonomi, martabat, dan makna hidup di tengah dominasi kapitalisme yang merebut ruang privat jiwa dan pikiran.

Algoritma bukanlah entitas netral yang berjalan tanpa agenda; ia adalah produk desain manusia dengan tujuan yang sangat spesifik bukan untuk memberdayakan kebebasan individu, melainkan untuk menciptakan ketergantungan yang sistemik. Algoritma dirancang bukan demi kesejahteraan manusia, tetapi untuk mengubah setiap hasrat dan kebutuhan menjadi peluang konversi laba.



Iklan digital yang tampak personal dan relevan itu sesungguhnya adalah hasil dari pengintaian massal yang masif, di mana data dan perilaku manusia dikuliti hingga terbuka celah-celah psikologis yang paling rapuh. Dengan cermat, algoritma membangkitkan rasa kurang, ketidakpuasan, dan kecemasan yang terus menerus, membentuk ilusi bahwa kebahagiaan atau kepuasan sejati hanya tinggal satu klik lagi yang hanya akan terwujud lewat konsumsi berikutnya.

Dalam ranah ini, kebebasan manusia diringkus oleh teknologi yang menyamar sebagai pelayan, namun sesungguhnya menjadi tuan yang mengendalikan. Algoritma menjadi mekanisme kontrol halus yang menjerat keinginan dan pilihan, menjadikan subjek konsumen bukan sebagai aktor bebas, melainkan objek yang dikurasi dan dimanipulasi. Sebuah paradigma yang menuntut refleksi kritis dan pembebasan dari dominasi teknologi yang menggerus otonomi dan kedalaman makna hidup.

Dalam logika ini, manusia tak lagi berperan sebagai subjek yang merdeka dan bermakna, melainkan berubah menjadi objek yang diotomatisasi oleh sistem algoritmik. Pilihan konsumsi yang tampak sebagai keputusan pribadi sejatinya adalah hasil rekayasa yang rumit dan terstruktur. Hasrat dan keinginan tidak lagi tumbuh secara organik dari kebutuhan sejati, melainkan direkayasa dan dikonstruksi oleh algoritma yang secara cermat memanipulasi persepsi, emosi, dan kesadaran kita.

Kita dibelenggu dalam siklus simulasi yang mengaburkan garis antara keinginan asli dan kebutuhan palsu, antara otonomi dan kontrol. Sebagai konsekuensinya, kebebasan eksistensial kita terkikis, digantikan oleh ilusi pilihan yang sebenarnya telah dirancang oleh kekuatan teknologi dan pasar. Manusia modern menjadi korban dari sebuah sistem yang menjadikan dirinya sebagai produk sekaligus konsumen, sebuah paradoks yang menuntut kesadaran kritis dan pembebasan spiritual.

Di tengah derasny gelombang impuls dan citra yang membanjiri ekosistem digital, ekonomi barokah hadir sebagai panggilan untuk



menyucikan kembali hasrat manusia yang sering tersesat dalam hiruk-pikuk konsumsi tak berujung. Prinsip *tathabbur* penyucian jiwa dan *qana'ah* rasa cukup dan syukur menjadi lebih relevan dan mendesak dari sebelumnya sebagai penyeimbang terhadap dinamika yang melumpuhkan kedalaman batin.

Dalam ajaran Islam, kontrol diri atas keinginan bukanlah tanda kelemahan atau pengekanan diri yang kaku, melainkan wujud tertinggi dari kebijaksanaan spiritual. Penguasaan atas hawa nafsu dan pembatasan konsumsi secara sadar adalah manifestasi nyata dari kesadaran tauhid, di mana manusia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bersumber dari akumulasi materi, melainkan dari kedamaian batin yang lahir dari rasa syukur dan keikhlasan.

Ekonomi barokah mengajarkan bahwa penyucian jiwa melalui *tathabbur* dan pembiasaan hidup sederhana dengan *qana'ah* menjadi fondasi untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan manusiawi ekonomi yang bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga menumbuhkan keberkahan spiritual dan sosial. Dalam konteks digital yang semakin mengikis batas antara kebutuhan dan hasrat, ekonomi barokah adalah penuntun bagi umat untuk kembali ke akar kemanusiaan dan makna sejati kehidupan.

Di tengah hiruk-pikuk zaman digital di mana perhatian manusia telah berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan, dan algoritma merajai serta menentukan arus hidup sehari-hari *barokah digital* hadir menawarkan jalan tengah yang berani dan bermakna. Sebuah paradigma hidup yang menegaskan bahwa keberadaan manusia lebih dari sekadar konektivitas tanpa henti; bahwa produktivitas sejati harus berorientasi pada *maslahat* kebaikan bersama bukan sekadar mengejar popularitas atau gengsi semu.

Prinsip *barokah* dalam ranah digital ini bukanlah romantisme spiritual yang utopis atau wacana idealis semata, melainkan kompas moral yang vital dan nyata dalam menavigasi kompleksitas dunia yang serba cepat, penuh kebisingan informasi, dan kerap kali dangkal makna. Ia mengajak kita untuk melambat, menyaring, dan memilih



apa yang benar-benar membawa keberkahan bagi diri, komunitas, dan alam.

Melalui lensa *barokah digital*, teknologi dan media bukan lagi sekadar alat produksi dan konsumsi, melainkan sarana untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Ia menjadi jembatan antara modernitas dan tradisi, antara dinamika global dan kedalaman lokal, sebuah ajakan agar hidup kita tidak kehilangan arah di tengah gelombang informasi yang terus bergulung.

Barokah digital menuntut kita untuk:

Bersikap kritis terhadap konten dan platform adalah bentuk kesalehan intelektual di era digital. Tidak semua yang viral membawa nilai, dan tidak semua yang ramai layak untuk dikonsumsi. Popularitas bukanlah jaminan kebenaran, dan kegaduhan bukanlah ukuran kebermanfaatan. Maka, *barokah digital* harus bermula dari *kesadaran epistemik* kemampuan untuk memilah, menimbang, dan mengonsumsi informasi dengan kejernihan niat, akal, dan hati.

Dalam Islam, sikap ini sejalan dengan perintah *tabayyun* (klarifikasi) yang termaktub dalam QS. Al-Hujurat: 6, serta ajakan untuk menjauhi *laghw* segala hal yang sia-sia dan tidak berdampak positif terhadap jiwa dan masyarakat. Konsumsi konten bukanlah tindakan netral; ia adalah bagian dari pembentukan batin dan dunia nilai. Maka, aktivitas menonton, membaca, membagikan, dan mengomentari konten harus dilihat sebagai *ibadah mental* bukan sekadar reaksi impulsif yang dituntun oleh notifikasi, trending, dan logika algoritmik.

Dengan kerangka ini, ukuran *screen time* tidak cukup dinilai dari lamanya jam yang dihabiskan di depan layar, tetapi dari kualitas makna yang dihasilkan. Apakah ia memperluas wawasan atau mempersempit nurani? Apakah ia menumbuhkan empati atau memperkuat ego? Apakah ia mendekatkan kepada kebenaran, atau menjerumuskan dalam kabut disinformasi dan kehampaan?



Barokah digital mengajak kita untuk menjadi pengguna yang berakal dan beradab bukan sekadar konsumen pasif dalam pasar atensi global, tetapi pelaku sadar yang menata ruang digital sebagai bagian dari jalan hidup yang bermakna, bermoral, dan penuh keberkahan.

Mengelola waktu dan perhatian di era digital bukan sekadar soal efisiensi, melainkan soal amanah. Di tengah ekonomi atensi di mana segala sesuatu berlomba merebut pandangan kita perhatian menjadi harta paling langka sekaligus paling berharga. Apa yang kita perhatikan setiap hari, perlahan namun pasti, membentuk lanskap batin kita: membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan pada akhirnya, menjadi. Dalam tradisi spiritual Islam, perhatian (*attention*) bukan sekadar fungsi kognitif, tetapi bentuk ibadah yang paling sunyi, karena di sanalah letak kehadiran hati *budbur al-qalb* yang menjadi inti dari segala bentuk penghambaan yang autentik.

Konsep *barokah digital* menuntut kita untuk tidak memandang waktu dan perhatian sebagai sumber daya yang bisa dihabiskan secara pasif, melainkan sebagai amanah ilahiyah yang harus dijaga, dipilah, dan diarahkan secara sadar. Waktu bukan sekadar detik yang berlalu, tetapi ruang moral tempat jiwa bertumbuh atau merosot. Dalam sabda Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, beliau mengingatkan: “*Dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia: kesehatan dan waktu luang.*” Sabda ini menjadi pengingat yang mendalam bahwa kelalaian atas waktu bukan hanya kehilangan kesempatan, tetapi juga pemborosan spiritual.

Scrolling tanpa makna, interaksi digital tanpa kesadaran, bisa menjadi bentuk *istidraj* ruhani kenikmatan yang menipu dan menjauhkan dari kesadaran diri dan Tuhan. Di sinilah urgensi barokah digital: membimbing kita agar tidak sekadar hadir secara daring (*online*), tetapi juga hadir secara batin dengan kesadaran, niat, dan kehadiran hati yang utuh.

Menolak ilusi hidup dari iklan dan algoritma adalah langkah pertama menuju kemerdekaan spiritual di era digital. Dunia maya dibanjiri narasi kebahagiaan instan yang dikemas dalam citra-



citra mengilap: rumah mewah, tubuh ideal, liburan eksotis semuanya dijual dalam bentuk simbol, bukan substansi. Namun dalam pandangan Islam, *barokah* bukan terletak pada kemewahan yang mencolok, melainkan pada kesejukan hati yang tumbuh dari hidup yang bersahaja dan bermakna. Keberkahan tidak selalu tampak dalam bentuk yang bisa dipamerkan, tetapi terasa dalam kedalaman syukur, ketenangan batin, dan kebermanfaatan bagi sesama.

Dalam kerangka *barokah digital*, prinsip *maslahat* menjadi penyaring utama dalam menjalani gaya hidup digital. Setiap konten, produk, dan interaksi perlu ditimbang secara kritis dan jernih: apakah ini benar-benar membawa manfaat, ataukah hanya memicu hasrat semu yang menjauhkan dari hakikat diri? Inilah bentuk *etika konsumsi digital* yang berakar dalam kesadaran spiritual. Kita tidak dituntut untuk menolak dunia, tetapi untuk mengolahnya dengan hikmah dan keseimbangan.

Sebagaimana tercermin dalam doa Nabi Muhammad ﷺ: “*Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal daripada yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu daripada bergantung pada selain-Mu.*” (HR. Tirmidzi). Doa ini bukan hanya permohonan tentang rezeki, tetapi juga tentang arah hidup sebuah orientasi batin untuk menjadikan karunia Allah sebagai sumber kecukupan yang sejati, bukan citra-citra semu yang diproduksi oleh sistem kapitalisme digital.

Dengan kesadaran ini, kita tidak hanya menjadi pengguna cerdas, tetapi juga hamba yang jernih dalam menatap hidup. Karena di balik setiap klik dan swipe, ada pilihan moral yang menentukan: apakah kita sedang mendekat kepada Allah dan hakikat diri, atau sedang terseret lebih jauh dalam arus ilusi yang melelahkan?

Dengan demikian, *barokah digital* bukan sekadar soal konten, tetapi tentang orientasi hidup. Ia membimbing kita agar tidak larut dalam kecepatan, tidak hanyut dalam citra, dan tidak kehilangan arah di tengah banjir informasi. Ia menuntun kita untuk mengisi ruang digital dengan *niat*, menggunakan teknologi dengan *hikmah*,



dan memaknai interaksi digital sebagai bagian dari *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa).

“Di dunia yang memuja klik dan views, barokah hadir sebagai hening yang bermakna; ia tidak bising, tetapi menyentuh; tidak ramai, tetapi menumbuhkan.”

Ekonomi barokah di era digital bukan berarti menolak teknologi, tetapi menuntut *etikanya*. Ini adalah upaya menyeimbangkan algoritma dengan adab, konektivitas dengan ketenangan batin, dan konsumsi dengan kontemplasi.

Dalam dunia yang terus menggoda kita untuk menjadi *pengguna yang dikendalikan*, barokah memanggil kita untuk menjadi *manusia yang sadar* yang menjadikan teknologi sebagai alat, bukan tuan.

C. DIGITALISASI USAHA BERBASIS NILAI: HALAL DAN TRANSPARAN

Di tengah arus besar transformasi digital, ekonomi global mengalami percepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya baik dalam transaksi keuangan, sirkulasi informasi, maupun perubahan pola konsumsi. Namun seperti dua sisi mata uang, digitalisasi membawa ambivalensi mendalam: di satu sisi, ia menyimpan potensi keberkahan memperluas akses, mempercepat distribusi manfaat, dan membuka ruang-ruang dakwah serta kolaborasi lintas batas. Tetapi di sisi lain, ia juga menyimpan jebakan keserakahan memicu budaya konsumsi tak terkendali, memperkuat akumulasi kekayaan yang timpang, dan membuka jalan bagi praktik *riya'*, eksibisionisme digital, serta eksploitasi emosi manusia.

Dunia maya menjadi medan spiritual yang kompleks: ia bisa menjadi cermin keikhlasan atau justru panggung narsisme berjubah kebaikan; bisa menjadi ladang amal atau arena komersialisasi nilai-nilai suci. Dalam lanskap ini, keberkahan tidak hadir secara otomatis, tetapi menuntut kesadaran, niat, dan pengelolaan yang bijaksana. Sejauh mana teknologi digunakan untuk membebaskan, bukan menindas? Untuk menebar manfaat, bukan menumpuk pengaruh?



Maka dari itu, dalam menghadapi era digital, yang dibutuhkan bukan sekadar literasi teknologi, tetapi *literasi ruhani* kemampuan untuk memilah mana yang maslahat dan mana yang muslihat, mana yang memperkuat nilai dan mana yang sekadar memperbesar ego. Ekonomi digital bisa menjadi instrumen revolusi keadilan yang mendalam, jika dan hanya jika ia dipandu oleh kompas moral dan visi spiritual yang mengakar.

Islam tidaklah anti-teknologi. Sejarah panjang peradaban Islam justru menunjukkan keterbukaan luar biasa terhadap inovasi dan kemajuan. Dari pengembangan observatorium astronomi di Baghdad, eksperimen kedokteran di Andalusia, hingga sistem perhitungan ilmiah yang melahirkan algoritma umat Islam telah menjadi pelopor dalam mengintegrasikan *ijtihad* intelektual dengan pemanfaatan alat-alat kemajuan. Dalam semangat tauhid, ilmu dan teknologi dipahami sebagai instrumen untuk mengenal ciptaan Tuhan secara lebih dalam dan mentransformasikan kehidupan secara lebih adil dan bermakna.

Karena itu, tantangan utama bukanlah terletak pada teknologinya itu sendiri, melainkan pada nilai-nilai yang menyertainya: untuk siapa teknologi digunakan, dalam kerangka tujuan apa ia dikembangkan, dan apakah ia mendekatkan manusia pada kemaslahatan atau justru menjauhkan dari hakikat kemanusiaan. Teknologi, dalam pandangan Islam, bersifat netral secara zat, tetapi bermuatan moral secara penggunaan.

Di sinilah pentingnya menghadirkan kerangka etik dan spiritual dalam penggunaan teknologi modern. Tanpa panduan nilai, teknologi dapat dengan mudah berubah dari alat pembebasan menjadi alat penindasan; dari sarana penciptaan kebaikan menjadi mesin akumulasi kekuasaan dan kesenjangan. Maka, Islam menawarkan bukan penolakan atas modernitas digital, tetapi reinterpretasi sebuah pembacaan kritis yang menempatkan teknologi dalam orbit nilai, maslahat, dan keadilan.

Kini, mulai tumbuh dan berkembang sebuah generasi baru pelaku usaha Muslim yang tidak hanya melekat teknologi, tetapi juga



berpijak pada nilai-nilai spiritual dan etika Islam dalam membangun ekosistem digital. Mereka tidak sekadar mengejar efisiensi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi menghadirkan visi peradaban mengintegrasikan iman dengan inovasi, dan menjadikan teknologi sebagai wasilah, bukan tujuan.

Muncullah *e-commerce* halal yang tidak hanya menjual produk, tetapi menjaga kejujuran informasi, adab dalam jual beli, dan keberkahan transaksi. Hadir pula platform edukasi syariah digital yang menyampaikan ilmu bukan sebagai komoditas pasar, melainkan sebagai *nur* cahaya pengetahuan yang membimbing akal dan hati. Di bidang keuangan, fintech zakat dan wakaf mulai mempertemukan niat derma umat dengan kecanggihan teknologi, mempermudah distribusi keadilan sosial dengan transparansi dan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya.

Lebih jauh, inovasi digital juga hadir dalam bentuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah berbasis aplikasi, yang menjangkau lapisan marjinal mereka yang selama ini tercecer dan terpinggirkan oleh sistem perbankan konvensional yang eksklusif. Inisiatif-inisiatif ini bukan hanya proyek bisnis, tetapi gerakan spiritual dan sosial yang menghidupkan kembali semangat *ta'awun* (saling tolong-menolong) dan *ukhuwah iqtisadiyah* (solidaritas ekonomi) dalam kerangka masyarakat digital.

Inilah wajah baru ekonomi Islam di era digital bukan ekonomi yang hanya mengikuti arus, tetapi yang menata arus; bukan sekadar adaptif, tetapi juga transformatif. Sebuah ikhtiar kolektif untuk membumikan barokah di tengah sistem yang kerap mendorong manusia menjauh dari nilai-nilai ketauhidan dan keadilan.

Menurut Hassan dan Aliyu (2018), digital *Islamic finance* memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan inklusi keuangan yang berkeadilan. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis nilai, sistem ini mampu memperluas akses pembiayaan kepada kelompok-kelompok rentan terutama yang selama ini terpinggirkan oleh mekanisme lembaga keuangan konvensional. Lebih dari sekadar



instrumen teknis, digitalisasi keuangan syariah menawarkan model yang menggabungkan efisiensi dan skalabilitas teknologi dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam kerangka ini, teknologi tidak diposisikan sebagai alat dominasi atau ekspansi kekuasaan kapital semata, melainkan sebagai *sarana ta'awun* penguatan semangat tolong-menolong antar anggota masyarakat dan *istishlah* penciptaan kemaslahatan kolektif yang berkelanjutan. Setiap fitur digital bukan hanya dirancang untuk kenyamanan transaksi, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai ilahiyah tetap menjadi poros utama dalam dinamika ekonomi: tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada eksploitasi.

Maka, digital *Islamic finance* bukan sekadar bentuk adaptasi Islam terhadap zaman, tetapi juga wujud konkret dari misi transformatif Islam menata kembali struktur keuangan agar selaras dengan fitrah manusia dan keadilan sosial. Ia membuka harapan akan masa depan ekonomi yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga bermartabat secara spiritual.

Barokah dalam ruang digital tidak dapat diukur semata dari kecepatan viralitas atau besarnya keuntungan finansial yang diraih. Ukuran keberkahan tidak terletak pada metrik yang dilacak oleh algoritma, tetapi pada nilai yang hidup dalam proses dan dampaknya. Pertanyaan dasarnya bukanlah “seberapa banyak yang tercapai,” tetapi “seberapa dalam yang tertanam.” Dalam ekosistem digital yang cenderung menyanjung kuantitas, *barokah digital* justru mengajak kita menimbang kualitas.

Apakah usaha digital tersebut menghadirkan *kejujuran* dan *maslahat* bagi banyak orang? Apakah ia membangun *kepercayaan*, nilai, dan relasi yang tulus, bukan sekadar menghasilkan lalu lintas data, klik, dan atensi semu? Apakah ia mempertemukan manusia dengan makna yang lebih hakiki, memperkuat koneksi dengan sesama dan dengan Tuhan, atau justru menjadikannya terasing terperangkap



dalam labirin algoritma yang memanipulasi hasrat dan mengikis kesadaran?

Dalam perspektif Islam, *barokah* bukanlah hasil yang mewah, tetapi proses yang bersih. Ia tumbuh dalam keikhlasan, jujur dalam niat, adil dalam cara, dan berorientasi pada kemaslahatan. Maka, *barokah digital* bukanlah fantasi spiritual dalam dunia serba virtual, tetapi kompas etik yang membimbing kita agar tidak kehilangan ruh kemanusiaan dalam pusaran teknologi. Karena di dunia yang makin digital, justru semakin penting bagi kita untuk tetap analog dalam rasa, spiritual dalam tujuan, dan manusiawi dalam interaksi.

Dalam wajah ekonomi barokah, digitalisasi tidak dipandang sebagai kutukan modernitas atau ancaman spiritualitas, melainkan sebagai peluang besar untuk mengejawantahkan etika tauhid dalam lanskap virtual. Ia adalah medan baru di mana nilai-nilai ilahiyah diuji sekaligus dapat ditegakkan: ruang untuk berbisnis dengan niat yang suci, berdagang tanpa dusta, dan membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara teknologis, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan bermakna secara spiritual.

Digitalisasi, dalam kerangka ini, bukan sekadar transformasi teknis, melainkan perluasan ladang amal. Setiap klik, setiap transaksi, dan setiap interaksi daring menjadi kesempatan untuk mewujudkan prinsip-prinsip *amanah*, *kejujuran*, *kemaslahatan*, dan *ukhuwah* dalam bentuk yang kontekstual dan relevan dengan zaman. Ia menjadi medan jihad kontemporer jihad melawan ketamakan, manipulasi, dan eksploitasi dengan menghadirkan keadaban dalam algoritma, dan menghadirkan nilai dalam narasi digital yang sering kali kosong makna.

Ekonomi barokah menolak dikotomi palsu antara teknologi dan spiritualitas. Ia menawarkan jalan tengah yang kokoh jalan di mana kemajuan tidak harus mencabut akar iman, dan modernitas tidak harus mengorbankan kedalaman makna. Inilah visi ekonomi Islam yang sejati: menghadirkan rahmat, keadilan, dan keberkahan bagi seluruh alam, bahkan dalam dunia yang serba maya.



D. BAROKAH DALAM MEDIA SOSIAL DAN EKONOMI KREATIF

Media sosial dan ekonomi kreatif adalah medan kontestasi baru dalam lanskap ekonomi digital. Di satu sisi, ia menjadi ladang subur bagi ekonomi *riya'* di mana popularitas, sensasi, dan algoritma menjadi tuhan baru yang menentukan arah produksi konten. Namun di sisi lain, ia juga membuka ruang luas bagi ekonomi da'wah tempat di mana nilai, ilmu, dan spiritualitas diolah menjadi energi kebaikan yang menembus batas geografis dan sosial.

Dalam dunia yang didorong oleh *clicks*, *views*, dan *shares*, konten keagamaan dan spiritual menjadi komoditas baru. Banyak yang menjual “kesalehan” dalam kemasan estetik, namun kering dari kedalaman makna. Fenomena ‘influencer religius’ memperlihatkan bagaimana agama bisa dikapitalisasi sebagai gaya hidup, bukan jalan hidup. Namun, di tengah itu semua, tetap ada secercah cahaya: para kreator yang ikhlas, yang menebar hikmah, yang menjadikan media sosial sebagai ruang *tazkiyah* (penyucian), bukan sekadar panggung *riya'*.

Ekonomi barokah tidak menolak media sosial, tetapi mengajak untuk menggunakannya dengan kesadaran spiritual. Ia bukan soal mematikan kreativitas, tetapi mensucikan niat dan memperbaiki orientasi. Dalam pandangan ini, setiap konten bukan sekadar “produk digital”, tetapi amanah komunikasi yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara etis maupun teologis.

Barokah dalam media sosial tidak lahir dari viralitas, tetapi dari hikmah yang mengalir dan kebaikan yang tersebar. Sebuah video pendek yang menyentuh hati bisa menjadi sedekah pengetahuan. Sebuah narasi yang jujur bisa menjadi jalan *taubat* bagi yang membaca. Dalam ekosistem seperti ini, kreator adalah da'i, penonton adalah jamaah, dan platform menjadi mimbar baru untuk kebenaran.

Dalam lanskap digital yang penuh hiruk-pikuk dan persaingan algoritmik, prinsip barokah menjadi kompas spiritual untuk menjaga makna dan tanggung jawab di tengah banjir informasi. Media sosial



bukan lagi sekadar ruang hiburan atau aktualisasi diri, tetapi medan dakwah, pengaruh, dan bahkan kekuasaan kultural. Di tengah arus itu, keberkahan menjadi penanda bahwa jejak digital kita tidak hanya viral, tetapi juga bernilai abadi di sisi Tuhan dan bermanfaat bagi sesama.

Salah satu prinsip utama *barokah* dalam bermedia sosial adalah *niat yang ikhlas (lillāhi ta'ālā)*. Di balik setiap unggahan, narasi, visualisasi, dan interaksi digital, niat menjadi fondasi eksistensial yang menentukan nilai sejati dari aktivitas tersebut. Niat bukan sekadar dimensi batin yang tersembunyi, melainkan orientasi spiritual yang memberi arah pada seluruh tindakan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ: “*Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kualitas amal bukan terletak pada bentuk lahiriahnya, melainkan pada tujuan yang menggerakkannya.

Dalam konteks media sosial yang sarat dengan budaya pencitraan, kompetisi pengaruh, dan obsesi terhadap angka views, likes, followers niat yang ikhlas menjelma menjadi bentuk perlawanan sunyi terhadap arus zaman. Ia mengubah media digital dari sekadar panggung eksistensi ego menjadi ruang pengabdian dan dakwah. Konten yang lahir dari niat untuk menyebarkan kebaikan, menguatkan sesama, atau membangun kesadaran, akan membawa *nilai spiritual* yang tak dapat diukur oleh algoritma, tetapi dirasakan dalam kebermanfaatannya yang menajal pelan namun dalam.

Ikhlas di dunia digital bukan berarti absen dari estetika atau teknologi, tetapi menghadirkan *kesadaran ruhani* dalam setiap proses produksi konten: dari pemilihan kata, gambar, hingga interaksi dengan audiens. Ia adalah usaha untuk menjaga agar media sosial tidak menjadi *medium kesia-siaan*, melainkan sarana untuk menanam amal, membangun ukhuwah, dan memperkuat makna hidup di era yang mudah tergelincir ke permukaan.

Proses yang halal dan tayyib merupakan prinsip fundamental dalam menghadirkan barokah di ruang digital. Dalam pandangan



Islam, keberkahan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi terutama dari jalan yang ditempuh. Sebuah konten yang viral karena manipulasi emosi, kebohongan tersembunyi, eksploitasi syahwat atau kemarahan kolektif, sejatinya adalah konten yang kehilangan *cahaya ruhani* terlihat gemerlap di permukaan, tetapi kosong di kedalaman. Keberhasilan semacam itu hanyalah ilusi algoritmik yang cepat berlalu, namun berisiko merusak struktur moral masyarakat secara perlahan.

Prinsip *halal* dan *ṭayyib* menuntut lebih dari sekadar ketiadaan unsur haram secara formal. Ia menuntut *kesucian niat, kejujuran naratif, integritas visual, dan kesantunan dalam interaksi*. Dalam dunia digital, ini mencakup pemilihan sumber informasi yang kredibel, editing yang tidak menipu persepsi, hingga bahasa yang tidak memprovokasi atau merendahkan. Allah berfirman, “*Makanlah dari yang halal lagi baik (ṭayyib)*” (QS. Al-Baqarah: 168) dan perintah ini tidak terbatas pada makanan fisik, tetapi juga mencakup “konsumsi informasi” dan “nutrisi batin” yang kita serap dari dunia digital.

Sebagaimana makanan yang haram dapat merusak tubuh dan jiwa, begitu pula informasi yang tidak halal atau tidak *ṭayyib* ia mencemari akal, mengeraskan hati, dan merusak tatanan sosial. Maka, dalam era media sosial yang serba cepat dan sensasional, menjaga proses produksi konten agar tetap halal dan *ṭayyib* adalah bentuk ibadah intelektual dan sosial. Ia adalah jihad sunyi untuk menjaga ekosistem digital tetap sehat secara moral dan jernih secara spiritual.

Dampak yang maslahat dan memberdayakan menjadi tolok ukur utama dari sebuah konten yang mengusung prinsip *barokah* dalam bermedia sosial. Konten semacam ini bukan sekadar menyajikan informasi atau hiburan, melainkan membuka ruang kesadaran yang lebih luas menggugah refleksi mendalam yang mampu menuntun individu menuju transformasi batin dan perubahan sosial positif. Ia menjadi medium yang tidak hanya menampilkan realitas, tetapi juga berperan aktif dalam memulihkan luka dan merajut kembali jalinan kemanusiaan yang retak.



Konten yang berbarokah berfungsi sebagai agen pencerah, bukan sekadar pengisi waktu; ia mencerdaskan pikiran sekaligus melembutkan hati. Dalam interaksinya, ia mengundang partisipasi yang kritis dan konstruktif, bukan hanya komentar tanpa makna atau pertentangan yang merusak. Dengan demikian, media sosial yang dipenuhi konten berbarokah menjadi ruang aman (*safe space*) tempat di mana nilai *rahmah* (kasih sayang), *empati*, dan *solidaritas* antarindividu lintas perbedaan dapat tumbuh subur.

Lebih jauh, konten yang memberdayakan ini mendorong kesadaran kolektif untuk bergerak bersama dalam semangat kebersamaan dan keadilan sosial, menjadikan media digital bukan sebagai arena perseteruan, tetapi sebagai ladang pembinaan ukhuwah dan penguatan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Dengan demikian, media sosial dalam perspektif barokah adalah ruang spiritual yang tak terpisah dari ibadah. Ia bisa menjadi ladang pahala, tetapi juga medan fitnah, tergantung dari bagaimana manusia mengelola niat, proses, dan dampaknya. Ketika seorang kreator konten menjadikan akunnya sebagai *amanah*, bukan sekadar portofolio, maka setiap story, caption, dan interaksi menjadi dzikir dalam bentuk digital.

Sebagaimana ungkapan ulama kontemporer: *“Barakah is not in how far your message reaches, but in how deep it touches hearts and how sincerely it’s intended.”*

Inilah yang disebut oleh para pemikir kontemporer sebagai spiritualitas digital upaya menghidupkan nilai-nilai ilahiyah dalam dunia algoritmik. Sehingga, followers bukan lagi sekadar angka, tetapi amanah, dan influencer bukan lagi sekadar selebritas, tetapi pelayan makna.

Dalam dunia yang bising oleh noise, ekonomi barokah mengajak untuk menjadi suara yang jernih, bukan gema dari kehampaan budaya viral. Karena pada akhirnya, yang abadi bukanlah tren, tetapi nilai yang menuntun manusia menuju kebaikan dan kedekatan dengan Allah.



Di era ketika konsumsi dikendalikan oleh algoritma, dan identitas dijual melalui citra dan iklan, barokah hadir sebagai penunjuk arah yang hening namun tegas. Ia bukan sekadar romantisme masa lalu, bukan pula jargon spiritual tanpa substansi. Barokah adalah proyek etis dan spiritual suatu ikhtiar untuk membebaskan manusia dari perbudakan hasrat, dari ketergantungan pada validasi eksternal, dan dari jebakan hidup yang serba cepat namun hampa.

Dalam dunia digital yang serba instan, ekonomi tak lagi beroperasi hanya pada tingkat kebutuhan dasar, melainkan telah menjadi panggung ilusi dan simulasi, tempat kebahagiaan dikonstruksi dalam bentuk *likes*, *followers*, dan *engagement rate*. Namun, ekonomi barokah menolak untuk tunduk pada logika angka semata. Ia mengingatkan bahwa makna hidup bukan diukur dari grafik pertumbuhan, tetapi dari nilai-nilai yang ditanam dan kebaikan yang mengalir.

Ekonomi digital tidak harus menjadi arena eksekse, eksploitasi, atau keserakahan yang dibungkus kecanggihan. Ia bisa dan seharusnya menjadi medan dzikir, tempat etika dan spiritualitas dihidupkan; menjadi wadah edukasi, tempat ilmu disebar dengan ikhlas; menjadi saluran distribusi manfaat, di mana teknologi menjadi jalan untuk memperkuat solidaritas dan keadilan sosial.

Maka, tantangan utama kita bukan hanya sekadar menjadi “melek teknologi”, tetapi juga dan yang lebih penting “melek nilai”. Kita harus memahami bukan hanya bagaimana teknologi bekerja, tetapi untuk siapa dan untuk apa ia digunakan. Di sinilah jalan keberkahan menuntut kita untuk bersikap kritis, reflektif, dan transformatif dalam menyikapi digitalisasi yang kian menguasai kehidupan.

Barokah dalam konteks ini adalah keberanian untuk hidup dengan kesadaran, memilih untuk berkontribusi alih-alih sekadar mengikuti arus, dan mengembalikan teknologi ke fitrahnya: sebagai alat untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan, sesama, dan dirinya sendiri.





BAB 8

MEMBANGUN SISTEM EKONOMI BAROKAH: DARI INDIVIDU KE NEGARA

Ekonomi barokah bukan sekadar praktik personal dalam ruang privat, atau bentuk kesalehan individual yang terhenti pada niat dan amal harian. Ia adalah proyek peradaban ikhtiar kolektif untuk membangun tatanan sosial yang adil, manusiawi, dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah.

Dalam Islam, transformasi sejati tidak pernah berhenti pada dimensi spiritual individu. Kesalehan yang sejati adalah yang menubuh dalam struktur, menjelma dalam sistem pendidikan yang membebaskan, dalam pola distribusi kekayaan yang berkeadilan, dan dalam kebijakan negara yang berpihak pada yang tertindas (mustadh'afin). Spirit barokah menolak pemisahan antara iman dan sistem; antara masjid dan pasar; antara dzikir dan strategi fiskal.

Pembangunan sistem ekonomi barokah menuntut keterlibatan semua level: dari kesadaran ruhani seorang pedagang kecil yang jujur dan adil, hingga komitmen politik negara dalam menyusun APBN yang berpihak, menghapus rente, dan mendorong ekonomi rakyat. Dalam bahasa lain, ekonomi barokah hanya mungkin tumbuh bila



nilai spiritual, struktur sosial, dan kebijakan publik saling bersinergi dalam kerangka keadilan.

Maka, barokah bukan sekadar hasil, tetapi arah. Ia adalah panduan yang melampaui angka dan statistik, menuju peradaban yang menjadikan manusia bukan sekadar konsumen atau produsen, tetapi khalifah yang memakmurkan bumi dengan iman dan akhlak. Dalam konteks ini, barokah adalah roh dari sistem, bukan pelengkap dari struktur.

A. PENDIDIKAN EKONOMI BERBASIS NILAI

Salah satu pilar paling strategis dalam membangun ekonomi barokah adalah pendidikan yang mengakar pada nilai-nilai spiritual dan etika, bukan sekadar mentransfer keterampilan teknis atau kecakapan pasar semata. Realitas pendidikan ekonomi saat ini, dalam banyak kasus, justru menghasilkan sosok *homo economicus* manusia yang dilukiskan sebagai entitas rasional semata, berorientasi pada akumulasi keuntungan, optimalisasi sumber daya, dan kemenangan dalam kompetisi tanpa henti. Dalam paradigma sempit ini, ekonomi dipisahkan dari ranah etika, dan manusia direduksi menjadi agen kalkulatif yang menempatkan kepuasan individual di atas segala hal lain.

Pendekatan ini gagal menangkap dimensi kemanusiaan yang utuh yang mengintegrasikan akal, hati, dan spiritualitas. Akibatnya, ekonomi menjadi arena mekanistik yang kehilangan makna, di mana nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan disingkirkan demi angka dan laba. Pendidikan ekonomi barokah hadir untuk merebut kembali narasi ini, menanamkan kesadaran bahwa ekonomi sejati adalah tindakan pengabdian yang bermuara pada kebaikan bersama, kesejahteraan yang inklusif, dan penghormatan terhadap kodrat manusia sebagai khalifah di bumi.

Dengan demikian, pendidikan yang berakar pada *barokah* menuntut paradigma baru di mana transfer pengetahuan tidak hanya menyia-kan manusia sebagai pelaku pasar, tetapi sebagai insan mulia



yang membawa tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual dalam setiap keputusan ekonominya.

Namun, Islam menawarkan paradigma manusia yang jauh berbeda bukan sekadar *makhluk ekonomi* yang semata-mata didefinisikan oleh perannya dalam pasar atau produksi, melainkan sebagai *'abd* (hamba Allah) dan *khalifah* (pengelola amanah Ilahi di muka bumi). Dalam kerangka konseptual ini, setiap aktivitas ekonomi tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan selalu terikat dengan kesadaran tauhid yang mendalam pengakuan bahwa segala sumber daya dan kekayaan pada hakikatnya milik Allah dan manusia hanyalah pengelolanya.

Kesadaran ini membentuk landasan etis yang kuat, di mana tindakan ekonomi tidak hanya diarahkan pada keuntungan materi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan moral untuk memakmurkan bumi secara adil, lestari, dan penuh keseimbangan. Manusia sebagai khalifah dipanggil untuk mengelola sumber daya dengan bijak, memastikan bahwa aktivitas ekonomi menjadi sarana untuk menegakkan keadilan, memperkuat solidaritas sosial, serta menjaga harmoni ekosistem sebuah misi yang menyatukan spiritualitas dan keberlanjutan dalam satu kesatuan yang utuh.

Sebagaimana ditegaskan oleh M. Umer Chapra (2000), krisis paling mendasar yang melanda sistem ekonomi modern bukanlah sekadar kelangkaan sumber daya atau keterbatasan instrumen fiskal, melainkan krisis nilai yang mendalam dan kekosongan spiritual yang meruntuhkan fondasi sosial kemasyarakatan. Ketika pendidikan dan sistem sosial gagal menanamkan dimensi etis dalam kesadaran kolektif, lahirlah sebuah tatanan ekonomi yang meskipun secara teknis maju dan canggih, namun secara moral mengalami keruntuhan yang parah. Sistem semacam ini mampu menghasilkan kekayaan material dalam jumlah besar, namun pada saat yang sama menormalisasi ketimpangan sosial dan eksklusi, menjadikan jurang antara kaya dan miskin sebagai fenomena yang dianggap wajar dan tidak terelakkan.



Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang sejati haruslah berangkat dari akar nilai dan spiritualitas, sehingga kemajuan teknis tidak berjalan tanpa kendali, tetapi tetap berorientasi pada kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan ekonomi dalam Islam harus dirancang secara **integratif** mengharmoniskan ilmu-ilmu sosial-ekonomi dengan nilai-nilai fundamental seperti *tauhid*, *amanah*, *keadilan*, *kejujuran*, dan *maslahat*. Pendekatan ini tidak semata-mata merupakan upaya moralistik yang normatif, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan bermartabat. Dengan mengakar pada prinsip-prinsip spiritual dan etika ini, pendidikan ekonomi Islam bertujuan membentuk insan yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kedalaman kesadaran tanggung jawab sosial dan spiritual dalam setiap keputusan ekonominya.

Melalui integrasi ini, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menumbuhkan karakter dan kesadaran kolektif yang mampu merespons tantangan kompleks zaman dengan kebijaksanaan dan keberpihakan kepada seluruh umat manusia dan alam semesta.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi berbasis syariah memegang peranan strategis sebagai pusat inkubasi ekonomi barokah. Institusi-institusi ini tidak semata-mata bertugas mencetak profesional atau wirausahawan yang kompeten secara teknis, melainkan juga menjadi benteng pelestari nilai-nilai luhur Islam. Di sinilah para santri dan mahasiswa dididik untuk memahami bahwa setiap transaksi ekonomi bukan sekadar pertukaran materi, melainkan sebuah bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah.

Melalui pendidikan yang menyeluruh, mereka dibentuk untuk memandang kekayaan bukan sebagai hak milik absolut yang melekat pada individu, melainkan sebagai *amanah* kepercayaan ilahi yang



harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Dengan demikian, lembaga-lembaga pendidikan Islam berperan tidak hanya dalam pengembangan kapasitas ekonomi, tetapi juga dalam membangun kesadaran spiritual dan etika yang menjadi fondasi utama bagi terwujudnya ekonomi barokah yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam ekosistem pendidikan ekonomi barokah, integrasi yang holistik antara ilmu syariah, akhlak mulia, dan keterampilan ekonomi praktis menjadi fondasi kurikulum yang esensial. Kurikulum ini tidak sekadar menyiapkan individu yang cerdas dan mahir dalam mengelola modal serta sumber daya, melainkan lebih jauh membentuk insan paripurna manusia yang menggabungkan kecerdasan intelektual dengan kedalaman moral dan kebijaksanaan spiritual.

Mereka diajarkan untuk tidak hanya mengejar efisiensi dan keuntungan semata, tetapi juga untuk bijak dalam menyalurkan manfaat kepada masyarakat luas, menjadikan setiap aktivitas ekonomi sebagai wujud pengabdian dan tanggung jawab sosial yang terpadu. Dengan demikian, kurikulum ini mencetak generasi pelaku ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga beretika dan berorientasi pada keberlanjutan serta kesejahteraan bersama.

B. KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEBERPIHAKAN PADA EKONOMI RAKYAT

Dalam tradisi Islam, negara bukanlah entitas yang bersikap netral terhadap nilai-nilai moral dan etika. Negara tidak sekadar berperan sebagai penjaga ketertiban sosial atau pengatur mekanisme pasar, melainkan sebagai penanggung jawab moral yang memiliki mandat suci untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tugas negara, sebagaimana dirumuskan dalam kerangka *maqāṣid al-sharīʿah* tujuan-tujuan syariah meliputi perlindungan atas harta (*ḥifẓ al-māl*), pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta penciptaan keadilan struktural yang adil dan berimbang.



Dalam perspektif ini, negara berfungsi sebagai instrumen *rahmat* sumber kebaikan dan perlindungan yang menegakkan tatanan sosial-ekonomi yang manusiawi dan beradab, bukan semata-mata sebagai regulator pasar yang hanya mementingkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dimensi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, negara dalam Islam memiliki peran sentral dalam menata sistem ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai tauhid, keadilan sosial, dan keberlanjutan, sehingga kesejahteraan bukan hanya dimaknai secara material, tetapi juga spiritual dan sosial.

Paradigma ekonomi barokah menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh semata-mata terjebak pada ukuran pertumbuhan statistik atau akumulasi angka makroekonomi. Sebaliknya, orientasi utama haruslah pada keadilan substantif menyelidiki secara kritis siapa yang benar-benar diuntungkan, siapa yang terpinggirkan, dan siapa yang sesungguhnya dimuliakan dalam tatanan ekonomi. Paradigma ini menolak gagasan netralitas pasar yang semu yang seringkali membiarkan mekanisme pasar menentukan nasib manusia tanpa pijakan etika dan nilai moral.

Dengan prinsip keberpihakan yang tegas, ekonomi barokah menyerukan dukungan dan pemberdayaan bagi kelompok ekonomi rakyat yang selama ini bekerja dalam keheningan dan ketidaknampakan: petani kecil yang memelihara tanah, nelayan yang menyingkap laut, pedagang pasar tradisional, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung kehidupan komunitas. Kebijakan ekonomi yang berlandaskan barokah harus mengangkat mereka dari bayang-bayang ketidakadilan, menjadikan mereka pusat gravitasi dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan yang berlandaskan prinsip *barokah* adalah kebijakan yang lahir dari keterhubungan mendalam dengan realitas sosial-ekonomi, berakar kuat pada nilai-nilai ilahiyah, dan berorientasi pada keadilan substantif yang menyentuh hati serta kehidupan masyarakat. Ia bukan produk keputusan yang diambil di balik meja kekuasaan yang terisolasi dari penderitaan dan aspirasi rakyat, melainkan



tumbuh dari denyut nadi kehidupan sehari-hari: merasakan getaran tanah yang diinjak oleh petani kecil, memahami pergulatan pedagang tradisional yang menggantungkan hidupnya pada pasar lokal, serta menjalin kembali ikatan sosial yang tergerus oleh dinamika sistem ekonomi yang eksploitatif dan mekanistik.

Kebijakan semacam ini tidak sekadar mengelola angka dan merancang struktur institusional, tetapi menghidupkan ruh kasih sayang dan tanggung jawab sebagai inti dari tata kelola yang beradab. Dengan demikian, ia menjelma menjadi wujud nyata dari amanah sosial dan moral mendorong terwujudnya kesejahteraan yang inklusif, berkeadilan, dan membawa keberkahan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa bentuk praksis kebijakan yang membawa keberkahan dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang berakar pada nilai-nilai *maqāṣid al-sharīʿah* dan semangat keadilan sosial:

Subsidi pangan yang berkeadilan bukan sekadar intervensi teknis untuk menstabilkan harga di pasar, melainkan merupakan ekspresi empati struktural terhadap rakyat miskin yang menghadapi krisis ketahanan pangan dan kehidupan. Kebijakan ini mencerminkan mandat syariah dalam melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), sekaligus menegaskan posisi negara sebagai pelindung yang penuh rahmah, bukan semata regulator pasar yang netral dan terlepas dari nilai.

Dana desa partisipatif harus dijalankan dengan prinsip *syūrā* (musyawarah) dan menempatkan kepercayaan penuh pada kearifan lokal yang hidup dalam struktur sosial masyarakat desa. Desa bukan objek pembangunan pasif, melainkan subjek otonom dengan budaya dan nilai-nilai yang harus dihormati. Dana desa yang berlandaskan *barokah* lahir dari dialog transformatif antara negara dan rakyat, menghindari pendekatan top-down yang bersifat proyekistik dan temporer.

Dukungan terhadap koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah manifestasi nyata dari ekonomi solidaritas



berbasis komunitas. Kebijakan yang berpihak kepada lembaga-lembaga ini berarti memperkuat fondasi ekonomi rakyat yang inklusif dan berkeadilan, bukan memperbesar dominasi lembaga keuangan besar yang seringkali eksploitatif. Dalam konteks ini, prinsip *tawāzun* (keseimbangan) dan *‘adālah* (keadilan distributif) berfungsi sebagai pilar utama pengelolaan ekonomi mikro.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penjaga nilai etika dan manfaat sosial. Dukungan negara harus melampaui sekadar pelatihan teknis atau akses pasar; UMKM harus dibimbing untuk menjadi wahana ibadah ekonomi yang berorientasi pada produksi halal, distribusi yang adil, dan konsumsi yang membawa berkah.

Reforma agraria yang adil mengembalikan tanah sebagai sumber kehidupan yang sakral, bukan sekadar komoditas ekonomi. Kebijakan agraria yang berbarokah menjadi koreksi struktural atas ketimpangan penguasaan lahan yang telah lama menindas petani kecil. Pengembalian hak atas tanah bukan hanya soal redistribusi sumber daya, tetapi tindakan pembebasan yang membuka jalan bagi tatanan sosial-ekonomi yang memuliakan martabat manusia.

Dengan demikian, kebijakan yang berorientasi barokah tidak pernah bersikap netral secara moral. Ia dengan tegas berpihak kepada mereka yang lemah, yang terlupakan, dan yang selama ini terpinggirkan. Karena dalam perspektif Islam, keadilan tidak pernah terpisah dari kasih sayang, dan tata kelola yang baik selalu dilandasi oleh tanggung jawab transendental kepada Allah serta amanah kepada rakyat yang menjadi tujuan utama pemerintahan.

Dalam kerangka pemikiran ekonomi barokah, gagasan ini bukan sekadar utopia normatif yang idealistis dan abstrak, melainkan sebuah visi yang dapat diwujudkan menjadi kebijakan publik yang nyata dan menyentuh denyut nadi realitas sosial-ekonomi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Gus Dur (Abdurrahman Wahid), “Keadilan sosial dalam Islam bukan sekadar cita-cita, tetapi realisasi



konkret dari kesalehan.” Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa kesalehan tidak hanya terpatrit dalam doa dan kesunyian spiritual, melainkan juga harus diwujudkan dalam bentuk nyata melalui alokasi anggaran dalam APBN, regulasi yang berpihak, dan komitmen tegas dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan.

Dalam konteks dunia yang didominasi oleh korporasi global dan hegemoni pasar liberal yang seringkali mengabaikan nilai kemanusiaan, kebijakan publik yang berani mengambil sikap keberpihakan pada rakyat kecil bukan sekadar strategi politik pragmatis, melainkan sebuah tindakan spiritual yang mendalam suatu jalan suci menuju keberkahan dalam skala sistemik dan kolektif. Dalam perspektif Islam, kemuliaan sebuah bangsa tidak diukur dari kemegahan gedung pencakar langitnya, melainkan dari seberapa luhur dan mulia perlakuan dan perhatian yang diberikan kepada mereka yang paling lemah dan rentan dalam masyarakatnya.

C. SPIRITUALITAS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Di tengah dominasi logika pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada angka dan kalkulasi kuantitatif, perencanaan pembangunan modern kerap kehilangan ruhnya yang paling esensial. Prosesnya dijalankan dengan rumus-rumus teknokratik yang akurat dan presisi, namun terasing dari makna hakiki kemanusiaan dan keberlanjutan hidup. Produk Domestik Bruto (GDP), indeks daya saing, dan nilai investasi asing dijadikan sebagai tolok ukur tunggal kemajuan, sedangkan dimensi-dimensi yang lebih substansial seperti kebahagiaan, kelestarian lingkungan, dan keberkahan dipandang sebagai variabel tak terukur yang kemudian terabaikan dan dilupakan.

Dalam kerangka visi Islam, pembangunan tidak dimaknai sebagai proyek dominasi atas alam dan manusia semata, melainkan sebagai amal kolektif yang melekat erat dengan tanggung jawab transendental kepada akhirat. Pembangunan merupakan wujud ibadah sosial yang menyelaraskan kemajuan material dengan keagungan spiritual, sehingga keseimbangan antara dunia dan akhirat



terjaga. Sesungguhnya, makna membangun melampaui sekadar pembangunan fisik berupa beton dan infrastruktur; ia adalah upaya memuliakan kehidupan manusia, menjaga harmoni lingkungan, dan menyuburkan kebermaknaan yang mendalam dalam setiap lapisan masyarakat.

Menurut Taha Abdurrahman (2013), esensi perencanaan pembangunan dalam perspektif Islam harus berakar pada etika *khidmah* yaitu semangat pengabdian yang tulus bukan pada *istikbār*, yang merepresentasikan kesombongan dan dominasi yang merusak. Dalam kerangka ini, pembangunan tidak lagi dipahami sebagai usaha ekspansi kekuasaan atau eksploitasi sumber daya alam dan manusia, melainkan sebagai bentuk pelayanan yang bertanggung jawab kepada seluruh makhluk ciptaan Allah serta pemenuhan amanah Ilahi. Dengan demikian, setiap langkah pembangunan menjadi manifestasi dari kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral, yang menegaskan posisi manusia sebagai khalifah yang memakmurkan bumi dengan penuh keadilan dan kerendahan hati.

Dalam praktik kebijakan pembangunan yang mengusung etika *khidmah*, pemerintah dan pemangku kepentingan didorong untuk menjalankan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama kelompok rentan dan marjinal. Misalnya, program pembangunan desa berbasis kearifan lokal yang menghormati budaya dan lingkungan sekitar menjadi wujud nyata pelayanan yang memuliakan harkat dan martabat manusia tanpa merusak ekosistem.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mengedepankan prinsip keberlanjutan seperti penggunaan energi terbarukan, konservasi sumber daya alam, dan desain ramah lingkungan merupakan manifestasi dari *khidmah* kepada bumi sebagai amanah Allah. Praktik ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya soal percepatan ekonomi, tetapi juga pemeliharaan kehidupan generasi mendatang.



Contoh lain adalah kebijakan sosial yang memprioritaskan perlindungan dan pemberdayaan mustadh'afin kaum yang paling rentan secara ekonomi dan sosial dengan menyediakan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang adil. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan, tetapi juga sarana keadilan sosial dan inklusi yang nyata.

Melalui semua ini, konsep *khidmah* dalam pembangunan menuntun pada paradigma baru yang menempatkan manusia, alam, dan nilai spiritual sebagai pusat orientasi pembangunan, bukan sekadar angka statistik dan pertumbuhan material semata.

Dalam kerangka ekonomi barokah, pembangunan melampaui sekadar akumulasi infrastruktur fisik atau lonjakan angka statistik yang abstrak. Ia adalah proses pemanusiaan yang holistik dan terintegrasi dengan nilai-nilai spiritual, keadilan sosial, serta keseimbangan ekologis. Pembangunan yang diberkahi bukan pembangunan yang tercerabut dari akar moralitas dan nurani, melainkan sebuah medium sakral untuk mewujudkan rahmat bagi semesta raya *rahmatan lil-ʿālamīn*. Melalui pendekatan ini, pembangunan menjadi sarana transformasi yang tidak hanya memperbaiki kualitas hidup manusia secara material, tetapi juga menumbuhkan harmoni antara manusia, lingkungan, dan Sang Pencipta.

Dalam implementasinya, pembangunan yang berlandaskan ekonomi barokah menekankan pada prinsip-prinsip keberlanjutan yang holistik. Misalnya, konsep *maslahah* dalam fiqh Islam mendorong setiap kebijakan pembangunan untuk selalu mempertimbangkan manfaat terbesar bagi umat dan menghindari kerusakan (*mafsadah*) baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis (Al-Raisuni, 2016). Oleh karena itu, proyek pembangunan tidak hanya dinilai dari efisiensi ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan hidup dan kohesi sosial masyarakat.

Contoh nyata penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam program-program pembangunan berkelanjutan di beberapa komunitas pesantren yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam



dengan pendidikan nilai spiritual. Pesantren seperti ini tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademis dan profesional, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (Nasution, 2018).

Selain itu, konsep *adl* (keadilan) yang menjadi landasan ekonomi barokah menuntut redistribusi sumber daya secara berkeadilan, terutama kepada kelompok mustadh'afin mereka yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembangunan (Chapra, 2008). Kebijakan publik yang mengutamakan pemberdayaan UMKM, koperasi syariah, dan perlindungan terhadap petani kecil adalah contoh konkrit bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam pembangunan.

Dengan demikian, ekonomi barokah menegaskan bahwa pembangunan bukan sekadar urusan angka dan pertumbuhan, melainkan sebuah proses integral yang memadukan aspek materi dan spiritual dalam bingkai keberkahan dan tanggung jawab Ilahi.

Pembangunan yang barokah ditandai oleh beberapa karakter fundamental yang berakar kuat pada nilai-nilai spiritual dan sosial keislaman. *Pertama*, pembangunan ini menumbuhkan kesadaran syukur (*shukr*) atas nikmat Ilahi, menginternalisasi *qana'ah* sebagai sikap batin yang mensyukuri kecukupan, dan menghidupkan *rahmah* sebagai ruh dalam setiap interaksi sosial. Dengan demikian, pembangunan yang diberkahi tidak sekadar soal angka dalam anggaran atau kemajuan teknologi, melainkan juga tentang metamorfosis moral dan spiritual yang menjadi pondasi perubahan sejati.

Kedua, pembangunan barokah bersifat inklusif dan partisipatif, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam prosesnya. Ia menolak pendekatan elitis, teknokratis, dan top-down yang mengabaikan suara rakyat kecil dan kebijaksanaan lokal. Prinsip *syūrā* (musyawarah) menjadi landasan fundamental, sehingga pembangunan tidak hanya mengejar efisiensi birokrasi, tetapi juga menegakkan keadilan dan kesetaraan sosial.



Ketiga, pembangunan ini memuliakan relasi sosial dengan mempererat jaringan kasih sayang (*ta'āwun*), bukan memperlebar jurang ketimpangan. Ketika manfaat pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir elite, keberkahan akan terhalang oleh kezhaliman struktural. Oleh karenanya, pembangunan barokah bertujuan merapatkan jarak sosial, memperkuat solidaritas, dan membangun masyarakat sebagai komunitas yang harmonis dan saling menjaga.

Keempat, pembangunan yang barokah menjaga keseimbangan ekologis sebagai bagian integral dari amanah Ilahi. Alam tidak diperlakukan sebagai objek yang harus ditaklukkan atau dieksploitasi, melainkan sebagai titipan yang harus dirawat dan dijaga kelestariannya. Siklus kehidupan, kualitas air, tanah, dan udara dihormati sebagai bagian dari tatanan ciptaan yang sakral. Pendekatan ini menolak logika pembangunan yang semata-mata mengejar keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan lingkungan.

Praksis dari visi ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret berikut:

- 1) Pembangunan berbasis komunitas yang menghargai pengetahuan lokal, relasi sosial yang hidup, serta kearifan yang teruji oleh sejarah. Pendekatan ini bukan penolakan terhadap modernitas, melainkan sinergi antara teknologi, tradisi, dan spiritualitas yang menjadikan pembangunan lebih berkelanjutan dan bermakna.
- 2) Musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*) yang inklusif, bukan hanya prosedural formalitas, tetapi substantif memberi ruang bagi suara marjinal petani kecil, perempuan, tokoh adat, dan pemuka agama. Musyawarah dalam tradisi Islam bukan sekadar ritual administratif, melainkan manifestasi dari keadilan deliberatif yang mengedepankan kepentingan bersama.
- 3) Evaluasi pembangunan yang tidak hanya kuantitatif, melainkan juga kualitatif spiritual dan sosial. Keberhasilan pembangunan diukur bukan dari tinggi gedung atau jumlah investasi, melainkan dari ketenteraman (*sakīnah*), kekuatan ikatan sosial, dan tumbuhnya rasa memiliki bersama (*'izzah*). Indikator-indikator



ini menegaskan bahwa kemajuan sejati adalah harmoni antara materi dan jiwa.

- 4) Integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam seluruh siklus pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dengan fokus pada perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Prinsip ini menjamin arah pembangunan yang holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi Islam sebagai rahmatan lil-'ālamīn.

Pembangunan yang spiritual bukanlah pembangunan yang lamban, tetapi pembangunan yang berlandaskan hikmah. Ia tidak mengabaikan teknologi, melainkan menundukkan teknologi agar tunduk pada nilai-nilai etika dan kebermaknaan. Ia tidak menolak investasi dan pertumbuhan, tetapi menempatkan *maslahat* dan *'adālah* kebaikan bersama dan keadilan distributif sebagai poros kebijakan. Ia tidak alergi pada kemajuan, tetapi menyertainya dengan kesadaran mendalam akan keterbatasan manusia, kerentanan makhluk, dan supremasi kehendak Ilahi.

Pembangunan semacam ini tidak sekadar membangun gedung dan jalan, tetapi juga membangun *jiwa kolektif* bangsa: jiwa yang sadar bahwa setiap jengkal perubahan harus dimandikan oleh *niat yang ikhlas, tanggung jawab sosial, dan komitmen spiritual*.

Maka, pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menyentuh langit bukan hanya karena bangunannya tinggi menjulang, tetapi karena hati-hati manusianya tertunduk dalam *dzikir, syukur*, dan rasa *amanah* terhadap sesama dan lingkungan. Ia bukan tentang kemegahan visual, tetapi tentang kedalaman makna. Ia tidak berkompetisi dalam membangun simbol, tetapi berlomba dalam mewujudkan *rahmah* dan *keadilan*.

Dengan kata lain, pembangunan spiritual adalah pembangunan yang menjadikan *tauhid* sebagai arsitek utama: membangun bukan untuk memperkuat ego manusia, tetapi untuk memuliakan kehidupan dalam kehadiran Tuhan.



D. INTEGRASI NILAI ISLAM DALAM EKONOMI MAKRO DAN FISKAL

Transformasi menuju ekonomi barokah tidak berhenti pada praktik individual atau relasi mikro dalam perdagangan sehari-hari; ia menuntut pergeseran paradigma secara struktural. Perubahan ini harus menyentuh jantung sistem ekonomi makro dan kebijakan fiskal, yang selama ini terlalu sering terjebak dalam logika sekuler, teknokratis, dan angka-angka yang dingin. Dalam kerangka ini, ekonomi barokah tidak hanya bertanya: *seberapa besar pertumbuhan?*, tetapi juga *untuk siapa pertumbuhan itu hadir?*, *siapa yang ditinggalkan?*, dan *nilai apa yang disertakan dalam prosesnya?*

Dalam perspektif Islam, anggaran negara (al-muwāzanah al-‘āmmah) bukan sekadar alat stabilisasi makroekonomi atau instrumen untuk menarik kepercayaan pasar global. Ia adalah *amanah kolektif* yang diemban negara sebagai *khalifah fi al-ardh* penanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan penjaga keadilan sosial. Fungsi utama dari anggaran bukan untuk memenuhi target defisit atau mengejar rating kredit internasional, tetapi untuk menghidupkan prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī‘ah: melindungi jiwa (ḥifẓ al-naḥs), harta (ḥifẓ al-māl), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-naṣl), dan agama (ḥifẓ al-dīn).

Anggaran yang barokah adalah anggaran yang memihak bukan dalam arti populisme jangka pendek, tetapi dalam makna spiritual: berpihak kepada yang miskin, yang terpinggirkan, dan yang tidak bersuara. Ia menjadikan kebijakan fiskal sebagai *wasilah* (jalan) untuk menebarkan rahmat (*rahmatan lil-‘ālamīn*), bukan sekadar sebagai alat kontrol ekonomi. Sebab dalam Islam, negara tidak netral secara moral ia harus menjadi pelayan keadilan dan instrumen penyelamat bagi mereka yang tidak mampu memperjuangkan haknya sendiri.

Secara normatif, sistem ekonomi Islam tidak memandang belanja negara semata sebagai instrumen fiskal yang teknokratik, tetapi sebagai amanah ilahiyah yang sarat dengan dimensi etis dan transendental. Dalam logika Islam, setiap alokasi anggaran merupakan bentuk



tanggung jawab moral yang harus diarahkan untuk menghadirkan *maslahah* ‘ammah yakni kebaikan kolektif yang tidak hanya berdimensi material, tetapi juga spiritual dan sosial.

Negara, dalam pandangan Islam, bukan sekadar operator kebijakan, tetapi *wakil moral* yang diberi mandat untuk mewujudkan kesejahteraan melalui prinsip ‘*adālah* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *amanah* (integritas). Maka arah belanja publik tidak boleh tunduk pada logika pasar bebas atau tekanan elit oligarkis, tetapi harus berpijak pada nilai-nilai wahyu yang termanifestasi dalam prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī‘ah melindungi kehidupan, akal, agama, keturunan, dan harta secara simultan dan berkelanjutan.

Dalam kerangka ini, anggaran negara menjadi sarana *ibadah institusional* bukan hanya upaya administratif atau strategi ekonomi. Ia adalah jalan untuk memuliakan yang lemah, mengangkat martabat yang tertindas, dan menyuburkan tatanan sosial yang berkeadilan. Karena itu, belanja publik yang diberkahi adalah yang mampu menyentuh kebutuhan rakyat secara nyata, memberdayakan komunitas akar rumput, dan menciptakan tatanan yang tidak hanya makmur, tetapi juga bermartabat.

Pertama, pengentasan kemiskinan (al-qashr ‘ala al-ḥājah) harus ditempatkan sebagai tujuan primer dalam kebijakan fiskal negara. Ini bukan hanya amanat sosial, melainkan seruan moral yang bersumber langsung dari wahyu. Al-Qur’an secara eksplisit menegaskan dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 177 bahwa esensi dari *al-birr* (kebaikan sejati) bukan terletak pada formalitas ritual, tetapi pada keberpihakan nyata terhadap mereka yang terpinggirkan: “...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan mereka yang meminta...”

Ayat ini bukan hanya seruan empati, tetapi kerangka normatif bagi arah kebijakan publik yang berkeadilan. Ia menyiratkan bahwa spiritualitas tidak boleh terpisah dari praksis sosial; bahwa keimanan yang otentik menuntut ekspresi konkret dalam bentuk solidaritas ekonomi. Dalam konteks ini, *al-qashr ‘ala al-ḥājah* menjadi prinsip



distribusi yang berakar pada cinta yakni memberikan *harta yang dicintai*, bukan sekadar yang tersisa.

Oleh karena itu, dalam kerangka ekonomi barokah, anggaran negara tidak boleh dibimbing semata oleh kalkulasi makroekonomi atau kepentingan elit, tetapi harus berpijak pada etika keberpihakan kepada kelompok paling rentan mereka yang berada di tepi kehidupan sosial: fakir, miskin, anak yatim, dan musafir. Di sinilah negara menjadi instrumen rahmat, dan APBN bukan sekadar dokumen fiskal, tetapi *manifesto moral* dari sebuah komitmen kebangsaan yang berpihak dan memulihkan.

Kedua, penguatan sektor produktif rakyat seperti UMKM, pertanian, dan ekonomi lokal harus diposisikan sebagai strategi struktural dalam membangun kedaulatan ekonomi yang berbasis pada keberdayaan dan keadilan. Dalam perspektif Islam, kekuatan ekonomi tidak boleh terpusat pada segelintir elite atau korporasi besar yang lepas dari akar sosial. Sebaliknya, Islam mengidealkan model pembangunan yang partisipatif dan menyeluruh, di mana distribusi aset, akses terhadap sumber daya, dan peluang ekonomi tersebar merata kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah struktur sosial.

Rasulullah ﷺ sendiri membangun fondasi masyarakat Madinah dengan menguatkan solidaritas ekonomi antarkelompok, memperkuat pasar lokal, dan mendorong keterlibatan aktif para sahabat dalam aktivitas produktif yang adil dan bermartabat. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, penguatan sektor produktif rakyat adalah bagian dari penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan penguatan kehidupan sosial yang berkelanjutan.

UMKM, koperasi, pertanian keluarga, dan ekonomi pesantren bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga simbol dari ekonomi yang hidup dan berpihak. Mereka menjaga relasi manusia, memperkuat ketahanan komunitas, dan menciptakan lapangan kerja yang berbasis nilai. Oleh karena itu, kebijakan negara tidak cukup hanya memfasilitasi dari sisi teknis dan administratif, tetapi juga harus



mengalirkan keberpihakan moral dan insentif afirmatif: dalam bentuk pembiayaan syariah yang inklusif, pelatihan berkelanjutan, jaminan pasar yang adil, serta perlindungan dari praktik predatory ekonomi modern.

Dengan demikian, memperkuat sektor produktif rakyat bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan *ijtihad sosial* untuk mewujudkan ekonomi yang manusiawi, bermartabat, dan membawa keberkahan bagi bangsa.

Ketiga, investasi sosial dalam bidang pendidikan dan kesehatan bukan sekadar kebijakan teknokratis atau kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari ibadah kolektif umat dan tanggung jawab negara sebagai wakil amanah publik. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah cahaya yang menuntun jiwa menuju pengenalan akan Tuhan dan pemaknaan hidup secara utuh. Sementara kesehatan adalah prasyarat utama untuk menjalankan amanah kehambaan dan pengabdian sosial secara optimal.

Oleh karena itu, alokasi anggaran negara untuk pendidikan dan kesehatan tidak boleh dimaknai semata sebagai belanja rutin birokrasi, tetapi sebagai *ṣadaqah jariyah* amal berkelanjutan yang menghidupkan potensi manusia dan menyuburkan keberkahan sosial dalam jangka panjang. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa salah satu amal yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah wafat adalah ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya (HR. Muslim). Hal ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi proses memanusiakan manusia secara ruhani, intelektual, dan sosial.

Demikian pula dalam kesehatan, Islam meletakkan perhatian besar terhadap penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai salah satu dari lima tujuan utama *maqāṣid al-sharīʿah*. Negara yang abai terhadap hak rakyat atas layanan kesehatan yang layak dan bermartabat sejatinya sedang menafikan ruh keadilan dan kasih sayang sebagai fondasi utama tata kelola dalam Islam.



Maka, pembangunan rumah sakit yang terjangkau, pemberdayaan puskesmas, penyediaan air bersih, serta kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai tauhid dan keterampilan hidup adalah bentuk konkret dari investasi sosial yang membawa *barokah* yakni kemaslahatan yang berkelanjutan, menyembuhkan luka struktural, dan memuliakan kehidupan manusia dalam kerangka ubudiyah.

Keempat, pendanaan sektor keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan infaq harus dipandang bukan sebagai amal pelengkap atau sekadar ekspresi kedermawanan individual, melainkan sebagai pilar utama dalam sistem distribusi kekayaan yang berbasis iman, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kolektif umat. Dalam kerangka ekonomi Islam, instrumen-instrumen ini bukanlah sekadar ibadah privat, tetapi sistem publik yang menghubungkan dimensi spiritual dengan tatanan struktural.

Zakat, misalnya, adalah kewajiban yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan sunnah sebagai mekanisme pelepasan hak sosial dari harta pribadi, yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan menyeimbangkan struktur sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah: 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." Hal ini menegaskan bahwa zakat bukan semata instrumen ekonomi, tetapi sarana penyucian moral dan pembebasan sosial dari ketimpangan.

Wakaf dan infaq pun demikian. Keduanya menciptakan jejak ekonomi yang berkelanjutan dan maslahat lintas generasi mewujudkan bentuk *altruistik asset redistribution* yang tidak hanya berfungsi di masa kini, tetapi juga menjadi *sadaqah jariyah* yang mengalirkan keberkahan di masa depan. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana institusi wakaf membiayai pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial tanpa harus bergantung pada beban fiskal negara yang berat.

Dalam konteks ini, peran negara sangatlah strategis. Negara tidak cukup hanya mengakomodasi sistem keuangan sosial Islam secara



simbolik, tetapi harus secara aktif mengintegrasikan instrumen-instrumen tersebut ke dalam arsitektur fiskal nasional baik melalui regulasi yang mendukung, sistem pengelolaan yang profesional dan akuntabel, maupun insentif yang memudahkan partisipasi masyarakat luas.

Pendekatan ini bukan sekadar bentuk efisiensi fiskal, tetapi aktualisasi dari visi Islam yang memadukan *maqāsid al-sharī'ah* dengan tata kelola keuangan publik. Di sinilah ekonomi barokah menampilkan keunggulannya: membangun sistem yang tidak hanya produktif dan efisien, tetapi juga sarat dengan nilai spiritual, empati sosial, dan orientasi akhirat. Maka zakat bukan hanya menolong yang miskin, tetapi juga membebaskan yang kaya dari kerakusan. Wakaf bukan hanya instrumen legal, tetapi warisan keabadian untuk peradaban.

Dengan demikian, belanja negara dalam sistem Islam bukanlah alat akumulasi kekuasaan, melainkan sarana untuk merawat kehidupan dan menegakkan keadilan. Ia bukan sekadar mekanisme fiskal yang tunduk pada kalkulasi teknokratis, tetapi cerminan dari *akhlāq* kenegaraan yang dilandasi iman. Setiap rupiah dalam anggaran publik bukan hanya angka dalam neraca, melainkan amanah yang harus dijawab di hadapan Tuhan dan rakyat.

Belanja negara, dalam perspektif Islam, mengemban misi *tanshī'ah li al-ḥayāh* menghidupkan kehidupan: memberikan akses terhadap pendidikan, menjamin kesehatan, memastikan pangan yang layak, dan menciptakan ruang ekonomi yang adil dan berdaya. Ia menjadi alat untuk menebar rahmat, bukan memperkuat dominasi; untuk mengangkat yang tertindas, bukan menambah privilese penguasa.

Dalam kerangka ini, belanja publik mencerminkan etika spiritual yang berpihak pada yang lemah, menyuarakan kepedulian terhadap *mustadh'afin*, dan memuliakan martabat manusia sebagai *khalīfah fil-ard*. Setiap kebijakan anggaran adalah cermin dari ruh pengabdian bukan hanya kepada sistem, tetapi kepada makhluk dan kepada Sang



Pemberi Hidup. Ia adalah ekspresi nyata dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang hidup dalam struktur negara: melindungi kehidupan, menjamin keadilan, dan memperluas keberkahan.

Dalam sejarah Islam, Baitul Māl bukan sekadar kas negara, tetapi jantung moral dari tata kelola publik. Ia berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengelola surplus, menyalurkan dana publik, dan membangun sistem yang berpihak kepada *mustadh'afin* mereka yang tertindas oleh ketimpangan dan dilupakan oleh pasar. Di tangan para khalifah yang adil, Baitul Māl menjadi benteng solidaritas sosial dan kendaraan keadilan struktural yang ditopang oleh nilai-nilai transenden.

Dalam konteks kontemporer, spirit Baitul Māl dapat direvitalisasi melalui integrasi antara sistem keuangan sosial Islam zakat, infaq, sedekah, wakaf dan kebijakan fiskal negara. Zakat tidak cukup dikelola secara sektoral atau privat, tetapi perlu menjadi bagian dari arsitektur keuangan nasional yang holistik. Negara bukan hanya bertindak sebagai *regulator netral*, melainkan sebagai *agen aktif dari keadilan distributif* yang berlandaskan nilai spiritual dan mandat ilahiyah.

Sinergi ini bukan semata rekayasa teknokratik, melainkan ikhtiar etis untuk menghadirkan kembali esensi *Baitul Māl*: mengelola kekayaan bukan untuk menumpuknya, tetapi untuk mengalirkannya; bukan untuk mengabadikan elite, tetapi untuk memuliakan rakyat. Dalam skema ini, anggaran negara dan dana zakat bukan dua entitas yang terpisah, melainkan dua sayap dari visi pembangunan Islam yang holistik yang menyatukan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan kebutuhan riil masyarakat.

Menurut Monzer Kahf (2006), integrasi sistem keuangan Islam ke dalam kerangka fiskal modern bukan hanya mungkin, tetapi juga mendesak. Melalui optimalisasi zakat, wakaf produktif, dan instrumen-instrumen keuangan syariah lainnya, negara dapat membangun sistem fiskal yang lebih etis, transparan, dan partisipatif. Zakat yang dikelola secara profesional dan terintegrasi tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menjadi sumber daya



fiskal yang tidak bergantung pada utang atau pajak regresif. Wakaf produktif, di sisi lain, berfungsi sebagai penyangga ekonomi sosial yang berkelanjutan menghasilkan manfaat lintas generasi tanpa membebani APBN.

Model ini menegaskan bahwa kesejahteraan tidak selalu harus dibayar dengan eksploitasi atau utang, melainkan dapat dibangun di atas fondasi solidaritas dan keberkahan. Pendekatan ini juga menjawab kegelisahan global terhadap krisis etika dalam pengelolaan fiskal modern di mana banyak negara tersandera oleh logika neoliberal: deregulasi, privatisasi, dan efisiensi teknokratis yang kering dari nilai.

Islam menawarkan jalan tengah antara negara yang terlalu dominan dan pasar yang terlalu bebas. Dalam visi ini, negara tetap menjalankan peran strategis sebagai pengelola keadilan distributif, namun dengan pendekatan yang berbasis nilai, bukan sekadar angka. Zakat dan wakaf tidak diposisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai *pilar utama* dalam struktur fiskal yang berkeadilan.

Dengan demikian, integrasi sistem keuangan Islam ke dalam kebijakan fiskal bukan semata inovasi, tetapi juga restorasi mengembalikan orientasi ekonomi pada prinsip maqāṣid al-sharīʿah: melindungi jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama. Di tengah dunia yang mencari arah baru, pendekatan ini bukan hanya relevan, tetapi juga memberi harapan akan kemungkinan masa depan yang lebih manusiawi dan bermartabat.

Di Indonesia, upaya integrasi keuangan Islam ke dalam kebijakan fiskal negara mulai menampakkan arah yang menjanjikan. Penguatan kelembagaan seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), regulasi wakaf tunai, hingga kebijakan insentif pajak untuk donasi keagamaan menunjukkan adanya ikhtiar untuk merekognisi potensi instrumen keuangan syariah sebagai bagian dari tata kelola fiskal nasional.

Namun demikian, langkah-langkah ini masih bersifat fragmentaris dan seringkali terjebak pada pendekatan administratif semata, belum menjelma menjadi kerangka fiskal yang menyatu dan berdimensi spiritual. Agar transformasi ini benar-benar bermakna,



diperlukan perubahan paradigma yakni desain fiskal yang tidak netral terhadap nilai. Fiskal yang barokah bukan sekadar efisien, tetapi juga berpihak.

Artinya, negara harus secara sadar dan sistematis menata ulang struktur penerimaan dan pengeluaran publik agar sesuai dengan prinsip *rahmatan lil-‘ālamīn*. Penerimaan negara tidak hanya bergantung pada pajak konvensional, tetapi juga membuka ruang bagi zakat sebagai sumber fiskal yang sah dan terhormat. Di sisi lain, pengeluaran negara tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan atau stabilitas makroekonomi, tetapi harus menyentuh mereka yang paling terpinggirkan kaum mustaḍ‘afīn sebagai prioritas utama.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan distributif, kesalehan sosial, dan keberkahan spiritual ke dalam kerangka fiskal, ekonomi Indonesia tidak hanya akan tumbuh, tetapi juga akan mensejahterakan secara lebih merata, bermartabat, dan berkesinambungan. Di sinilah ekonomi barokah menemukan bentuk sistemiknya: bukan dalam jargon, tetapi dalam struktur anggaran; bukan dalam niat semata, tetapi dalam keberpihakan nyata.

Maka, ekonomi makro yang islami bukanlah ekonomi yang steril dari nilai, tetapi ekonomi yang menjadikan *tauhid* sebagai fondasi ontologis dan etis dalam setiap kebijakan yang menginternalisasi kesadaran ilahiyah dalam angka-angka, grafik pertumbuhan, hingga struktur neraca. Dalam kerangka ini, ekonomi tidak lagi semata urusan teknis dan profitabilitas, tetapi menjadi bagian dari pengabdian yang lebih luas: bagaimana harta dikelola, rezeki dibagikan, dan kebijakan dirancang agar menjadi jalan menuju keberkahan dan keadilan.

Ekonomi barokah tidak sekadar berbicara tentang surplus fiskal atau pertumbuhan PDB, tetapi tentang seberapa besar dampak nyata dari surplus itu terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan pemulihan martabat mereka yang terpinggirkan. Surplus tidak menjadi milik elite, melainkan menjadi *rahmat yang mengalir ke bawah* ke sawah petani, ke pasar rakyat, ke sekolah dan



klinik di pelosok. Di situlah letak keberkahan: bukan pada angka yang tinggi, tetapi pada hati yang tenang dan masyarakat yang tertopang.

Dengan demikian, ekonomi makro Islami adalah ekonomi yang memihak tanpa kehilangan akurasi; yang transenden tanpa meninggalkan rasionalitas; dan yang manusiawi tanpa kehilangan arah kebijakan. Inilah wajah ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga *rahmatan lil-‘ālamīn*.

Ekonomi barokah bukan sekadar utopia spiritual yang melayang di langit-langit idealisme. Ia bukan mimpi indah yang terpisah dari realitas, melainkan sebuah sistem yang mungkin dan mendesak untuk dirancang, diperjuangkan, dan diterapkan. Dari ruang kelas yang menanamkan nilai, hingga meja parlemen yang menetapkan kebijakan, ekonomi barokah menuntut kerja bersama: antara intelektual dan legislatif, antara umat dan negara.

Ia lahir dari iman, tetapi tidak berhenti di mimbar. Ia bertumbuh melalui struktur yang adil dan transparan; dibangun di atas kejujuran individu, diperkuat oleh solidaritas komunitas, dan diwujudkan oleh keberpihakan negara kepada yang lemah. Sebab dalam Islam, visi keadilan sosial bukan sekadar ajaran moral, tetapi mandat peradaban.

Dengan kata lain, ekonomi barokah adalah jalan tengah antara langit dan bumi antara nilai-nilai transenden dan mekanisme duniawi. Ia adalah ikhtiar menanam tauhid dalam kebijakan fiskal, menghadirkan empati dalam perencanaan pembangunan, dan menyemaikan rahmah dalam denyut kehidupan ekonomi umat.

Ketika nilai-nilai barokah menyatu dalam pendidikan yang mencerdaskan nurani, kebijakan publik yang berpihak pada keadilan, pembangunan yang menjunjung etika, serta sistem fiskal yang dijiwai rahmah dan tanggung jawab transendental, maka ekonomi tidak lagi dipahami sebagai mesin produksi dan konsumsi belaka.

Ia menjelma menjadi jalan peradaban yang memadukan kebutuhan dengan kebermaknaan, menyeimbangkan efisiensi dengan kasih sayang, serta menghubungkan realitas dunia dengan



orientasi akhirat. Dalam ekonomi semacam ini, angka bukan sekadar statistik, tetapi cermin nilai; pertumbuhan bukan sekadar ekspansi, tetapi perluasan kebermanfaatan; dan kebijakan bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi wujud kasih sayang sosial yang terinstitusi.

Dalam terang barokah, angka-angka kembali bernyawa, bukan sekadar bilangan kering tanpa ruh. Pembangunan menemukan arah bukan hanya ke depan, tetapi juga ke dalam, ke kedalaman makna dan nilai. Dan manusia, di tengah pusaran sistem dan pasar, kembali mengenali jati dirinya bukan sebagai konsumen rakus yang kehilangan arah, melainkan sebagai khalifah yang amanah: makhluk yang ditugaskan untuk merawat bumi, menegakkan keadilan, dan menyalurkan rahmat.

Di sinilah ekonomi bukan lagi sekadar urusan dunia, tetapi jalan pulang menuju Tuhan dalam kerja, dalam transaksi, dalam kebijakan, dan dalam seluruh denyut kehidupan.





BAB 9

PENUTUP

EKONOMI BAROKAH SEBAGAI GERAKAN PERADABAN

Sepanjang lintasan sejarah peradaban, ekonomi tidak pernah sepenuhnya netral. Ia senantiasa menjadi instrumen kekuasaan yang berpihak baik pada pemakmuran atau peminggiran, pada pembebasan atau reproduksi penindasan. Dalam konteks kontemporer, ketika indikator kuantitatif menggantikan makna substantif, konsumsi diasumsikan sebagai puncak eksistensi, dan pasar menjelma sebagai institusi hegemonik baru, gagasan tentang ekonomi barokah muncul bukan sebagai utopia normatif, melainkan sebagai kritik paradigmatik sekaligus tawaran etis-teologis. Ekonomi barokah merepresentasikan upaya integratif yang menghubungkan dimensi transendental dan imanen antara bumi dan langit, rezeki dan ridha, mekanisme pasar dan prinsip keadilan, rasionalitas ekonomi dan kesadaran spiritual.

Ekonomi barokah tidak dapat direduksi semata sebagai sistem teknis atau instrumen kebijakan fiskal. Ia merupakan ekspresi dari suatu gerakan peradaban yang merekonstruksi ulang relasi antara manusia, kekayaan, alam, dan Tuhan. Dalam kerangka ini, ekonomi tidak sekadar dipahami sebagai mekanisme produksi dan distribusi, melainkan sebagai ranah moral dan spiritual yang sarat nilai. Gagasan ekonomi barokah berupaya melepaskan ekonomi dari jebakan kuantifikasi dan instrumentalisme, serta mengembalikannya



kepada akar ontologisnya: bahwa harta adalah amanah ilahiyah, pasar adalah medium amal, dan pembangunan adalah manifestasi ibadah sosial. Keberkahan dalam konteks ini tidak diukur melalui parameter akumulasi material atau pertumbuhan eksponensial, melainkan melalui kebermanfaatan yang adil, distribusi yang merata, dan kemampuan ekonomi untuk menumbuhkan kehidupan yang bermartabat.

Inilah jalan baru dalam ranah ekonomi yang tidak sekadar mensejahterakan tubuh, tetapi juga menenteramkan jiwa. Ia adalah ikhtiar kolektif yang menyatukan kepentingan duniawi dan ukhrawi membangun sebuah dunia yang tidak hanya maju dalam materi, tetapi juga bermakna dalam nilai. Dunia yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga dipenuhi rahmat, keadilan, dan keberkahan. Dengan semangat itulah, ekonomi barokah menjadi harapan dan panggilan untuk mewujudkan keseimbangan hakiki antara kemakmuran lahir dan ketenangan batin.

A. MEMBANGUN BUDAYA REZEKI YANG BERKAH DAN CUKUP

Dalam konteks peradaban modern yang didominasi oleh kompetisi yang terus menerus tanpa batas, ekspansi ketamakan yang meluas, serta logika akumulasi kapital yang tak terhentikan, ekonomi barokah muncul sebagai respons kritis sekaligus solusi normatif yang menuntut reorientasi paradigmatis yang mendalam. Model ekonomi ini menyerukan sebuah perubahan arah yang bersifat fundamental dan transformatif, yaitu beranjak dari paradigma menumpuk kekayaan secara eksploitatif menuju ekonomi berbagi yang inklusif dan berkeadilan; dari relasi penguasaan yang menindas dan mendistorsi keseimbangan sosial menuju pelayanan yang berorientasi pada kemaslahatan umat; serta dari ambisi tanpa henti yang mengikis kesejahteraan batin menuju prinsip qana'ah sebuah sikap sufistik tentang rasa cukup yang menenangkan jiwa sekaligus membebaskan hati dari belenggu keserakahan.



Secara konseptual dan filosofis, dalam tradisi Islam, rezeki tidak sekadar dipahami sebagai hak individual atau komoditas yang diperjuangkan dalam arena pasar bebas, melainkan sebagai amanah ilahiyah yang mengandung dimensi etis dan spiritual yang mendalam. Amanah ini memikul tanggung jawab kolektif yang mengikat seluruh lapisan masyarakat untuk menjalankan distribusi kekayaan secara adil, niat yang tulus, dan kejujuran dalam pemanfaatan sumber daya. Pemikiran ini selaras dengan pandangan M. Umer Chapra (2000) yang menegaskan bahwa ekonomi Islam menekankan integrasi nilai-nilai spiritual dengan mekanisme ekonomi agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan material dan dimensi moral.

Dalam kerangka ekonomi barokah, distribusi dan penggunaan harta bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi manifestasi tanggung jawab sosial dan spiritual yang menyatukan manusia dengan Tuhannya dan sesama. Model ini menawarkan paradigma pembangunan yang berkelanjutan dan bermartabat, yang tidak hanya menilai kemakmuran melalui indikator kuantitatif seperti Produk Domestik Bruto, tetapi juga mengedepankan keberpihakan pada yang lemah, penguatan solidaritas sosial, dan keberlanjutan ekologis. Oleh karena itu, ekonomi barokah merupakan perwujudan aktualisasi nilai-nilai tauhid dan keadilan sosial dalam dinamika kehidupan ekonomi kontemporer, sekaligus sebuah kerangka normatif yang dapat membimbing perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan keberkahan dunia-akhirat.

Seorang pedagang yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas lebih berharga daripada seribu teori ekonomi yang hanya berhenti pada ranah konseptual. Kejujuran dalam transaksi bukan sekadar norma etis, melainkan fondasi ontologis bagi keberlangsungan sistem ekonomi yang berkeadaban. Demikian pula, seorang petani yang menanam dengan niat ikhlas untuk maslahat umat dan harapan keberkahan Tuhan memanifestasikan makna ekonomi yang jauh melampaui spekulasi dan dinamika volatilitas pasar global yang sering kali bersifat abstrak dan terputus dari realitas sosial.



Dalam budaya ekonomi yang berlandaskan prinsip barokah, keberhasilan tidak diukur semata oleh indikator material seperti laba atau pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh dimensi spiritual dan sosial yang menghantarkan ketenangan batin, memperluas kebermanfaatan kolektif, serta meneguhkan kehadiran Ilahi dalam setiap proses transaksi. Paradigma ini mengembalikan makna ekonomi pada esensi hakiki sebagai sarana pengabdian dan pengelolaan amanah, di mana keberkahan menjadi tolok ukur utama keberhasilan, bukan sekadar akumulasi materi.

Dalam tradisi modern, ekonomi sering dipersepsi sebagai suatu sistem teknis yang berfokus pada angka-angka, efisiensi produksi, dan pertumbuhan materi semata. Namun, pendekatan seperti ini menyisakan ruang kosong yang besar: kekosongan makna dan spiritualitas dalam aktivitas ekonomi yang seharusnya menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Ekonomi barokah hadir sebagai paradigma alternatif yang tidak hanya melihat ekonomi sebagai mekanisme distribusi dan akumulasi kekayaan, melainkan sebagai jalan penghambaan dan pengabdian kepada Tuhan serta sesama manusia.

Ekonomi barokah menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka tauhid, yaitu kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segala aktivitas manusia di muka bumi adalah amanah dan ujian. Dalam konteks ini, setiap transaksi, produksi, dan distribusi bukan sekadar proses mekanis, melainkan kesempatan untuk menjalankan dzikir ingat kepada Allah melalui kerja yang jujur, niat ikhlas, dan tanggung jawab sosial. Setiap rupiah yang diperoleh bukan hanya simbol keuntungan materi, tetapi juga cermin keberkahan yang mengalir dari niat dan cara pengelolaan yang berlandaskan keadilan dan kasih sayang.

Lebih jauh, ekonomi barokah adalah manifestasi pembebasan spiritual dan sosial. Pembebasan dari budaya konsumsi berlebihan, dari ketamakan yang menggerogoti jiwa, serta dari dominasi struktur ekonomi yang menindas dan memecah belah komunitas. Dengan demikian, ekonomi menjadi medium yang menyejukkan hati dan



memerdekakan jiwa menjadikan ekonomi bukan sekadar alat memenuhi kebutuhan dunia, tetapi sarana membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam budaya ekonomi barokah, keberhasilan tidak lagi diukur semata oleh angka laba dan pertumbuhan statistik, melainkan oleh kualitas ketenangan batin, kebermanfaatan sosial, dan kehadiran Ilahi dalam setiap proses dan hasil kerja. Seorang pedagang yang jujur, seorang petani yang bekerja dengan niat maslahat dan harapan keberkahan, menjadi lebih berharga daripada spekulasi pasar yang kosong makna. Karena di balik aktivitas ekonomi, tersimpan dimensi etis dan spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan dan sesamanya, sekaligus menegaskan bahwa kesejahteraan sejati hanya bisa dicapai jika hati dan jiwa juga mendapatkan ketenangan dan keberkahan.

Dengan demikian, ekonomi barokah adalah upaya menyatukan aspek-aspek material dan spiritual dalam satu kesatuan yang holistik. Ia menolak reduksi ekonomi menjadi mesin semata dan mengembalikannya sebagai jalan suci pengabdian tempat di mana nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan kasih sayang menjadi fondasi yang tidak terpisahkan dari setiap transaksi dan aktivitas produksi. Di sinilah letak kekuatan ekonomi barokah: bukan hanya sebagai sistem ekonomi alternatif, tetapi sebagai transformasi peradaban yang mengangkat harkat manusia, menyuburkan solidaritas sosial, dan melahirkan keseimbangan ekologis demi kebaikan bersama.

B. EKONOMI BAROKAH: JALAN TENGAH ANTARA SPIRITUALITAS DAN KEADILAN

Ekonomi barokah secara tegas menolak dikotomi semu yang sering kali memisahkan antara spiritualitas dan realitas ekonomi sebagai dua ranah yang berbeda atau bertentangan. Paradigma ini tidak hadir sebagai utopia idealistik yang melayang jauh di awang-awang idealisme tanpa pijakan praktis, sekaligus bukan pula sistem



ekonomi eksploitatif yang mengorbankan martabat manusia demi pencapaian pertumbuhan material semata. Sebaliknya, ekonomi barokah menempuh jalan tengah al-mizān sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, yakni keseimbangan yang harmonis dan dinamis antara ruh dan jasad, antara dimensi langit dan realitas pasar, antara pengabdian ikhlas kepada Allah dan tanggung jawab sosial kepada sesama manusia.

Dengan memadukan nilai-nilai transenden dan praktik ekonomi yang konkret, ekonomi barokah menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh kehilangan dimensi spiritualnya, sekaligus harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Keseimbangan ini bukan hanya menjadi landasan etis, melainkan juga merupakan fondasi epistemologis dan aksiologis yang memungkinkan sistem ekonomi berjalan secara bermakna, berkeadaban, dan berkelanjutan.

Ekonomi barokah hadir bukan sekadar sebagai konsep religius sempit yang berfokus pada aspek ritual ibadah individual, melainkan sebagai paradigma komprehensif yang meresapi seluruh dimensi kehidupan sosial dan ekonomi secara holistik. Ia menempatkan kesalehan publik sebagai tonggak utama yakni aktualisasi nilai-nilai spiritual dalam bentuk keadilan struktural yang nyata, keberpihakan kepada kelompok rentan, dan pembersihan sistem ekonomi dari praktik-praktik eksploitasi dan kerakusan yang mendistorsi nilai kemanusiaan. Paradigma ini menuntut agar setiap tindakan ekonomi dilandasi oleh niat yang tulus dan ikhlas, diproses dengan integritas serta kejujuran, dan diatur melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial sebagai pangkal keberlanjutan. Dalam tradisi Islam, politik tanpa akhlak bukan sekadar kekurangan, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat, sementara ekonomi yang dipisahkan dari ruhaniyah hanya akan melahirkan kerusakan moral dan sosial yang merugikan semua pihak. Dengan demikian, ekonomi barokah berfungsi sebagai jembatan esensial yang menjembatani nilai-nilai transenden dengan praktik tata kelola sosial-ekonomi, membuka jalan bagi terbentuknya masyarakat yang tidak hanya makmur secara



material, tetapi juga bermartabat secara spiritual dan berkelanjutan secara ekologi. Melalui pendekatan ini, ekonomi kembali pada fitrahnya sebagai sarana pengabdian dan pembebasan, bukan sekadar mesin produksi dan konsumsi yang kehilangan makna.

Dengan paradigma ekonomi barokah, umat diajak untuk merancang dan membangun sistem ekonomi yang tidak semata-mata menekankan efisiensi teknis, melainkan juga menjwai nilai *rahmatan lil 'ālamīn* rahmat yang meliputi seluruh alam semesta. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada kemakmuran material, tetapi lebih jauh pada *maslahat* yang menyentuh dimensi sosial, moral, dan spiritual secara menyeluruh. Ekonomi barokah menempuh jalan tengah yang tidak bersifat kompromistis terhadap nilai-nilai luhur, melainkan bersifat visioner dan transformatif, yang mengintegrasikan relasi kosmik antara bumi dan langit, serta hubungan hakiki antara manusia dan Tuhannya.

Seperti yang ditegaskan oleh M. Umer Chapra (2000), “ekonomi Islam bukanlah sekadar alat penciptaan kekayaan, melainkan juga sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan hakiki.” Prinsip ini sejalan dengan konsep maqāṣid al-sharī‘ah yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*). Dengan demikian, ekonomi barokah membuka peluang bagi terciptanya keseimbangan yang harmonis antara kebutuhan duniawi dan aspirasi spiritual.

Melalui mekanisme ekonomi yang berlandaskan keadilan, etika, dan keberkahan, ekonomi barokah tidak hanya menegaskan pentingnya distribusi yang adil, tetapi juga mengingatkan bahwa “kekayaan yang sebenarnya adalah yang membuat hati menjadi tenang dan kehidupan menjadi bermakna” (Imam Al-Ghazali). Hal ini mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi sejati adalah proses yang menghubungkan manusia dengan tujuan akhir hidupnya yakni pengabdian kepada Tuhan dan pengelolaan amanah di bumi.



Dengan kata lain, ekonomi barokah menjadi jembatan moral dan sosial yang mempersatukan aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia, mewujudkan sistem yang tidak hanya mensejahterakan secara materi, tetapi juga menentramkan jiwa dan memuliakan martabat manusia serta lingkungan (Saeed, 2006). Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 177, “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah... dan memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir...”

Dengan demikian, ekonomi barokah bukan sekadar alternatif sistem ekonomi, tetapi sebuah paradigma hidup yang menyatukan bumi dengan langit, manusia dengan Tuhannya, dan keuntungan dengan keberkahan. Sebuah ikhtiar kolektif untuk membangun dunia yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga bermakna secara spiritual dan sosial.

C. MENUJU EKONOMI YANG MEMBAHAGIAKAN MANUSIA DAN DIRIDHAI TUHAN

Tujuan akhir dari ekonomi tidaklah semata-mata terbatas pada pertumbuhan statistik atau peningkatan konsumsi material, melainkan harus diarahkan pada *sa‘ādah* kebahagiaan yang menyeluruh dan seimbang, yang mencakup dimensi lahir dan batin, individual dan kolektif, serta duniawi dan ukhrawi. Dalam perspektif Islam, keberhasilan ekonomi bukan hanya diukur dari angka-angka makroekonomi, tetapi dari kemampuan sistem tersebut dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertanggung jawab.

Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]:201, doa seorang mukmin secara ringkas namun kaya makna mengandung orientasi ganda yang holistik: “*Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa ḥasanah, wa fil-ākhirati ḥasanah, wa qinaa ‘adhāban-nār*” (“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan



kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka”). Doa ini menjadi manifestasi tujuan utama kehidupan manusia, yang mengajak kita untuk menyeimbangkan antara pencapaian kesejahteraan duniawi dan kesiapan akhirat.

Menurut pemikiran M. Umer Chapra, *sa‘ādah* mencerminkan kesejahteraan komprehensif yang melampaui aspek material dan menyentuh aspek moral serta spiritual. Hal ini sesuai dengan konsep maqāṣid al-sharī‘ah yang menekankan perlindungan terhadap lima kebutuhan fundamental manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*). Dengan demikian, sistem ekonomi yang ideal adalah yang mampu memfasilitasi pencapaian kebahagiaan sejati melalui keadilan sosial, keberkahan, dan harmonisasi antara dunia dan akhirat.

Lebih jauh, Al-Ghazali dalam *Ihya Ulum al-Din* menegaskan bahwa kebahagiaan duniawi harus disertai dengan ketenangan batin dan kesucian jiwa, yang hanya dapat diraih apabila ekonomi berlandaskan nilai-nilai spiritual dan etika. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tanpa keseimbangan nilai akan menghasilkan kesenjangan, kerusakan sosial, dan penderitaan batin, yang bertentangan dengan makna *sa‘ādah* yang hakiki.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berfokus pada kuantitas seperti GDP, inflasi, atau konsumsi tetapi harus pula memprioritaskan kualitas kehidupan, kesejahteraan sosial, dan ketenteraman spiritual. Pendekatan ekonomi barokah mengajak kita untuk menempatkan manusia secara utuh di pusat pembangunan, sehingga tujuan ekonomi bukan sekadar materi, melainkan kesejahteraan holistik yang menjadikan manusia lebih bermartabat dan dekat kepada Sang Pencipta.

Ekonomi barokah merupakan sebuah ikhtiar transformatif untuk menjelmakan doa mukmin dalam QS. Al-Baqarah [2]:201 ke dalam realitas sosial yang konkret. Ia tidak memusuhi dunia dan kemajuan material, melainkan menempatkannya dalam bingkai makna akhirat yang menyeluruh dan integratif. Dengan demikian, ekonomi barokah



tidak menolak kekayaan, melainkan mengembalikan maknanya sebagai amanah ilahiyah dan instrumen pengabdian kepada Sang Pencipta dan sesama manusia.

Dalam perspektif ini, harta tidak lagi dipuja sebagai tujuan akhir, melainkan dipahami sebagai titipan yang harus ditunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya secara adil dan penuh kesadaran. Kerja yang seringkali hanya dipandang sebagai alat memenuhi kebutuhan duniawi berubah menjadi manifestasi ibadah sebuah ‘ibadah mu‘amalah yang mengikat antara usaha duniawi dengan niat spiritual. Pasar, yang kerap dianggap sebagai arena persaingan dan kerakusan, didefinisi menjadi ruang pertemuan sosial yang sarat nilai: ladang berbagi, saling tolong, dan memperkuat ikatan silaturahmi.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulum al-Din*, setiap aktivitas duniawi yang berniat ikhlas dan mengikuti prinsip keadilan adalah bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, ekonomi barokah menjadi jembatan antara aspek material dan spiritual kehidupan, menolak dikotomi palsu antara dunia dan akhirat yang sering mengarah pada disfungsi sosial dan krisis moral.

Ekonomi barokah menegaskan bahwa kekayaan dan kemakmuran harus selalu dibarengi dengan keadilan distributif dan keberlanjutan sosial, agar tidak menjadi sumber ketimpangan dan kehancuran. Seperti ditegaskan oleh M. Umer Chapra, keberkahan dalam ekonomi adalah ketika kemakmuran bukan hanya milik segelintir orang, tetapi menjadi rahmat yang menyebar merata, menghidupkan maslahat bagi seluruh komunitas.

Dengan demikian, ekonomi barokah bukan hanya sekadar teori, tetapi paradigma hidup yang mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, amanah, keadilan, dan rahmah dalam setiap proses ekonomi. Ia mengajak umat untuk melihat kembali hakikat harta, kerja, dan pasar sebagai sarana pengabdian, bukan sekadar alat akumulasi dan kompetisi. Dalam konteks ini, keberkahan menjadi parameter utama



keberhasilan ekonomi, menggantikan paradigma materialistik yang sempit dan destruktif.

Ketika sistem ekonomi dijalankan dengan niat ibadah, dijiwai oleh kasih sayang, dan diarahkan untuk maslahat umat, ia melampaui sekadar mekanisme produksi dan distribusi materi. Sistem semacam ini bukan hanya mampu menghadirkan kesejahteraan duniawi yang inklusif dan berkeadilan, tetapi juga mengundang ridā Allah SWT sebagai sumber keberkahan yang hakiki. Dalam pandangan M. Umer Chapra (2000), ekonomi yang berlandaskan nilai spiritual dan etika moral mampu menjadikan aktivitas ekonomi sebagai sarana penghambaan yang membangun harmoni antara kebutuhan materi dan kebahagiaan batin.

Visi ekonomi ini menolak reduksi ekonomi menjadi sekadar kalkulasi keuntungan atau akumulasi kekayaan, dan sebaliknya menempatkan ekonomi sebagai medium pengaktifan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan rahmah. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulum al-Din*, “Setiap amal yang berniat ikhlas dan dijalankan dengan kesungguhan adalah bentuk ibadah yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya.” Dengan demikian, ekonomi barokah berperan tidak hanya dalam menggerakkan roda materi, tetapi juga menuntun jiwa manusia menuju pemaknaan hidup yang lebih dalam, yakni keselamatan hakiki di dunia dan akhirat.

Ekonomi yang berorientasi pada maslahat menghendaki bahwa pertumbuhan dan kemakmuran harus beriringan dengan keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi menjadi ladang amal yang membumikan nilai-nilai spiritual dan etika, menjadikannya sumber keberkahan yang melimpah bagi kehidupan umat dan alam semesta.



D. SERUAN UNTUK TRANSFORMASI INDIVIDU DAN STRUKTURAL

Ekonomi barokah bukan sekadar ajakan etis, tetapi sebuah panggilan revolusioner yakni revolusi jiwa sekaligus revolusi sistem. Ia menawarkan kritik tajam terhadap dikotomi palsu antara kesalehan individual dan keadilan sosial yang kerap menjebak umat dalam dilema spiritualitas yang terasing dari struktur ketimpangan. Dalam logika ekonomi barokah, pembebasan batin dan transformasi sistemik adalah dua sisi dari satu mata uang peradaban. Tidak cukup memperbaiki niat pribadi jika sistem ekonomi masih dibangun di atas eksploitasi dan ketidakadilan; dan tidak pula memadai membenahi struktur makro jika hati para pelaku ekonomi masih dibelenggu oleh ketamakan dan egoisme.

Sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Quthb dalam *Ma'ālim fī al-Ṭarīq*, “Perubahan yang hakiki tidak dimulai dari sistem, tetapi dari manusia. Namun manusia yang berubah tidak akan sempurna kecuali jika hidup dalam sistem yang mendukung kebajikan dan menghalangi kemungkarannya.” Maka perubahan sejati, dalam kerangka ekonomi barokah, menuntut sinergi dua arah: dari dalam dan dari luar, dari batin menuju kebijakan, dari takwa menuju tata kelola, dari tazkiyat al-nafs menuju tanzīm al-‘umūr.

Inilah titik temu antara spiritualitas dan struktur. Dalam pandangan ini, *taqwa* bukan hanya kualitas personal, tetapi fondasi moral bagi sistem ekonomi yang adil dan manusiawi. Sebab, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali, “Agama tanpa akal akan lumpuh, dan akal tanpa agama akan buta.” Maka, ekonomi barokah menjadi jalan tengah yang menerangi bukan hanya hati individu, tetapi juga ruang-ruang publik tempat kebijakan dilahirkan dan keadilan ditegakkan.

Ekonomi barokah tidak lahir dari kosmetik kebijakan atau jargon spiritualitas semu, melainkan dari sebuah transformasi paradigmatis yang menyeluruh menyentuh seluruh dimensi keberadaan manusia dan masyarakat: pribadi, sistemik, kultural, dan politik. Ia merupakan



gerakan peradaban yang holistik, bukan sekadar program sektoral; sebuah ikhtiar kolektif untuk mengharmoniskan nilai tauhid dengan realitas ekonomi kontemporer yang kerap digerakkan oleh logika eksploitatif. Dalam semangat ini, ekonomi barokah bertumpu pada empat pilar utama sebuah kerangka etis-struktural yang dirancang untuk membentuk tatanan ekonomi yang sesuai dengan fitrah insani dan kehendak Ilahi:

1) **Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)**

Segala perubahan yang berkelanjutan selalu berakar dari dalam diri. Dalam pandangan Islam, keserakahan (*hirs*), kecintaan berlebih terhadap dunia (*hubb al-dunyā*), dan gaya hidup konsumtif adalah penyakit hati yang tak hanya merusak individu, tetapi juga menopang struktur ketimpangan global. Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa *“penyakit umat berasal dari rusaknya niat dan dominasi hawa nafsu atas akal dan syariat.”* Oleh karena itu, tazkiyah bukan hanya laku spiritual personal, tetapi fondasi psikologis-ekonomi yang melahirkan keinsafan, keikhlasan, dan kesadaran bahwa harta bukan milik mutlak, melainkan amanah yang harus ditunaikan secara bertanggung jawab kepada Allah dan sesama. Di sinilah spiritualitas menjadi awal dari ekonomi yang etis.

2) **Tashfiyatun Nizām (Pemurnian Sistem)**

Ekonomi yang adil tidak mungkin lahir dari sistem yang dibangun atas dasar akumulasi kapital tanpa batas, eksploitasi struktural, dan pengabaian nilai. Oleh karena itu, perlu dilakukan *tashfiyah* pemurnian sistem dari praktik riba, korupsi, manipulasi pasar, dan sentralisasi kekayaan yang menggerus keadilan sosial. Dalam istilah Al-Mawardi, tugas negara adalah *iqāmat al-‘adl* menegakkan keadilan sebagai prinsip dasar kehidupan publik. Pemurnian ini mencakup reformulasi kebijakan fiskal, arsitektur pasar, dan struktur kepemilikan agar lebih selaras dengan prinsip *mīzān* (keseimbangan) dan *‘adālah* (keadilan distributif) yang substansial, bukan sekadar kosmetik.



3) **Tarbiyatul Ummah (Pendidikan Umat)**

Tak ada transformasi sistemik yang bermakna tanpa revolusi kultural. Ekonomi barokah membutuhkan masyarakat yang melek nilai masyarakat yang menempatkan keberkahan di atas kemewahan, kejujuran di atas keuntungan instan, dan tanggung jawab sosial di atas individualisme. Maka pendidikan baik formal maupun kultural menjadi fondasi strategis. Pendidikan spiritual-ekonomi tidak hanya mengajarkan literasi finansial, tetapi juga membangun *karakter ruhani* yang menanamkan adab bermuamalah, rasa cukup (*qana'ah*), dan kepedulian terhadap sesama. Dalam semangat ini, *tarbiyah* menjadi motor utama lahirnya komunitas ekonomi yang kuat secara produktivitas, namun rendah hati secara spiritual.

4) **Tashrī'ul 'Adl (Legislasi Keadilan)**

Di puncak struktur ini berdiri pilar politik dan legislasi yakni pengaturan kebijakan yang merefleksikan nilai-nilai wahyu dan maqāsid al-sharī'ah. Dalam Islam, negara bukan entitas netral, melainkan pemikul amanah moral untuk mewujudkan keadilan substantif. Legislasi yang adil bukan hanya menetapkan hukum, tetapi menata kehidupan: berpihak pada kelompok mustadh'afin (yang dilemahkan), memperkuat ekonomi lokal, melindungi kebutuhan dasar dari komodifikasi, serta menantang konsentrasi kekuasaan dan kekayaan oleh segelintir elite. Seperti ditegaskan oleh Ibn Ashur, maqāsid syariah harus dijadikan sebagai asas utama dalam merancang kebijakan publik, agar hukum tidak terjebak dalam prosedur, tetapi memuliakan manusia.

Empat pilar ini *tazkiyah*, *tashfiyah*, *tarbiyah*, dan *tashrī'* merupakan kerangka integral dari ekonomi barokah sebagai gerakan transformatif. Ia membentangkan jalan tengah antara idealisme dan realisme, antara spiritualitas dan struktur. Dalam dunia yang terus diguncang oleh krisis nilai dan ketimpangan global, ekonomi barokah menawarkan bukan sekadar alternatif, tetapi arah peradaban baru yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara efisiensi dan keberkahan, antara pertumbuhan dan keadilan.



Keempat pilar ini bukanlah jalan pintas menuju kemakmuran, melainkan jalan terang yang mengundang kesungguhan kolektif sebuah ikhtiar bersama yang menggabungkan kesalehan individu dan keberpihakan struktural. Dari individu yang bertakwa, yang membersihkan hati dari kerakusan dan menjalankan muamalah dengan niat ibadah; hingga negara yang adil, yang menata kebijakan sebagai amanah ilahiyah, bukan sekadar alat kekuasaan.

Dalam kerangka ini, transformasi menuju ekonomi barokah merupakan bentuk *jihad zaman modern* jihad bukan dalam makna peperangan fisik, tetapi perjuangan moral-intelektual untuk menata ulang bukan hanya angka-angka statistik dan neraca, tetapi juga makna, nilai, dan orientasi hidup. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Malik Bennabi, “Kebangkitan suatu peradaban bergantung bukan hanya pada infrastruktur, tetapi pada kekuatan ide yang menghidupkan struktur.”

Sebab pada akhirnya, keberkahan dalam ekonomi bukan soal kuantitas semata, melainkan kualitas kehidupan: keterhubungan antara bumi dan langit, antara dunia dan akhirat, antara manusia dan Tuhannya. Di sinilah ekonomi barokah menemukan tujuannya yang terdalam: bukan hanya menciptakan kemakmuran lahiriah, tetapi juga ketenteraman batiniah; bukan sekadar menstimulasi produksi, tetapi juga menyuburkan kesadaran; bukan hanya mengisi dompet, tetapi juga menumbuhkan jiwa yang bersyukur dan bertanggung jawab.

Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Ghazālī dalam *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, “Barangsiapa menjadikan dunia sebagai ladang akhirat, maka dunia akan melayaninya. Tapi barangsiapa menjadikan dunia sebagai tujuan, maka ia akan diperbudak olehnya.” Ekonomi barokah hadir agar kita kembali mengolah dunia sebagai ladang kebaikan, bukan sebagai tuhan pengganti.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra’d [13]:11 yang mengingatkan kita, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada



diri mereka sendiri.” Ayat ini menjadi pijakan fundamental dalam paradigma ekonomi barokah, yang menegaskan bahwa transformasi sosial-ekonomi sejati berawal dari perubahan individu dari kesadaran batin, niat suci, dan perilaku yang bersih.

Perubahan eksternal dalam sistem ekonomi dan kebijakan publik tidak akan berjalan efektif tanpa revolusi internal yang membebaskan jiwa dari kerakusan, ketamakan, dan keserakahan. Maka, ekonomi barokah menuntut sinergi antara tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) dan tashfiyatun nizam (pemurnian sistem), karena keduanya saling menguatkan sebagai fondasi keberlanjutan dan keadilan.

Dalam konteks ini, QS. Ar-Ra’d:11 menjadi pengingat bahwa setiap perubahan sosial memerlukan komitmen individu untuk berbenah, dan bahwa amanah ekonomi bukan hanya persoalan struktur, melainkan juga hati yang bersih dan niat yang ikhlas.

Ayat ini tidak sekadar menjadi seruan untuk muhasabah individual, melainkan juga mandat yang menuntut perubahan struktural secara kolektif. Dalam kerangka ekonomi barokah, transformasi tersebut bukanlah semata tugas personal, tetapi jihad sosial yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi membangun tatanan ekonomi yang tidak hanya efisien dan kompetitif, melainkan juga sarat kasih, bermakna mendalam, dan berlimpah rahmat.

Ekonomi barokah adalah upaya peradaban yang menyatukan dua dimensi yang sering dipisahkan: pasar dengan nurani, angka dengan akhlak, serta kebijakan dengan kasih sayang. Ia menghadirkan paradigma holistik yang melampaui sekadar kalkulasi material, dengan menempatkan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi dalam proses pembangunan ekonomi dan pengambilan keputusan publik.

Dalam konteks ini, QS. Ar-Ra’d:11 mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi ekonomi dan sosial berawal dari perubahan hati dan niat yang tulus, yang selanjutnya melahirkan tindakan kolektif untuk memperbaiki sistem demi kesejahteraan bersama dan keadilan sosial yang hakiki.



E. MENUJU EKONOMI YANG MENGHIDUPKAN

Ekonomi barokah adalah ekonomi yang mengajukan pertanyaan mendasar dan transendental: “Apa manfaat nyata dari pekerjaanku bagi sesama, dan apakah Allah meridhoinya?” Ia tidak lahir dari obsesi terhadap angka statistik atau pertumbuhan semu, tetapi tumbuh dari ketulusan memberi dan orientasi kepada maslahat. Dalam ekonomi barokah, keberhasilan tidak diukur dari dominasi pasar atau pencapaian kompetitif semata, melainkan dari sejauh mana kegiatan ekonomi menjadi sarana pengabdian kepada Tuhan dan pelayanan kepada umat manusia.

Paradigma ini menolak fondasi ekonomi modern yang kerap didominasi oleh kompetisi membabi buta, akumulasi modal, dan eksploitasi. Sebaliknya, ia dibangun di atas semangat *ta’āwun* (saling membantu), *ukhuwwah* (persaudaraan), dan *mas’uliyah* (tanggung jawab sosial). Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mā’idah: 2, “...dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa,” ekonomi barokah menjadikan solidaritas sebagai prinsip kerja, bukan sekadar etika tambahan.

Dalam lanskap peradaban kontemporer yang kian dikendalikan oleh algoritma, dibentuk oleh narasi iklan, dan didorong oleh ambisi pertumbuhan yang tak terbatas, ekonomi barokah tampil sebagai koreksi etis sekaligus petunjuk spiritual. Ia mengingatkan bahwa kekayaan yang terlepas dari nilai ruhani akan berubah menjadi bencana sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang buta terhadap keadilan hanya akan menyiapkan jalan menuju kehancuran struktural.

Dalam kerangka ini, ekonomi barokah bukan sekadar alternatif teknokratis, melainkan sebuah kritik mendalam terhadap cara modern memaknai kesejahteraan. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Ghazālī dalam *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, “harta yang tidak dikendalikan oleh akhlak akan menjadi fitnah bagi pemiliknya.” Oleh karena itu, ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kerangka tauhid dan tanggung jawab moral; ia harus diarahkan untuk membangun kebermaknaan hidup, bukan sekadar mengejar pertambahan angka.



Ekonomi barokah mengembalikan ekonomi pada fitrah ontologisnya sebagai sarana penghidupan yang memuliakan manusia dan menjaga keberlangsungan ciptaan. Ia menolak reduksi epistemologis yang memaknai ekonomi semata sebagai kalkulasi rasional produksi dan konsumsi, serta mengkritik paradigma utilitarianisme yang mengukur nilai segala sesuatu hanya melalui keuntungan material. Dalam pendekatan ini, ekonomi bukan lagi arena pertarungan ego dan ekspresi kerakusan individual, melainkan medan pelayanan (khidmah) dan ekspresi kasih sayang (rahmah) antarmanusia.

Konsepsi rezeki tidak dipandang sebagai hasil perebutan bebas dalam pasar yang liberal, melainkan sebagai amanah (amānah) dari Tuhan yang harus dikelola secara adil, jujur, dan penuh tanggung jawab. Harta (māl), dalam perspektif ini, tidak menjadi instrumen dominasi atau sumber stratifikasi sosial, tetapi menjadi alat distribusi manfaat, pemberdayaan, dan penguatan solidaritas sosial.

Sebagaimana ditegaskan oleh al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, bahwa tugas seorang pemimpin dalam konteks ekonomi adalah “*tasfīr al-maṣāliḥ wa dafʿ al-mafāsid*” menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Maka ekonomi barokah menjelma sebagai kerangka etis-struktural yang menyatukan antara kebijakan publik, tanggung jawab spiritual, dan pembelaan terhadap hak-hak kaum mustaḍʿafīn (yang dilemahkan).

Ekonomi barokah membangun sebuah paradigma alternatif yang menolak sempitnya pengukuran pertumbuhan hanya melalui indikator kuantitatif seperti PDB atau volume konsumsi. Ia menegaskan bahwa *pertumbuhan sejati* adalah pertumbuhan yang berakar pada kualitas hidup yang utuh dan berkelanjutan yang meliputi kebahagiaan batin (saʿādah), keharmonisan relasi sosial (ukhuwwah), serta kelestarian ekologis sebagai bagian dari amanah penciptaan.

Dalam kerangka ini, manusia tidak diposisikan sebagai *homo economicus* yang rakus dan konsumtif, melainkan sebagai *khālīfah*



fi al-ard pemikul amanah Tuhan di bumi yang ditugasi untuk mengelola harta dan sumber daya bukan dengan nafsu dan dominasi, tetapi dengan *hikmah* (kebijaksanaan), *mīzān* (keseimbangan), dan tanggung jawab spiritual.

Sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Ar-Rahmān [55]:7-9: “*Dan langit telah Dia tinggikan, dan Dia letakkan mīzān (timbangan/keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas dalam timbangan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*”

Ayat ini tidak hanya memuat etika perdagangan yang jujur, tetapi juga prinsip dasar pembangunan ekonomi yang adil dan seimbang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap seluruh ciptaan.

Dengan demikian, ekonomi barokah bukan sekadar desain ekonomi etis, tetapi juga kerangka kosmologis yang memulihkan relasi manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Ia menghidupkan kembali orientasi spiritual dalam sistem ekonomi kontemporer, dan menjadikannya sebagai fondasi bagi peradaban yang tidak hanya produktif, tetapi juga bermartabat dan berkeadilan.

Dan justru dari pertanyaan sederhana itulah “*Apa manfaatku bagi sesama, dan apa ridha Allah atas pekerjaanku?*” sebuah gerakan peradaban dapat dirintis. Bukan dari menara institusi raksasa atau agenda-agenda global semata, tetapi dari ruang-ruang kecil yang penuh ketulusan: warung yang berdagang dengan kejujuran, keluarga yang hidup dalam syukur dan kesederhanaan, komunitas yang saling menopang dalam semangat *ta‘āwun*, hingga negara yang menjadikan keadilan (‘adālah) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) sebagai orientasi utama kebijakan publiknya.

Dalam kerangka ini, ekonomi tidak lagi dipahami sebagai mekanisme impersonal pencetak uang atau akumulasi laba semata, melainkan sebagai *jalan hidup* sebuah *ṭarīqah* untuk menumbuhkan kedewasaan spiritual (*tazkiyah*), menata keharmonisan sosial yang adil dan inklusif, serta merawat keberlanjutan ekologis sebagai bentuk penghambaan kepada Sang Pencipta.



Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, bahwa harta (*al-māl*) bukanlah tujuan pada dirinya, melainkan wasilah untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi: menegakkan agama, memelihara jiwa, dan membangun kehidupan yang berkah di dunia dan akhirat. Dalam semangat inilah, ekonomi barokah berdiri: menolak reduksi nilai pada angka, dan menempatkan manusia, harta, serta alam dalam satu simpul nilai tauhid yang utuh dan transformatif.

Ekonomi barokah membimbing manusia untuk hidup dalam kesadaran yang mendalam akan makna rezeki dan tanggung jawab. Ia menanamkan *qana'ah* rasa cukup yang memerdekakan dari jerat kerakusan; *ikhlās* niat lurus yang mengubah kerja menjadi ibadah; dan *rahmah* kasih sayang yang menjadikan berbagi sebagai refleksi dari cinta Ilahi. Dalam bingkai ini, ekonomi tidak dipisahkan dari dimensi ruhaniah, melainkan menjadi ruang pengabdian dan penyempurnaan diri.

Paradigma ekonomi barokah menjembatani dikotomi palsu antara dunia dan akhirat, antara pasar dan masjid, antara angka-angka transaksi dan getaran ibadah. Sebagaimana diajarkan oleh para ulama spiritual seperti Ibn 'Aṭā'illah, “Setiap gerak dan diammu adalah bentuk pengabdian jika dilakukan karena Allah.” Maka dalam ekonomi barokah, aktivitas pasar pun bisa menjadi zikir, dan transaksi bisa menjadi wujud takwa, selama dijalankan dengan adab dan niat yang benar.

Di dalamnya, laba tidak lagi dipahami semata sebagai surplus keuangan, tetapi sebagai akumulasi kebermanfaatan (*manfa'ah*): sejauh mana harta yang diperoleh menebar maslahat, memuliakan sesama, dan menghindarkan dari kezhaliman. Rezeki tidak hanya dihitung dalam kuantitas, tetapi ditakar pula dalam kualitas: apakah ia menenangkan jiwa atau justru mengguncangnya; apakah ia menghadirkan rasa syukur atau menyuburkan kesombongan; apakah ia menjaga martabat manusia atau malah mencederainya.

Dengan demikian, ekonomi barokah mengembalikan fungsi ekonomi sebagai jalan kesempurnaan insani menghubungkan ikhtiar duniawi



dengan cita transenden, dan menjadikan setiap rupiah bukan hanya alat tukar, tetapi bagian dari pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Ketika aktivitas ekonomi dijalankan sebagai bentuk ‘ubūdiyyah penghambaan kepada Allah dan sebagai manifestasi mahabbah cinta kasih kepada sesama makhluk-Nya, maka ekonomi tidak lagi berdiri sebagai sistem yang kering dari makna, melainkan menjelma menjadi ladang pahala, ruang penyembuhan, dan jembatan rahmat. Dalam paradigma ini, manusia tidak sekadar mengejar rezeki, tetapi menghadirkan kehadiran Ilahi dalam setiap ikhtiar dan transaksi. Ekonomi menjadi jalan mendekat, bukan menjauh; sarana menyucikan, bukan mengotori.

Sebagaimana disabdakan Rasulullah ﷺ, “Sebaik-baik harta adalah harta di tangan hamba yang saleh.” (HR. Ahmad). Maka harta yang berkah bukanlah yang menumpuk dalam angka, tetapi yang mengalirkan manfaat, memuliakan sesama, dan mendekatkan kepada Tuhan.

Sebuah doa pun menggema dari relung batin yang sadar akan makna harta sebagai amanah:

“Ya Allah, jadikanlah harta di tangan kami bukan sebagai ujian yang menyesatkan, tetapi sebagai sarana untuk semakin dekat kepada-Mu.

Limpahkanlah keberkahan dalam setiap usaha kami, agar setiap transaksi menjadi dzikir, setiap laba menjadi syukur, dan setiap rezeki menjadi rahmat bagi semesta.”

Inilah seruan untuk membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara material, tetapi juga menyejukkan bumi dan mengangkat derajat manusia. Ekonomi yang tak sekadar mengejar grafik, tetapi juga mengukir makna. Ekonomi yang menghimpun maslahat dan menebar rahmah.

Itulah ekonomi barokah.

Itulah ekonomi yang dirindukan dunia.

Itulah ekonomi yang mengundang rahmat Ilahi.



EPILOG

MENUJU EKONOMI YANG MEMBAWA BAROKAH

Di tengah dunia yang kian terpolarisasi oleh angka, algoritma, dan ambisi yang tak mengenal batas, ekonomi barokah hadir bukan semata sebagai sistem alternatif, tetapi sebagai paradigma eksistensial cara melihat, merasakan, dan menata dunia dengan mata hati yang jernih dan ruh yang tercerahkan. Ia mengajukan pertanyaan mendasar yang kerap diabaikan oleh sistem ekonomi konvensional: untuk siapa pertumbuhan itu? Siapa yang ditinggalkan oleh kemajuan? Dan nilai apa yang dikorbankan demi efisiensi?

Dalam kerangka ekonomi barokah, pertumbuhan tidak boleh dibangun di atas reruntuhan keadilan; kemajuan tidak boleh menggerus kebijaksanaan lokal dan spiritual; dan efisiensi tidak boleh membunuh empati sosial. Sebaliknya, ia menuntun kita untuk mengintegrasikan rasionalitas dengan welas asih, produktivitas dengan kebermaknaan, dan kemajuan material dengan kesadaran ilahiyah. Seperti ditegaskan oleh Imam Al-Ghazālī, “Ilmu yang tidak disertai akhlak akan menjadi sebab kesesatan, dan kekayaan yang tidak dipandu oleh iman akan menjadi sumber kerusakan.” Maka, dalam ekonomi barokah, kebijakan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi pilihan moral dan spiritual.

Barokah, dalam pandangan Islam, bukanlah semata-mata keberlimpahan materi, tetapi pancaran *ketenangan batin*, *kesejukan*

jiwa, dan *makna transenden* dalam ketercukupan. Ia melampaui ukuran-ukuran kuantitatif dan menjelma menjadi kualitas hidup yang menghubungkan antara dunia dan akhirat. Barokah hadir bukan saat kekayaan menumpuk di segelintir tangan, tetapi ketika harta dibagikan dengan penuh keikhlasan, dan digunakan untuk menghidupkan kehidupan bukan sekadar memuaskan nafsu individual.

Dalam tatanan ekonomi yang diberkahi, kebijakan publik tidak boleh bersikap pura-pura netral. Ia harus secara sadar berpihak kepada yang lemah dan terpinggirkan, sebagaimana prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *rahmah* (kasih sayang) yang menjadi inti maqāsid al-sharī'ah. Teknologi pun tidak boleh menjadi alat eksploitatif yang memperbesar jurang sosial, melainkan harus diarahkan oleh nilai tauhid yakni kesadaran bahwa seluruh ciptaan terhubung dalam satu sistem ilahiyah yang harmonis.

Di dalam ekosistem ini, setiap transaksi ekonomi tidak lagi menjadi rutinitas duniawi yang dingin, tetapi menjadi bagian dari ibadah. Setiap keputusan ekonomi dilihat sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi di hadapan Tuhan. Dan setiap angka dalam neraca pembangunan bukanlah angka kosong, melainkan angka yang punya *ruh* yang memancarkan keadilan, kebermanfaatan, dan kasih sayang.

Inilah panggilan zaman: membangun kembali sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar efisiensi teknokratis, tetapi juga menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Sebuah sistem yang tidak hanya produktif dalam menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga *memanusiakan* dalam distribusinya yang tidak menanggalkan nilai demi angka, dan tidak mengorbankan nurani atas nama modernisasi.

Sebab, seperti diingatkan oleh para filsuf dan cendekiawan dari berbagai zaman, kemajuan yang kehilangan nilai hanyalah percepatan menuju kehampaan. Teknologi tanpa kebijaksanaan adalah bahaya, dan kekayaan tanpa akhlak adalah fitnah. Dalam konteks ini, ekonomi

tidak boleh lagi dipisahkan dari etika; ia harus menjadi *ekspresi tanggung jawab kolektif*, bukan sekadar arena kompetisi individual.

Maka, membangun ekonomi barokah adalah menjawab tantangan abad ini: bagaimana menghadirkan sistem yang tidak sekadar bekerja, tetapi juga *berdoa*; yang tidak hanya bergerak, tetapi juga *merenung*; dan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga *berbikmah*. Inilah jalan menuju peradaban yang utuh di mana efisiensi berpadu dengan empati, dan kemajuan berjalan berdampingan dengan makna.

Dalam cahaya ekonomi barokah, angka-angka yang selama ini kering dan mekanistik kembali bernyawa, menyimpan makna dan ruh yang mendalam. Pembangunan tidak lagi sekadar berorientasi pada laju pertumbuhan kuantitatif, melainkan menemukan arah yang lebih holistik mengarah bukan hanya ke masa depan, tetapi juga ke dalam diri manusia itu sendiri.

Di tengah tekanan budaya konsumsi yang mengikis kesadaran dan martabat, manusia kembali meneguhkan identitas sejatinya sebagai khalifah di muka bumi pengelola amanah yang bertanggung jawab, bukan sekadar konsumen rakus yang kehilangan arah. Dalam paradigma ini, pembangunan menjadi wahana pemanusiaan, dan ekonomi berfungsi sebagai sarana untuk merealisasikan tugas suci menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, materi dan spiritualitas.

Di sinilah ekonomi menemukan jalan pulangnya bukan sekadar sebagai mekanisme pasar atau alat akumulasi, tetapi sebagai perjalanan spiritual menuju Tuhan. Ia terejawantahkan dalam kerja yang jujur penuh integritas, kebijakan yang menegakkan keadilan sosial, transaksi yang beradab dan bermartabat, serta dalam seluruh denyut kehidupan yang sarat makna dan keberkahan. Ekonomi menjadi ladang pengabdian, tempat manusia menunaikan amanah dengan penuh kesadaran bahwa setiap aktivitasnya adalah ibadah dan wujud syukur kepada Sang Pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid. 2001. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Al-Banna, Hasan. 1990. *Risalah Ta'lim*. Kairo: Dar al-Da'wah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2005. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2000. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1997. *Daur al-Qiyam wa al-Akblaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Qur'an Al-Karim: QS. Al-Baqarah, QS. Al-Nahl, QS. Ar-Ra'd, QS. Al-Ma'un, dan lainnya.
- Al-Qur'an: QS. Adz-Dzariyat: 22; QS. Al-Baqarah: 284; QS. At-Talaq: 3
- Al-Qur'an: QS. Al-A'raf: 96; QS. Al-Baqarah: 275; QS. Al-Furqan: 67; QS. Adz-Dzariyat: 19
- Al-Qur'an: QS. Al-Baqarah: 177; QS. Al-Nahl: 90; QS. Al-Ma'un: 1-7
- Al-Qur'an: QS. Al-Baqarah: 30, 275; QS. Al-Ma'idah: 88; QS. Al-Jumu'ah: 9-10
- Al-Qur'an: QS. Al-Humazah: 1-3
- Al-Qur'an: QS. Al-Mulk: 15; QS. Al-A'raf: 31; QS. At-Taubah: 103; QS. Al-Baqarah: 187; QS. Ibrahim: 40
- Al-Qur'an: QS. An-Nisa': 75; QS. Al-Qashash: 5; QS. Al-Hasyr: 7
- Al-Qur'an: QS. At-Taubah: 103; QS. Al-Baqarah: 261
- Ali, Muhammad et al. 2022. "Good Governance in Zakat and Waqf Institutions." *Journal of Islamic Philanthropy*, Vol. 9, No. 1.

- Asad, Muhammad. 1980. *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: Dar al-Andalus.
- Baudrillard, Jean. 1998. *The Consumer Society: Myths and Structures*. London: Sage.
- Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- 2008. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. IRTI-IsDB.
- Cizakca, Murat. 2011. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Elahi, Ridwan. 2020. *Pendidikan Ekonomi Islam Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hadis: HR. Al-Baihaqi; HR. Thabrani; HR. Muslim
- Hasan, Zubair. 2011. "Scarcity, Self-Interest and Maximization: A Critical Appraisal from Islamic Perspective." *Journal of Islamic Economics*, 24(1).
- Hassan, M. Kabir, & Aliyu, Sufian. 2018. *Digital Islamic Finance and Financial Inclusion: Opportunities and Challenges*. In *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 9, No. 4.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. 2003. *Madarij al-Salikin*. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi.
- Kahf, Monzer. 2006. *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*. Jeddah: IRTI.
- 2003. *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Jeddah: IRTI-IsDB.
- Korten, David. 2001. *When Corporations Rule the World*. Kumarian Press.
- Langgulang, Hasan. 1986. *Pendidikan Islam dan Tantangan Zaman*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

- Lemu, B. Aisha. 2007. *Woman in Islam*. Leicester: Islamic Foundation.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1995. *Islam and the Problem of Modern Economic Man*. London: ABC International.
- 1997. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*.
- Qur'an: QS. Al-Baqarah: 201; QS. Ar-Ra'd: 11; QS. Al-Nahl: 90
- Qutb, Sayyid. 2001. *Ma'alim fi al-Tariq*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rifkin, Jeremy. 2009. *The Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness*. Tarcher.
- Sachs, Jeffrey. 2011. *The Price of Civilization: Reawakening American Virtue and Prosperity*. Random House.
- Sardar, Ziauddin. 2006. *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam*. Oxford University Press.
- Taha Abdurrahman. 2013. *The Question of Ethics: A Contribution to the Critique of Contemporary Reason*. Arab Cultural Center.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Wahid Institute.
- World Happiness Report 2024. <https://worldhappiness.report/>
- Yunus, Muhammad. 2007. *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. New York: PublicAffairs.
- Zaman, Asad. 2014. *Towards a New Paradigm in Economics: An Islamic Perspective*. Jeddah: IRTI.
- Zuboff, Shoshana. 2019. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs.

BIODATA RINGKAS

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si



Lahir 12 Maret 1974 di Situbondo, setamat Sekolah Dasar di Gunung Malang 1 Suboh, menempuh pendidikan SMP Suboh, SMA Negeri 1 Suboh dan S1 Program Pendidikan Sejarah nya ditempuh di Universitas Jember. Tahun 1998 menempuh Kursus Bahasa Inggris di Pare Kediri, tahun 1999 mulai mengajar di MAN I Situbondo di Demung, tahun 2001 mulai mengajar di SMA Negeri 1 Suboh. Pernah menjadi Pimpinan Umum majalah Mahasiswa Pijar Pendidikan FKIP Universitas Jember. Pendidikan S2 Program Pascasarjana Konsentrasi Program Kebijakan Publik di Universitas Jember diselesaikan pada tahun 2007. Tahun 2008 mendirikan SMA Negeri 1 Besuki. Tahun 2013-2017 menjabat sebagai Kepala Seksi SMA di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Tahun 2017-2018 menjabat sebagai Kepala Seksi SMA, SMK, PK-PLK di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Situbondo. Selain itu tugas kesehariannya dosen *freelance* di beberapa universitas swasta. Dan pada tanggal 2 Februari 2019, pindah kepegawaian nya dari Provinsi Jawa Timur ke Kementerian Agama sebagai Tenaga Pengajar di UIN KHAS Jember di FEBI, kuliah S3 di FISIP Universitas Jember dengan beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan menjadi lulusan tercepat di program Doktor FISIP Unej. Saat ini diberi tugas untuk menjadi Wakil 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FEBI UIN KHAS jember.

Pria murah senyum ini adalah putra pertama dari tiga bersaudara, pasangan KH. Misbahul Munir dan Hj. Hamidatus Salamah (alm).

Sampai saat ini ia telah menulis 25 judul buku, antara lain: Buku Growth Mindset (Diva Press, 2025), Buku Krisis Minat Belajar Mahasiswa: Analisis Psikologis dan Sosiologis (Pustaka Ilmu, 2025), Buku Ekonomi Makro Modern: Tantangan dan Peluang (Istana Agency, 2025), Buku Sistem Informasi Manajemen Perspektif Islam ((Diva Press, 2024), buku Administrasi Lembaga Bank dan Non Bank (Diva Press, 2024), buku Sistem Pengendalian Manajemen (Indigo Media, 2024), buku Birokrasi dan Publik Governance (Istana Agency, 2024), buku Strategies Success In Life (Diva Press, 2024), buku Perilaku Organisasi (UIN KHAS PRESS, 2023), buku Etika Bisnis & Profesi (Indigo Media, 2023) di Jakarta, buku Motivasi Ibuku Tangguh di antara Aku dan Tuhanku (Istana Agency, 2023), Buku Prophetic Governance (UIN KHAS PRESS, 2022), Manajemen Sumber Daya Insani Ala Pesantren (ASWAJA PRESSINDO Yogyakarta, 2021), Sistem Informasi Manajemen (Bildung Yogyakarta, 2020). Buku MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH Sebuah Pengantar (Bildung Yogyakarta, 2019). Buku Model Pembelajaran dalam Berbagai Pendekatan (LP3DI Press, 2019). Dan, juga menjadi editor beberapa buku karya dosen FEBI UIN KHAS dan Dosen Perguruan Tinggi Lain.

https://scholar.google.com/citations?user=BE_hhcAAAAAJ&hl=id

Denny Prabu Syahputra, S.Ak., M.Ak.



Lahir di Bogor pada 25 Februari 1994. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Bogor, yang diselesaikannya di SMA Yayasan Pendidikan Haji Bogor (YPHB). Jenjang pendidikan Sarjana (S1) di bidang Akuntansi ia tempuh di Universitas Telkom mulai tahun 2012. Semangatnya dalam menuntut ilmu berlanjut hingga meraih gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) dari Universitas Jember pada tahun 2024. Saat ini, ia mengabdikan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama, dengan penempatan tugas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Pria tampan ini adalah putra kedua-dari empat bersaudara-pasangan H. Ir. Edi Sukasmin dan Hj. Ratinah Sulaiman, sampai saat ini ia telah menulis beberapa jurnal dengan judul jurnal, antara lain: Jurnal Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih (Studi Pada Perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk Tuban Plant pada 2013-2016) (Repository Telkom University, 2018), Jurnal The Influence of Financial Literacy and Financial Attitude on the Behavior of Financial Managers with Locus of Control as an Intervening Variable in Jember District Government Employees (IJTSRD, 2024).

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=id&hl=id&user=Q7efanQAAAAJ

Riskia Putra, S.Pd., M.M.



Lahir di Surabaya pada tanggal 24 Desember 1996, seorang akademisi dan kreator konten yang dikenal karena dedikasi dan semangatnya dalam mengembangkan dunia pendidikan serta komunikasi digital. Meniti perjalanan intelektualnya dengan penuh komitmen hingga saat ini mengabdikan sebagai dosen di Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Dalam peran tersebut, Riskia aktif mengajar, membimbing, serta terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan pengembangan kurikulum, dengan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Di luar dunia akademik, Riskia menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap dunia kepenulisan dan digital kreatif. Ia aktif menulis berbagai artikel, esai, serta konten edukatif yang membahas isu-isu sosial, pendidikan, dan motivasi. Sebagai content creator, ia memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan pesan-pesan yang membangun dan inspiratif, menjadikannya figur yang mampu menjembatani dunia pendidikan formal dan ranah digital yang lebih luas.

Kombinasi keahlian akademik, kemampuan komunikasi, dan kreativitas digital menjadikan Putra sebagai sosok yang multidimensional. Ia percaya bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga dapat diperluas melalui media sosial dan berbagai platform kontemporer. Visi tersebut mendorongnya untuk terus belajar, berbagi, dan berinovasi, serta menginspirasi generasi muda agar tetap adaptif, kritis, dan berdaya saing di era global.

Dengan integritas, semangat literasi, dan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan, Riskia Putra terus mengukir kiprah sebagai pendidik sekaligus agen perubahan di tengah transformasi digital dan tantangan dunia modern.

Ekonomi Barokah

Dalam dunia yang terjebak pada logika angka, pertumbuhan tanpa batas, dan konsumerisme yang membius, Ekonomi Barokah menawarkan sebuah jalan sunyi yang memulihkan arah: dari tauhid menuju keadilan sosial. Buku ini tidak hanya mengkritik kapitalisme global yang kehilangan ruh, tetapi juga menggali ulang makna ekonomi sebagai ibadah, amanah, dan sarana pembebasan.

Berpijak pada pendekatan naratif-reflektif dan kerangka teologis-filosofis, karya ini merumuskan ulang ekonomi sebagai laku spiritual yang menyatu dengan etika sosial. Ia membahas konsep barokah bukan sebagai romantisme metafisik, tetapi sebagai paradigma alternatif yang menempatkan kejujuran, qana'ah, zakat, kesalingan, dan kebermanfaatan sebagai pilar-pilar peradaban.

Dari ruang rumah tangga hingga ranah kebijakan publik, dari pasar tradisional hingga lanskap digital, buku ini menelusuri bagaimana ekonomi dapat menjadi jalan keberkahan—bukan hanya karena hasilnya, tetapi karena niat, cara, dan tujuan yang dituju.

Ekonomi Barokah bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah undangan filosofis: untuk menata ulang relasi kita dengan harta, sesama, dan Tuhan; dan membangun ekonomi yang menumbuhkan, menyucikan, dan membebaskan.

Dicetak dan Didistribusikan Oleh :



Distributor buku, Penerbit & Percetakan

THE BEST SOLUTION

☎ 0851-0052-3476 ☎ 0857-2902-2165

✉ istanaagency09@gmail.com | percetakanistana09@gmail.com

🌐 www.istanaagency.com



istanaagency.com

ISBN 978-634-7256-45-4



9 786347 256454